



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

»»» 2023

Kata pengantar

Laporan kinerja Balai Besar POM di

Semarang tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim merupakan bentuk akuntabilitas terkait keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam 7 region. Balai Besar POM di Semarang masuk ke dalam Region Semarang dengan Koordinator BBPOM di Semarang dan anggota terdiri dari Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Salah satu inovasi yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang yaitu GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya) yang menasarak pedagang mie yang menggunakan bahan baku mie basah seperti pedagang pangan siap saji (mie jowo, mie kopyok dan mie bakso). Inovasi ini dapat mengubah perilaku pelaku usaha/pedagang untuk tidak lagi menggunakan bahan berbahaya untuk dicampurkan dalam produknya. Hal inilah yang mendorong BBPOM di Semarang untuk melakukan perubahan pada perilaku masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk pangan yang mengandung Bahan Berbahaya dengan menggunakan inovasi GUMREGAH.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja yang telah disusun dapat menjadi bukti pertanggungjawaban BBPOM di Semarang dan dapat memberikan kontribusi baik kepada masyarakat maupun menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) ditahun yang akan datang.

Semarang, 27 Februari 2024

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023. Semua Program dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Semarang Tahun 2023 merupakan tahun keempat periode Renstra 2020-2024, Sasaran Kegiatan Renstra 2020-2024 sama dengan tahun sebelumnya. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur kedalam 29 indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan 11 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut

Sasaran Kegiatan		
SP	Stakeholder Perspective	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
IPP	Internal Proses Perspective	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	
LGP	Learning and Growth Perspective	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	
NPS		

Jika dilihat NPSS tahun 2023 dibandingkan dengan NPSS 2023 (106,14) terjadi peningkatan 2.28 poin. Ini diartikan bahwa pencapaian **Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2021 ke tahun 2023 adalah semakin *akuntable***.

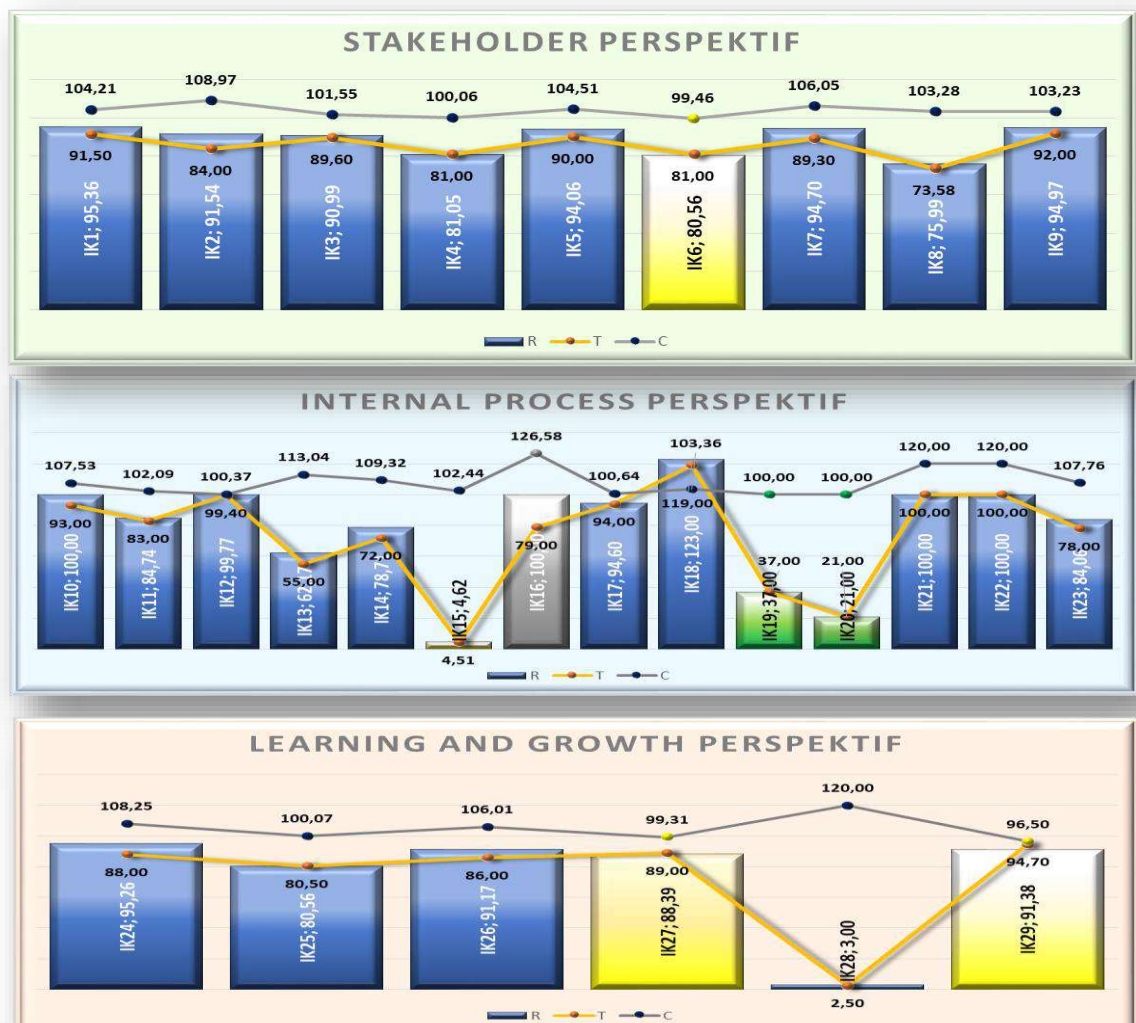


Berdasarkan pembagian klaster, BBPOM di Semarang masuk dalam Klaster 1 yang terdiri dari: BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, dan BBPOM di Bandung. NPS Total untuk BBPOM Klaster 1 Tahun 2023, sebagaimana grafik di samping. BBPOM di Semarang berada pada urutan pertama. Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM

di Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut dari 11 Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu :

- 9 (sembilan) memperoleh predikat Sangat Baik
- 2 (dua) memperoleh predikat Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total tahun 2023 adalah sebesar 106.14% dengan kriteria Sangat Baik.



Hal tersebut tidak terlepas dari capaian 29 Indikator Kinerja Utama yang sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran kegiatan.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Semarang pada tahun 2023 antara 96,50% sampai dengan 126,58%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator **“Nilai Kinerja Anggaran UPT”** sebesar 96,50%, disebabkan belum konsistennya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran dan adanya kebijakan blokir Automatic Adjustment mempengaruhi penurunan penyerapan anggaran, Capaian Rincian Output, dan Efisiensi anggaran. Sedangkan capaian indeks **“Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”** sebesar 126,58% hal ini dikarenakan melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan, dan melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BBPOM di Semarang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya BBPOM di Semarang di masa mendatang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2023	6
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	7
1.4.3 Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024	20
2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	26
2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	29
2.4 METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENCAPAIAN	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
3.2.1 Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2023	35
3.2.2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM Klaster 1	37
3.2.3 Indikator Kinerja Utama BBPOM di Semarang	38
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja.....	39
3.2 REALISASI ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2023 265	
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	267
BAB IV PENUTUP	276
4.1 KESIMPULAN	276

4.2	Saran	279
LAMPIRAN	281

Daftar Gambar

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Semarang.....	4
Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang Tahun 2023.....	8
Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah.....	10
Gambar 4 Data Sarana Produksi dan Distribusi yang di Awasi Tahun 2023..	11
Gambar 5 Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Semarang	21
Gambar 6 Peta Strategi BBPOM di Semarang	24
Gambar 7 Nilai Pencapaian Sasaran Startegis (NPSS) BBPOM di Semarang Dan B POM Klaster 1 Tahun 2023	38
Gambar 8 Profil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	38
Gambar 9 Grafik Perbandingan Capaian IK Klaster I.....	39
Gambar 10 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK1.....	40
Gambar 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK1	41
Gambar 12 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK2.....	47
Gambar 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK2	48
Gambar 14 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK3.....	57
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK3	58
Gambar 16 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK4.....	66
Gambar 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK4	67
Gambar 18 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK5.....	74
Gambar 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK5	75
Gambar 20 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK6.....	82
Gambar 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK6	83
Gambar 22 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK7.....	90
Gambar 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK7	91

Gambar 24 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK8.....	103
Gambar 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK8	103
Gambar 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK9.....	112
Gambar 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK9	114
Gambar 28 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK10	123
Gambar 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK10	124
Gambar 30 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK11	127
Gambar 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK11	128
Gambar 32 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK12	132
Gambar 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK12	133
Gambar 34 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK13	139
Gambar 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK13	140
Gambar 36 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK14	144
Gambar 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK14	145
Gambar 38 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK15	152
Gambar 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK15	154
Gambar 40 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK16	161
Gambar 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK16	162
Gambar 42 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK17	167
Gambar 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK17	168
Gambar 44 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK18	173

Gambar 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK18	174
Gambar 46 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK19	178
Gambar 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK19	179
Gambar 48 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK20	188
Gambar 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK20	189
Gambar 50 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK21	194
Gambar 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK21	195
Gambar 52 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK22	201
Gambar 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK22	202
Gambar 54 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK23	208
Gambar 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK23	209
Gambar 56 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK24	217
Gambar 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK24	218
Gambar 58 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK25	227
Gambar 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK25	228
Gambar 60 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK26	240
Gambar 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK26	241
Gambar 62 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK27	246
Gambar 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK27	247
Gambar 64 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK28	252
Gambar 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK28	253

Gambar 66 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK29	259
Gambar 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK29	260
Gambar 68 Grafik Nilai EKA/SMART	262
Gambar 69 Realisasi Anggaran 2020-2023	266
Gambar 70 Nilai capaian kinerja pada aplikasi simetris E-Performance Tahun 2023.....	275

Daftar Tabel

Tabel 1 Fungsi BBPOM di Semarang	3
Tabel 2 Kebutuhan SDM JFT BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2023	9
Tabel 3 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Semarang 2020 - 2024	22
Tabel 4 Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024	24
Tabel 5 Target penurunan “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” disetujui	27
Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023	27
Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023..	29
Tabel 8 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Perspective	31
Tabel 9 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Baik Periodik dan Tahunan	32
Tabel 10 Kriteria Ketercapaian terhadap Target akhir tahun dan Target Jangka Menengah	32
Tabel 11 Range Tingkat Efisiensi	34
Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Semarang 2023	35
Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 1	39
Tabel 14 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat (MS)	40
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK1	41
Tabel 16 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK1	43
Tabel 17 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK1	44
Tabel 18 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat (MS)	47
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK2	48
Tabel 20 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK2	50
Tabel 21 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK2	52
Tabel 22 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	57

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK3	58
Tabel 24 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK3	59
Tabel 25 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK3	60
Tabel 26 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK4	66
Tabel 28 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK4	69
Tabel 29 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK4	70
Tabel 30 Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (MS)	73
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK5	74
Tabel 32 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK5	76
Tabel 33 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK5	78
Tabel 34 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 2	81
Tabel 35 Realisasi Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat	82
Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK6	83
Tabel 37 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK6	86
Tabel 38 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK6	86
Tabel 39 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 3	88
Tabel 40 Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK7	90
Tabel 42 Rincian Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BBPOM Semarang Tahun 2023	92
Tabel 43 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK7	99
Tabel 44 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK7	100
Tabel 45 Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	102
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK8	103
Tabel 47 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK8	105

Tabel 48 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK8	106
Tabel 49 Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik.....	110
Tabel 50 Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	111
Tabel 51 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang (berdasarkan hasil SKM) tahun 2023	111
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK9	113
Tabel 53 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK9	117
Tabel 54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK9	118
Tabel 55 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 4	121
Tabel 56 Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	122
Tabel 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK10	123
Tabel 58 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK10.....	125
Tabel 59 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK10.....	125
Tabel 60 Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	126
Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK11	128
Tabel 62 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK11	129
Tabel 63 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK11	130
Tabel 64 Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	131
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK12	132
Tabel 66 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK12.....	134
Tabel 67 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK12.....	136
Tabel 68 Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	138
Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK13	139
Tabel 70 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK13.....	141
Tabel 71 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK13	141

Tabel 72 Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	143
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK14	144
Tabel 74 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK14.....	146
Tabel 75 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK14	147
Tabel 76 Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM Di Semarang ..	151
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK15	152
Tabel 78 Hasil Evaluasi IPP	155
Tabel 79 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK15.....	157
Tabel 80 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK15.....	159
Tabel 81 Realisasi Kinerja Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik	161
Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK16	162
Tabel 83 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK16.....	163
Tabel 84 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK16	164
Tabel 85 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 5	165
Tabel 86 Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	166
Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK17	167
Tabel 88 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK17	169
Tabel 89 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK17.....	171
Tabel 90 Realisasi Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	172
Tabel 91 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK18	173
Tabel 92 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK18.....	175
Tabel 93Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK18.....	176
Tabel 94 Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman.....	178
Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK19	179
Tabel 96 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK19	180
Tabel 97 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK19.....	182

Tabel 98 Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	188
Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK20	189
Tabel 100 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK20	190
Tabel 101 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK20.....	191
Tabel 102 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 6 ..	193
Tabel 103 Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	193
Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK21	194
Tabel 105 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK21	197
Tabel 106 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK21	197
Tabel 107 Realisasi Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	200
Tabel 108 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK22	201
Tabel 109 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK22	204
Tabel 110 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK22.....	204
Tabel 111 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 7 ..	206
Tabel 112 Realisasi Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	207
Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK23	208
Tabel 114 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK23	211
Tabel 115 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK23.....	212
Tabel 116 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 8 ..	216
Tabel 117 Realisasi Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang	216
Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK24	217
Tabel 119 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK24	220
Tabel 120 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK24.....	221
Tabel 121 Hasil Evaluasi SAKIP 2022-2023	226
Tabel 122 Realisasi Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang	226
Tabel 123 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK25	227

Tabel 124 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK25	233
Tabel 125 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK25.....	234
Tabel 126 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 9 ..	238
Tabel 127 Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	240
Tabel 128 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK26	240
Tabel 129 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK26	242
Tabel 130 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK26.....	243
Tabel 131 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 10	244
Tabel 132 Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	245
Tabel 133 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK27	247
Tabel 134 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK27	248
Tabel 135 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK27.....	249
Tabel 136 Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Semarang Yang Optimal	251
Tabel 137 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK28	252
Tabel 138 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK28	254
Tabel 139 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK28.....	254
Tabel 140 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 11	258
Tabel 141 Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Di Semarang ...	259
Tabel 142 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK29	260
Tabel 143 Nilai IKPA 2023.....	262
Tabel 144 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK29	263
Tabel 145 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK29.....	263
Tabel 146 Tingkat Efisiensi Kegiatan.....	268
Tabel 147 Profil Tingkat Efisiensi Setiap Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang	269
Tabel 148 Ringkasan NPSS per Sasaran Strategis	277

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan	- 1 -
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja 2023	- 9 -
Lampiran 3 Revisi Perjanjian Kinerja 2023	- 13 -
Lampiran 4 Rencana Aksi 2023	- 17 -
Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi 2023	- 19 -
Lampiran 6 Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan di uji Memenuhi Syarat.....	- 21 -
Lampiran 7 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji Memenuhi Syarat.....	- 21 -
Lampiran 8 Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	- 21 -
Lampiran 9 Sampel Makanan yang diperiksa dan di uji sesuai standar.....	- 22 -
Lampiran 10 Indeks Kesehatan Masyarakat	- 22 -
Lampiran 11 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	- 23 -
Lampiran 12 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja BPOM	- 24 -
<i>Lampiran 13 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayana Publik.....</i>	<i>- 25 -</i>
<i>Lampiran 14 Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>	<i>- 26 -</i>
Lampiran 15 Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan- 26 -	
<i>Lampiran 16 Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindalkanjuti</i>	<i>- 27 -</i>
Lampiran 17 Layanan Produksi yang memenuhi ketentuan	- 28 -
Lampiran 18 Layanan Sertifikasi.....	- 28 -
<i>Lampiran 19 Layanan distribusi yang memenuhi syarat</i>	<i>- 29 -</i>
<i>Lampiran 20 Indeks Pelayanan Publik.....</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Lampiran 21 Tingkat Efektifitas KIE.....</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Lampiran 22 Tahapan Pangan Jajanan Aman Sekolah</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Lampiran 23 Tahapan Desa Pangan Aman</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Lampiran 24 Tahapan Pasar Berbasis Komunitas</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Lampiran 25 KIE non DIPA.....</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Lampiran 26 KIE</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Lampiran 27 Pengawasan Iklan</i>	<i>- 32 -</i>
<i>Lampiran 28 Tingkat Keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan</i>	<i>- 33 -</i>
<i>Lampiran 29 Tingkat Penanganan Perkara Obat dan Makanan</i>	<i>- 33 -</i>
Lampiran 30 Indeks RB.....	- 33 -
Lampiran 31 Nilai SAKIP	- 34 -
<i>Lampiran 32 Indeks IP ASN.....</i>	<i>- 34 -</i>
Lampiran 33 Capaian Realisasi BBPOM di Semarang	- 35 -
<i>Lampiran 34 NKA BBPOM di Semarang</i>	<i>- 35 -</i>
<i>Lampiran 35 Capaian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2023 BBPOM di Semarang -</i> <i>36 -</i>	
<i>Lampiran 36 Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator</i>	<i>- 36 -</i>

Lampiran 37 Capaian Kinerja BBPOM di Semarang 2023 - 37 -
Lampiran 38 Capaian Rincian Output BBPOM di Semarang 2023 - 42 -
Lampiran 39 Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Klaster I - 43 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, maka arah kebijakan dan strategi untuk penguatan sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah dengan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan makanan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun demikian, BPOM masih memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik, oleh karena itu pada RPJMN Tahun 2020-2024 diagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Selain untuk

memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BBPOM di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email bpom_semarang@pom.go.id, Website www.pom.go.id, [Instagram](#), [Facebook](#), dan [Twitter: @bpomsemarang](#).

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

Tabel 1 Fungsi BBPOM di Semarang

FUNGSI BBPOM DI SEMARANG		
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan		8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan		9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian		10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan		11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan		12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan		13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan		14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
	DLL	15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

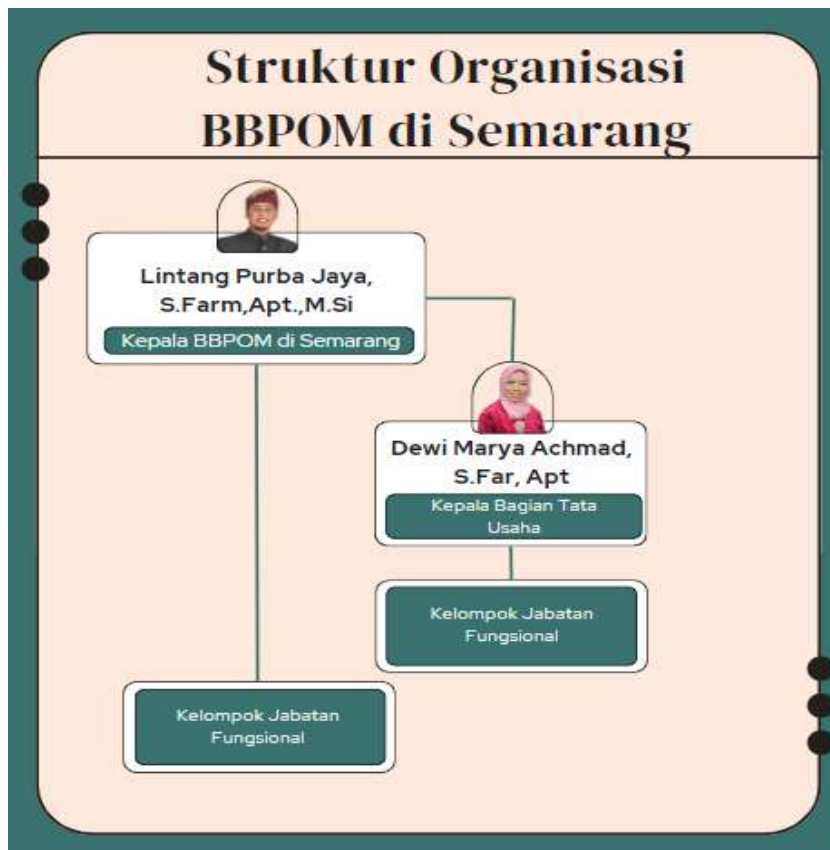
Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Semarang adalah 22 Kabupaten dan 4 Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan cakupan wilayah Balai POM di Kota Surakarta sebanyak 5 Kabupaten/ Kota dan Loka POM di Banyumas sebanyak 4 Kabupaten/ Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2024 seperti pada Gambar 1.1

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha
 - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

a Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

- 1) ketua tim; dan
- 2) anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 ISU STRATEGIS BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2023

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

- a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:

1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif

- berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarang berbasis sistem merit.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
 7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
 8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
 9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

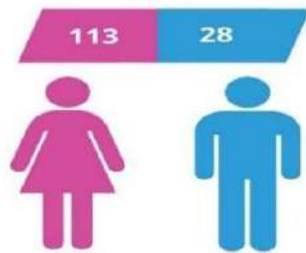
Internal

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)

PEGAWAI BBPOM SEMARANG 2023

GENDER



JABATAN



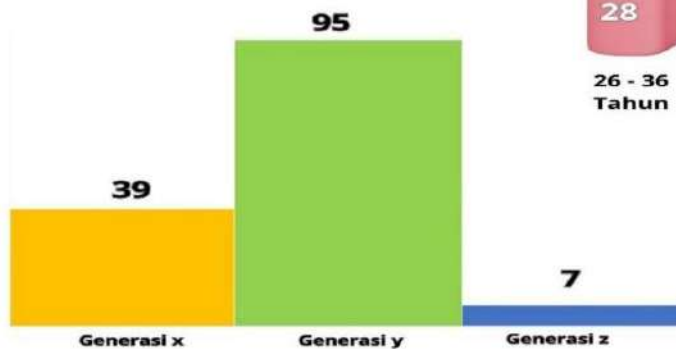
PENDIDIKAN



USIA



GENERASI



Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang Tahun 2023

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 207 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2022 BBPOM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK Tahun 2023 sejumlah 8 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Arsiparis, dan Pranata Komputer. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2023 adalah 141 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2023 memperoleh angka 91,17. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memiliki 26 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 18% dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Tabel 2 Kebutuhan SDM JFT BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		ABK Bezzeting			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	161	Orang	112	Orang	49	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	Orang	1	Orang	1	Orang
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang	1	Orang	0	Orang
8	Analisis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang
9	Penata Laksana Barang	3	Orang	1	Orang	2	Orang
10	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang
11	Analisis SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
12	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
13	Pranata Keuangan APBN	4	Orang	4	Orang	0	Orang
Total		207	Orang	120	Orang	87	Orang

b. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 61.244.229.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 61.154.028.792,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 99,85 % dari alokasi anggaran Tahun 2023

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 sebesar : Rp. 2.678.294.000,-.

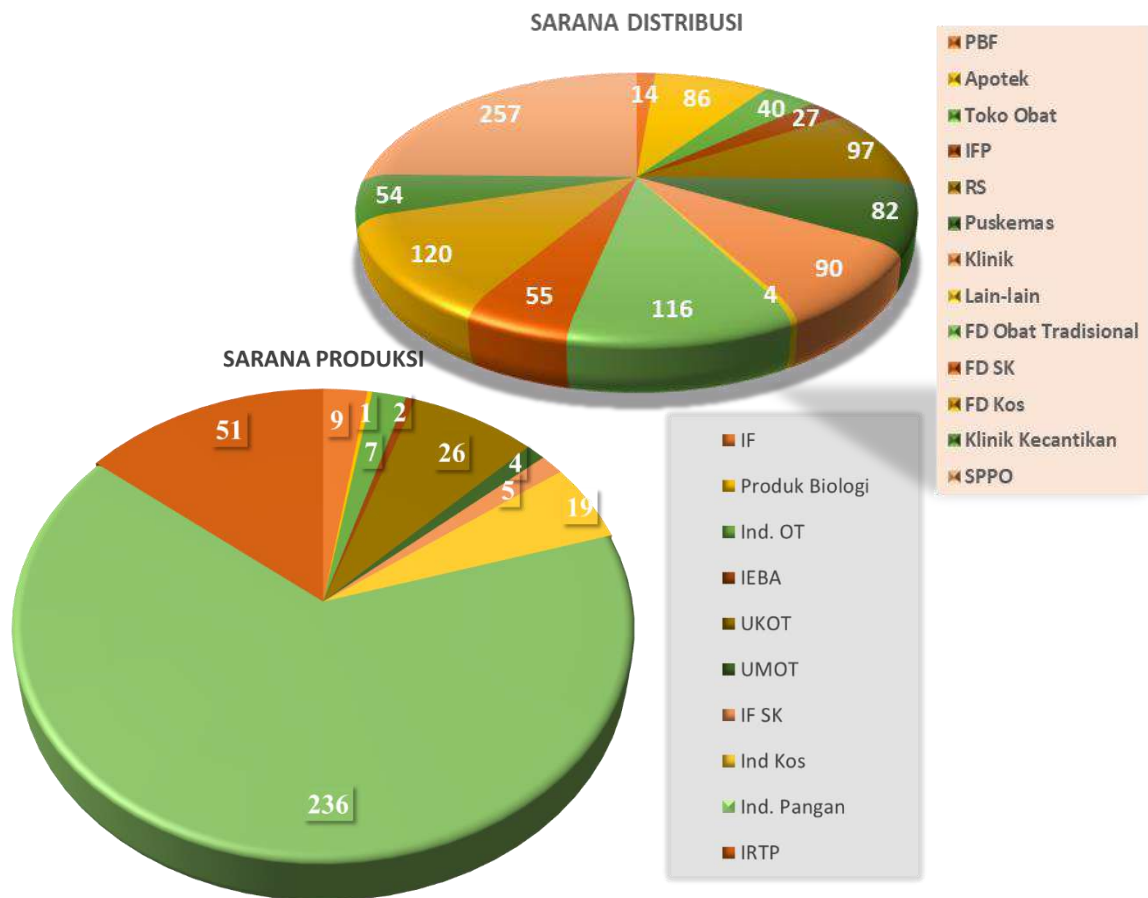
Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:



Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah



Gambar 4 Data Sarana Produksi dan Distribusi yang di Awasi Tahun 2023

1.4.3 Isu Strategis

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2023, beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki

Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan

perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BBPOM di Semarang tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Semarang perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Semarang juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi **IDEAS (Integrated Development and Training Information System)** yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2023 adalah 141 orang, diantaranya masih terdapat 18% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 207 orang.

2. Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat

dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam 7 region. Balai Besar POM di Semarang masuk ke dalam Region Semarang dengan Koordinator BBPOM di Semarang dan anggota terdiri dari Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

3. Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah

Menurut Kompas 2023 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah mencatat 2021-2022 ada 20 kabupaten/kota mengalami kenaikan angka stunting. Sebanyak 20 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka stunting-nya yaitu Brebes, Purbalingga, Grobogan, Temanggung, Kabumen, Karanganyar, Magelang, Rembang, Purworejo, Sragen, Blora, Pekalongan, Wonogiri, Kota Pekalongan, Pati, Semarang, Batang, Kudus, dan Kota Magelang.

Angka stunting saat ini mencapai 20,9 persen, atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil. Jawa Tengah menargetkan angka stunting (anak kerdil) menjadi 14 persen pada 2023. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemprov Jateng dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/ kelurahan.

BBPOM di Semarang berperan dalam pengawasan pangan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Program fortifikasi

pangan merupakan salah satu strategi pemerintah meningkatkan akses pangan bergizi, dan hingga saat ini pemerintah telah menetapkan tiga pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

Pengawasan pangan wajib fortifikasi tersebut melalui pre- dan post-market control. *Pre-market control* berfokus pada upaya pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di tingkat sarana produksi. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah fortifikan yang ditambahkan, serta penilaian pemenuhan persyaratan mutu pada saat registrasi izin edarnya. Sedangkan, post-market control dilakukan dengan melakukan sampling dan pengujian produk di peredaran.

Penurunan prevalensi stunting pada balita masih merupakan agenda utama Pemerintah RI, major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Penanganan permasalahan *stunting* bersifat multi-dimensional. Agar tepat sasaran, diperlukan upaya dan kontribusi lintas sektor yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas.

Sejalan dengan hal ini, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sesuai perpres ini, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif menangani penyebab tidak langsung stunting melalui antara lain peningkatan akses pangan bergizi.

4. Dukungan UMKM

Pendampingan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk UMKM Pangan Olahan sangat membantu dan mendukung untuk UMKM menaikkan grading yang lebih tinggi, dengan tujuan memperluas distribusi produk. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dilakukan secara konsisten oleh Pelaku usaha UMKM. Meningkatkan pemahaman terkait proses Izin Penerapan CPPOB, Label Pangan Olahan sesuai ketentuan dan pendampingan proses daftar produk, yang sering dikeluh kesahkan terutama Pelaku Usaha UMKM. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah

satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM pangan dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk. Pada tahun 2023 BBPOM Semarang melakukan pendampingan prioritas kepada 24 UMK Pangan Olahan, 5 UMK Obat Tradisional, dan 5 UMK Kosmetik dengan hasil berupa 11 UMKM terbit nomer jin edar, 9 UMKM sudah memenuhi komitmen CPPOB sampai terbit surat close capa dan rekomendasi PSB, 10 UMKM masih proses pemenuhan CAPA Audit PSB, 5 UMKM proses pengajuan permohonan audit PSB, 13 UMKM proses pendaftaran produk disistem ereg RBA, perbaikan data.

5. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Tantangan kejahatan obat dan makanan yang semakin kompleks sebagai implikasi adanya perdagangan bebas. BBPOM di Semarang bersama lintas sektor terkait harus melangkah lebih maju untuk merespons dan mengantisipasi modus kejahatan yang semakin berkembang, terutama dengan banyaknya pelanggaran di bidang obat dan makanan secara online yang juga mengalami kenaikan. "Penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang optimal tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karenanya, upaya kolaboratif dengan strategi pendekatan mutual adjustment antara BPOM dan criminal justice system (CJS) perlu diperkuat dalam mengantisipasi dan merespons perkembangan modus kejahatan obat dan makanan.

"Beberapa bentuk sinergi Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam hal ini Direskrimsus dan Diresnarkoba membantu POLRI dalam memberikan keterangan ahli, bantuan pemeriksaan laboratorium, pengawasan serta penertiban obat dan makanan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika”

6. Meningkatnya Peredaran Terkait Penjualan Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan Secara Online

Meskipun dasar hukum terkait peredaran obat dan makanan sudah diatur oleh pemerintah salah satunya melalui “UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan” dan “Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian” tetapi peredaran obat dan makanan secara online masih saja tumbuh dengan pesatnya, hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hasilnya sebanyak 43% dari keseluruhan usaha e-commerce merupakan kelompok makanan dan 5% Kosmetik dan Obat-Obatan.

Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. BBPOM di Semarang terus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal khususnya di wilayah Jawa Tengah dengan lebih dari 120 subsite, atau website, maupun marketplace yang telah di take down dalam 1 tahun berjalan.

BPOM sangat mendukung keberlangsungan usaha obat dan makanan di Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berimbang dengan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik melalui pendampingan/pembinaan maupun fasilitasi kemudahan berusaha. Di sisi lain, BPOM tidak segan bertindak tegas menegakkan hukum dan aturan terhadap pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi dan melakukan kejahatan obat dan makanan.

7. GERMAS SAPA di Provinsi Jawa Tengah

Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) merupakan aksi nasional berbasis komunitas melalui strategi intervensi dari sisi supply maupun demand yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.

Program GERMAS SAPA di Jawa Tengah ini merupakan Program yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan merupakan gabungan dari Gerakan Keamanan Pangan Desa/kelurahan, Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Masing-masing program memiliki segmen target komunitas yang spesifik, tetapi secara keseluruhan ketiganya bermuara pada terwujudnya peningkatan pola hidup sehat masyarakat Jawa Tengah dalam memproduksi, menyediakan dan mengonsumsi pangan yang aman.

Badan POM telah menginisiasi program ini sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sejak tahun 2017. Diharapkan dengan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat luas dapat menapis permasalahan klasik di bidang Keamanan Pangan seperti :

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terutama Industri Rumah Tangga Pangan tentang Aspek Higiene dan Sanitasi dalam proses produksi.
- b. Penggunaan Bahan Tambah Pangan melebihi batas
- c. Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan
- d. Masalah pencemaran lingkungan termasuk cemaran air

8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki

dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

9. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Melalui Sinergisme Pengawasan di Tingkat Pusat dan Daerah

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 terbit atas dasar maraknya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pada Inpres tersebut, Presiden RI memberikan instruksi kepada 12 K/L/D untuk bersinergi satu sama lain dan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dimana Badan POM sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengawasan.

Dilatarbelakangi Inpres 3 Tahun 2017, Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dengan mengangkat substansi di dalam Inpres 3 Tahun 2017 ke dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Menteri.

Terkait dengan pengawalan Inpres No. 3 tahun 2017, Badan POM perlu melakukan pengawalan implementasi dimana salah satunya adalah adanya penguatan peran pemerintah daerah. Sebagaimana amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana beberapa peran yang mendukung efektivitas pengawasan fungsi terletak di pemerintah daerah. Dalam upaya pengawalan fungsi tersebut, Badan POM telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BBPOM di Semarang telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BBPOM di Semarang Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Semarang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2020 – 2024.

Renstra BBPOM di Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020 – 2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka BBPOM di Semarang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Visi Misi dan Tujuan BBPOM di Semarang tidak ada perubahan karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Semarang sebagai berikut :



Gambar 5 Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Semarang

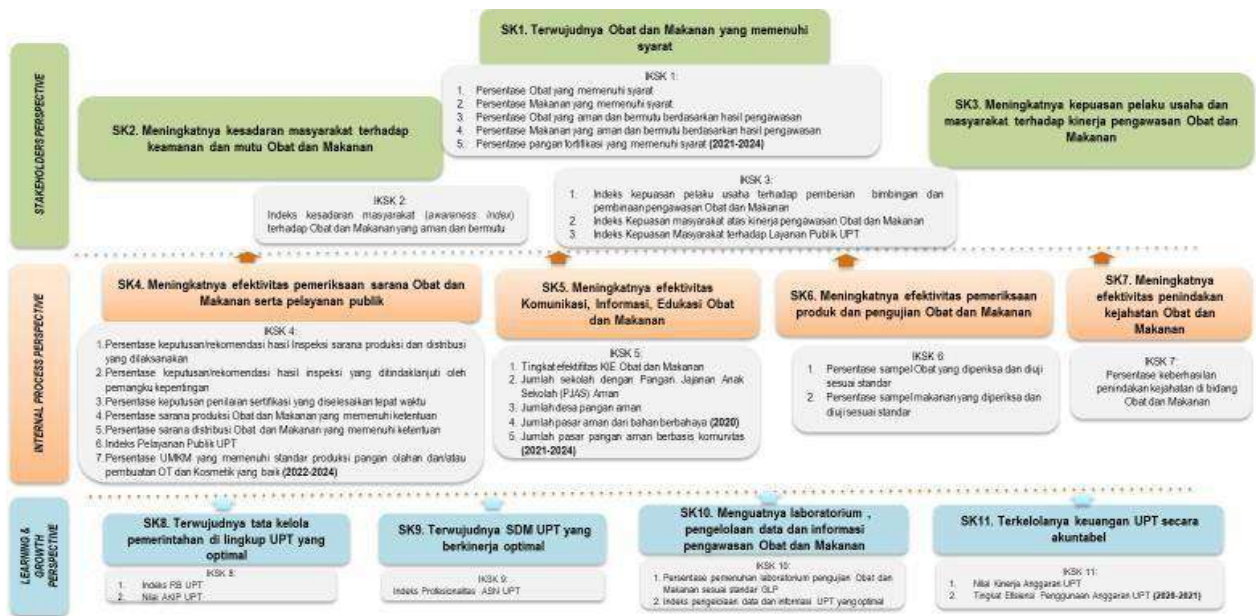
Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Semarang 2020 - 2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BBPOM di Semarang, sebagai berikut:

Tabel 3 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di Semarang 2020 - 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TUJUAN (2024)	KEBIJAKAN	STRATEGI				
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	84	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan				
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	1. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	85 95						
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95,5 153 46 27						
		2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal			91,18 88,84 3	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar Pengawas POM di Semarang berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, dan penggunaan TK dalam pengawasan Obat dan Makanan	
		2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan			1. Indeks kepuasan Pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	95 95,5	Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
				2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	89		
		3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat			1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95,5 92 91 83 91	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
				2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,9		
				3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik			1. Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100 85 62,5 79		
				4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan			1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 100		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TUJUAN (2024)	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.					
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	95,5	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Semarang	99,8 4,7		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Semarang yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Semarang 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang 3. Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,26 84,07 94,81		
		4. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Semarang secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang *) 3. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 5. Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	90,55 - 92,96 81 60		

Secara umum pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT BPOM. Berikut peta strategis BBPOM di Semarang Tahun 2020 – 2024:



Gambar 6 Peta Strategi BBPOM di Semarang

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Semarang mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Semarang tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 30 indikator menjadi 29 indikator.

Kinerja BBPOM di Semarang digambarkan dalam Peta Strategi Level 2 BBPOM di Semarang, dimana di Tahun 2023 terdapat perubahan target indikator. Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4 Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Semula					Realisasi 2022	Sasaran Program (Outcome)/	Target menjadi	
		2020	2021	2022	2023	2024			2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang		
	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,5	91	91,5	92,3	87,23	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	92,3
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	92,15	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,2	89,4	89,6	90	77,76	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6	90
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	77,5	79	81	83	78,66	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	83
	5. Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	94	95	96	97	83,09	5. Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	91

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Semula					Realisasi 2022	Sasaran Program (Outcome)/	Target menjadi	
		2020	2021	2022	2023	2024			2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang		
	1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	84	78,85	1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81	84
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang		
	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	87,1	88,2	89,3	90,4	94,5	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,3	90,4
	2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	70,73	72,16	73,58	75,01	75,08	2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58	75,01
	3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	88	90	91	92	93	94,18	3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang		
	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	100	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,6	78	80	83	85	87,66	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	85
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99	99,2	99,4	99,6	99,68	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4	99,6
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	53	55	60	54,96	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60
	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	70	71	72	73	71,52	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	73
	6 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Semarang	3,51	4,24	4,45	4,51	4,55	4,65	6 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Semarang	4,51	4,55
	7 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	-	77	79	81	86,67	7 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79	81
	8 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	98,85	8 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	95
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang		
	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	84,31	91,5	93	94	95	93,38	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94	95
	2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	41	79	119	161	87	2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119	161
	3 Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	28	3 Jumlah desa pangan aman	37	47
	4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5	10	16	22	28	16	4 Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	22	28
Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang			
1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	100	100	100	100	100	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	
2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100	100	2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang							Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang			
1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	72,5	75	78	80	91,5	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78	80	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Semula					Realisasi 2022	Sasaran Program (Outcome)/	Target menjadi	
		2020	2021	2022	2023	2024			2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Semarang yang optimal							Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Semarang yang optimal		
	1 Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	91	86	87	88	89	95,85	1 Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	88	89
	2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81	78,5	79,5	80,5	81,5	80,825	2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	80,5	81,5
	3 Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	94,81		-	94,81
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal							Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal		
	1 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	77	85,6	85,8	86	86,2	85,79	1 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	86	86,2
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan							Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan		
	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	79	84	89	94	86,6	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89	94
	2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	1,5	2	2,25	2,5	3	3	2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2,5	3
	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel							Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel		
	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94	92,9	93,5	94,7	95,9	90,71	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94,7	95,9
	2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-	-	2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	-	-
	3 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	94,77	3 Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	92,96
	4 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	96,68	4 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	-	81
	5 Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	5 Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

BBPOM di Semarang melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 pada tanggal 13 Juli 2022. Terdapat 1 indikator yang diajukan revisi berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No B-PR.04.01.21.211.07.22.226 Tentang Tanggapan atas Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024.

Bahwa pengawasan sampel pangan fortifikasi termasuk Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) serta mendukung *Major Project* "Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting" maka tidak disarankan untuk dilakukan penurunan target pada indikator kinerja kegiatan "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat", kecuali terdapat justifikasi yang kuat. Dalam surat tersebut, disampaikan justifikasi penurunan target antara lain:

- Banyaknya sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama kadar yodium pada garam dan kadar vitamin A pada minyak goreng sawit
- Pada tahun 2021 dari target indikator 94% hanya terealisasi 58,46 sehingga capaian sebesar 62,19% (kurang)
- Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2022 target sudah terealisasi 81,60% sehingga capaian pada Triwulan II adalah 85,89%. Sementara sampai dengan bulan Juni sampling fortifikasi sudah memenuhi target RO dan tersisi 11 sampel yang belum di uji sehingga diprediksi capaian akhir tahun tidak akan jauh berbeda dengan capaian Triwulan II.

3. Berdasarkan justifikasi yang disampaikan sebagaimana poin 2 (dua) serta mempertimbangkan urgensi poin 1 (satu), maka usulan penurunan "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" disetujui sebagai berikut:

Tabel 5 Target penurunan "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" disetujui

Semula		Menjadi	
2023	2024	2023	2024
96	97	90	91

4. BBPOM di Semarang perlu melakukan intervensi terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi agar pelaku usaha dapat memperbaiki mutu pangan fortifikasinya sehingga target "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" dapat tercapai.

5. Adapun tindak lanjutnya, perubahan target tersebut agar diacu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Semarang tahun 2023.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

BBPOM di Semarang melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan POM Tahun 2023 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan.

Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	84
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,3
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,4
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,51
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
		19	Jumlah desa pangan aman	37
		20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	21
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	88
		25	Nilai AKIP UPT	80,5
SK9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
SK10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
SK11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,7

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berdasarkan RKT dan PK Tahun 2023 disusun RAPK Tahun 2023 dengan menetapkan target yang akan dicapai pada setiap interim/ triwulan serta anggaran yang dialokasikan sebagaimana mestinya.

Target per interim dan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Semarang periode 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023






Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan												Anggaran Per Indikator
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	496.684.852
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	232.155.119
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	-	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	184.825.648
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	-	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	112.084.381
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	28.125.000
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00	111.600.000
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,30	574.380.000
	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,58	134.910.000
	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00	78.165.500

Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan												Anggaran Per Indikator
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	450.821.000
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	450.821.000
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	382.250.000
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	471.252.000
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	830.580.000
	15 Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00	25,00	33,33	44,17	55,83	69,17	78,33	83,33	88,33	90,83	96,67	79,00	127.727.000
	17 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	19.488.300.000
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4,00	10,00	14,00	19,00	30,00	45,00	55,00	60,00	75,00	85,00	90,00	119,00	961.026.000
	19 Jumlah desa pangan aman	4,00	10,00	14,00	24,00	33,00	42,00	50,00	64,00	69,00	80,00	92,00	37,00	1.089.691.000
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	4,00	10,00	15,50	29,00	48,50	58,00	70,00	71,50	77,50	86,50	90,00	21,00	307.621.000
	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,70	12,00	23,00	30,30	39,60	49,70	60,70	71,60	82,00	91,00	98,80	100,00	681.510.500
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,60	11,00	21,80	32,30	41,80	50,80	60,80	70,60	80,70	89,60	97,80	100,00	372.364.500
	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00	78,00	1.136.798.000
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	43.310.000
	25 Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	22.050.000
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkarya optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00	474.518.000
	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	3.779.412.000
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	78.702.000
	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	45,00	55,00	57,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	84,00	88,00	94,70	28.506.356.000
Jumlah Anggaran													61.686.206.000	

2.5 METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENCAPAIAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Perspective

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:






$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$




Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Tabel 9 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Baik Periodik dan Tahunan

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 10 Kriteria Ketercapaian terhadap Target akhir tahun dan Target Jangka Menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Semarang yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Semarang menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Semarang
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Selain dilakukan pengukuran indikator kinerja, juga dilakukan pengukuran efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 11 Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi dicapai dengan target untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK BBPOM di Semarang Tahun 2023. Hasil pengukuran capaian IKU selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK1, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK9, SK10 dalam kategori **Sangat Baik**;
- 2 (Dua) Sasaran Kegiatan, yaitu : SK2, dan SK11 dalam kategori **Cukup**; serta
- Capaian Sasaran Kegiatan *Stakeholder Perspective* 102,5%, *Internal Process Perspective* 109,24%, dan *Learning & Growth Perspective* 106,67%; yang ketiganya tercapai dalam kategori **Sangat Baik**; sehingga diperoleh:
- **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)** total tahun 2023 adalah sebesar **106,14%**, dengan kriteria **Istimewa**, secara rinci dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Semarang 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Semarang					
			Target	Realisasi	Per IK	Per SS		
PERPEKTIF STAKEHOLDER						102,50		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,36	104,21		103,86	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,54	108,97			
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	90,99	101,55			
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,05	100,06			
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	94,06	104,51			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,00	80,56	99,46		99,46	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	94,70	106,05		104,18	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,58	75,99	103,28			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	92,00	94,97	103,23			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Semarang					
			Target	Realisasi	Per IK	Per SS		
PERPEKTIF INTERNAL PROCESS						109,24		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53		108,19	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	84,74	102,10			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,77	100,37			
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,17	113,04			
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,71	109,32			
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,40	4,62	105,00			
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	120,00			
		PERPEKTIF LEARNING AND GROWTH						
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,60	100,64		101,00	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119,00	123,00	103,36			
		Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00			
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21,00	21,00	100,00			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00		120,00	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	84,06	107,76		107,76	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	88,00	95,26	108,25		104,16	
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	80,50	80,56	100,07			
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	86,00	91,17	106,01		106,01	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	88,39	99,31		120,00	
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,50	3,00	120,00			
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94,70	91,38	96,50		96,50	
NPSS Total						106,14		

Berdasarkan nilai NPSS, maka **Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023 adalah *akuntable*** dan berhasil mencapai sasaran dengan kriteria **Istimewa**.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat periode Renstra 2020-2024, Sasaran Kegiatan Renstra 2020-2024 sama dengan tahun sebelumnya tetapi terdapat revisi target pada saat penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023. BBPOM di Semarang mengajukan surat permohonan revisi penurunan target melalui surat no B-PR.04.01.13A.135A.07.22.1270 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024 dan telah ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan Keuangan No B- PR.04.01.21.211.07.22.226 tentang Tanggapan atas Permohonan Revisi Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2023-2024.

Dengan berdasarkan justifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terutama kadar yodium pada garam dan kadar vitamin A pada minyak goreng sawit
- b. Tahun 2021 dari target indikator 94% hanya terealisasi 58,46 sehingga capaian sebesar 62,19% (kurang)
- c. Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2022 target sudah terealisasi 83,09% sehingga capaian pada Triwulan III adalah 87,46%. Sementara sampai dengan bulan Juni sampling fortifikasi sudah memenuhi target RO.

Tetapi BBPOM di Semarang tetap perlu melakukan intervensi terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi agar pelaku usaha dapat memperbaiki mutu pangan fortifikasinya sehingga target "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" dapat tercapai.

Jika dilihat NPSS tahun 2023 (106,14) dibandingkan dengan NPS 2022 (103,86) terjadi peningkatan 2,28 poin. Ini diartikan bahwa pencapaian **Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 ke tahun 2023 adalah semakin *akuntable***.

3.1.2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM Klaster 1

Berdasarkan pembagian klaster, BBPOM di Semarang masuk dalam Klaster 1 yang terdiri dari: BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, dan BBPOM di Bandung. Pencapaian NPSS BBPOM Klaster 1 dapat

dilihat pada Gambar 7, dan nilai capaian kinerja selengkapnya untuk tiap indikator dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 7 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Semarang Dan BPOM Klaster 1 Tahun 2023

NPS Total untuk BBPOM Klaster 1 Tahun 2023, sebagaimana grafik di samping. BBPOM di Semarang berada pada urutan Kedua Setelah BBPOM di Bandung. Analisa, pembandingan, faktor keberhasilan, serta kendala dibahas secara rinci untuk tiap capaian indikator kinerja pada Bab ini di bagian 3.1.4.

3.1.3 Indikator Kinerja Utama BBPOM di Semarang

Profil capaian indikator kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebagian besar tercapai dengan kriteria Sangat Baik, sebagai berikut :

- 1 (satu) IK, yaitu : IK16: **4%** tercapai dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**
- 23 (dua puluh tiga) IK, yaitu : IK1, IK2, IK3, IK4, IK5, IK7, IK8, IK9, IK10, IK11, IK12, IK13, IK14, IK15, IK17, IK18, IK21, IK22, IK23, IK24, IK25, IK26, IK28, **79%** tercapai dengan kriteria **Sangat Baik**;
- 2 (dua) IK, yaitu IK19, IK20, , **7%** tercapai dengan kriteria **Baik**;
- 3 (tiga) IK, yaitu IK 6, IK 27, IK 29; **10%** tercapai dengan kriteria **Cukup**,

Hasil pengukurannya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 8 Profil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023



Gambar 9 Grafik Perbandingan Capaian IK Klaster I

Jika dibandingkan dengan balai seklastr, maka urutan BBPOM di Semarang di posisi pertama, untuk capaian IK dengan kriteria **Sangat Baik**. Ketiga, untuk IK dengan kriteria **Cukup**.

Analisa, **perbandingan**, faktor keberhasilan serta kendala tiap capaian indikator kinerja dibahas secara rinci pada Bab ini di bagian 3.1.4.

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS1

Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Tabel 13 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,36	104,21	Sangat Baik
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,54	108,97	Sangat Baik
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	90,99	101,55	Sangat Baik
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,05	100,06	Sangat Baik
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	94,06	104,51	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			103,86	Sangat Baik

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 1 **sebesar 103,86%** menggambarkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerjanya dengan kriteria **Sangat Baik**.

IK.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 14 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat (MS)

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,36	104,21	●

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat (MS) sebesar 95,36% jika dibanding dengan target 91,50 % , maka diperoleh capaian 104,21% dengan kategori **Sangat Baik**. Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional (OT), obat kuasi (OK), suplemen kesehatan (SK), dan kosmetik. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dari hasil pemeriksaan 1529 sampel yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, dengan hasil 1458 sampel MS (memenuhi syarat), 71 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 35 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 31 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel) serta tidak memiliki NIE 4 sampel.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 10 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK1

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2020, 2021 dan 2022, realisasi tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Realisasi indikator kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,13% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 yaitu dari 87,23% tahun 2022 menjadi 95,36% di tahun 2023. Tahun 2023, Balai Besar POM di Semarang mampu melampaui target 91,5% dengan capaian 104,21%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra**

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK1

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,50	95,36	99,85	▲

Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 **akan mencapai** target jangka menengah sebesar 95,5% yaitu sebesar 95,36% (capaian 99,85%). BBPOM di Semarang secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan capaian agar target Renstra pada tahun 2024 tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK1

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa dari 3 Balai Besar POM, 2 (dua) Balai Besar POM dengan realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dapat melampaui target nasional (93,5%), yaitu BBPOM di Bandung (97,36%) dan BBPOM di Semarang (95,36%). Sedangkan BBPOM di Surabaya belum mencapai target nasional dengan realisasi kinerja sebesar 92,54%.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang secara terus menerus dan konsisten berdampak pada sikap, pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha produksi dan

distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik. Konsistensi sikap dan pengetahuan yang baik dari pelaku usaha tersebut perlu terus dibangun, dipertahankan dan ditingkatkan agar penerapan aspek-aspek produksi/distribusi dapat terpelihara.

Namun demikian, masih terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat, baik dari hasil pengujian laboratorium dan/ penandaan. Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat adalah sampel obat tradisional dengan parameter uji kadar air. Sedangkan penyumbang terbanyak tidak memenuhi syarat penandaan adalah sampel obat yaitu pada point ketersediaan brosur, kelengkapan informasi dalam brosur tidak lengkap (tidak mencantumkan interaksi obat, cara kerja obat, interaksi dan indikasi obat, informasi kontraindikasi dan interaksi obat)

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk terus meningkatkan realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024, masih diperlukan upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja, antara lain :

1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.
2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB, penandaan yang sesuai dengan regulasi maupun cara distribusi yang baik.
3. Meningkatkan komunikasi / informasi dengan organisasi profesi atau Apoteker Penanggung jawab sarana produksi/distribusi melalui layanan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM Semarang terkait regulasi terbaru atau permasalahan yang menjadi isu yang perlu diketahui atau dibahas bersama.

- **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Tabel 16 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK1

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	500.225.363	499.996.131	99,95%	104,21	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023, yaitu sebesar 104,21%. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Obat yang memenuhi syarat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat antara lain dengan:

1. Melakukan intervensi ke sarana produksi dan distribusi obat/ obat tradisional/ kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan aspek-aspek cara produksi yang baik (CPOB/ CPOTB/ CPKB) dan cara distribusi yang baik sehingga produk yang berada di peredaran memenuhi standar keamanan dan mutu serta penandaannya.
2. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
3. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait dan telah dilakukan peninjauan kembali terkait label berdasarkan kategori minor (MK) dan mayor (TMK).
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan
6. Kelengkapan penunjang pemeriksaan sarana berupa thermometer terkalibrasi dan boks sampling yang sesuai kriteria

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 17 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan (mengimplementasi Cara Produksi / Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik)	Pengawasan sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko.	Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus dilakukan	mengefektifkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusinya	Semakin efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk penandaan	Terus menerus dilakukan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
2	Bimtek kepada pelaku usaha terkait label/penandaan pada produk.		Bimbingan langsung ke sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui pemeriksaan rutin maupun layanan konsultasi.	Terus menerus dilakukan	Pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penggunaan label dan penandaan yang sesuai dengan ketentuan masih belum optimal	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penggunaan label dan penandaan yang sesuai dengan ketentuan.
3	Meningkatkan koordinasi antara pemeriksaan dan pengujian dan balai Regional Semarang dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling sampai dengan bulan Desember, serta koordinasi antar laboratorium pengujian di Region Semarang	Closed	Closed	Perencanaan sampling dan pengujian oleh koordinator region	Koordinasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkelanjutan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
4	Mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan	Mengidentifikasi sarana dan prasarana pengujian yang dibutuhkan sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium			Belum terpenuhinya beberapa parameter pengujian	Meningkatnya kemampuan laboratorium
5	Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.	Melaksanakan pelatihan yang dibutuhkan sehingga meningkatkan kompetensi personel			Belum terpenuhinya beberapa kompetensi personel	Meningkatnya kompetensi personel

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan lakip interm 2023, dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan dan

pendampingan pelaku usaha produk obat/ obat tradisional, obat kuasi (OK), suplemen kesehatan (SK), dan kosmetik sehingga dapat menjamin produk yang diproduksi dan yang di peredaran memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

IK.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 18 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat (MS)

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,54	108,97	●

Realisasi indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 91,54% jika dibanding dengan target 84,00 %, sehingga diperoleh Nilai capaian **sebesar 108,97%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 12 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK2

tahun 2022 mengalami penurunan realisasi yaitu sebesar 0,61% dari

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) tahun 2020, 2021, realisasi tahun 2023 menunjukkan kenaikan terhadap tahun 2020 dan 2021, namun dibandingkan

92,15% menjadi 91,54% di tahun 2023. Capaian 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022, namun masih di atas target dengan capaian sebesar 108,97%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK2

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	91,54	99,50	▲

Realisasi Indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 akan mencapai target jangka menengah sebesar 92,00% yaitu sebesar 91,54% (capaian 99,5%). BBPOM di Semarang secara berkesinambungan terus berupaya untuk mencapai target Renstra tahun 2024

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK2

tertinggi adalah BBPOM di Semarang (91,54%) dan yang terendah

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 yang

adalah BBPOM di Bandung (88,17%), namun secara keseluruhan realisasi kinerja ketiga Balai Besar POM tersebut melampaui target nasional

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 telah mencapai target sebesar 108,97 % dengan kriteria "Sangat Baik".

Dari pemeriksaan 709 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, dengan hasil 649 sampel MS (memenuhi syarat), 60 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 39 sampel, tidak memenuhi syarat baik hasil uji maupun ketentuan penandaan 6 sampel, dan tidak memenuhi syarat ketentuan penandaan sebanyak 15 sampel.

Pada pengujian kimia tidak memenuhi syarat hasil uji antara lain:

1. Penggunaan pengawet dan rasio pengawet yang melebihi batas persyaratan pada produk selai, jeli, manisan dan puding.
2. Penggunaan pemanis dan ratio pemanis yang melebihi batas pada produk minuman serbuk, makanan ringan dan jeli.
3. Kadar enzim diastase dan HMF (Hidroksi metil furfural) pada produk madu yang tidak sesuai persyaratan.
4. Kadar sulfit pada produk gula dan kecap yang melebihi batas persyaratan

Sedangkan hasil pengujian TMS Mikrobiologi meliputi parameter uji angka Pseudomonas pada produk AMDK, angka Enterobacteriaceae pada produk sosis.

Selain berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sampel makanan acak yang disampling yang TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan dikarenakan karena informasi dalam label tidak lengkap seperti tidak mencantumkan no bets, tanggal kedaluwarsa, netto, komposisi, alamat sarana produksi, kemasan mencantumkan klaim, PIRT dengan izin edar lama, NIE yang tercetak tidak sesuai, desain gambar tidak sesuai.

Masih adanya sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan,

pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha pangan dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak, melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan acak adalah 690 sampel, dengan realisasi sampling adalah 709 sampel atau 102,75%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Semarang, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di DKI Jakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Serang, BPOM di Surakarta, Loka POM di Banyumas, BPOM di Tangerang, BPOM di Tasikmalaya, dan BPOM di Bogor. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik secara terus menerus antar anggota laboratorium regionalisasi.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 20 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK2

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	228.878.884	228.817.900	99,97%	108,97	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan

bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Sesuai tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran menjadi efisien.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan
6. Kelengkapan alat penunjang sampling berupa thermometer terkalibrasi dan boks sampling yg memenuhi kriteria

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 21 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan. Parameter tidak memenuhi syarat yang dominan pada sampel acak adalah TMK penandaan label terutama sampel pangan PIRT yang tidak mencantumkan nomor bets, sehingga pengawasan penandaan di sarana produksi perlu ditingkatkan.	Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri serta Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang natal dan tahun baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus	Pengetahuan dan kepatuhan sarana produksi pangan, baik terkait cara produksi pangan olahan termasuk aspek higiene dan sanitasi serta penandaan masih kurang	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan sarana produksi pangan, terkait aspek CPPOB dan Penandaanya, sehingga meningkatkan produk pangan yang beredar memenuhi syarat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
2	Peningkatan Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Desk CAPA Sarana Produksi Pangan tanggal 27 Juli 2023 secara luring.	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA dan desk CAPA	Terus menerus	Belum seluruhnya sarana produksi pangan memberikan feedback berupa tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil inspeksi secara memadai	Meningkatnya sarana produksi pangan dalam membuat feedback hasil pemeriksaan yang memadai sehingga produk pangan yang diproduksi memenuhi persyaratan / sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Peningkatan Bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada para pelaku usaha produk pangan.	Kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha produk pangan terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan	Bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai peraturan yang relevan pada cara produksi pangan olahan yang baik, baik secara luring maupun daring/ online.	Terus menerus	Pelaku usaha produk pangan belum memahami peraturan dan persyaratan terkini mengenai cara produksi pangan olahan yang baik	Pelaku usaha produk pangan mengerti peraturan dan persyaratan terkini dan menerapkan dalam kegiatannya sehingga produk pangan yang memenuhi syarat semakin meningkat di peredaran.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
			Memantau Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus	Capaian pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah perlu dipantau secara terus menerus dan jika perlu dilakukan intervensi.	Sudah terlaksana 24 kabupaten karena kabupaten brebes dan pati Tidak mendapat alokasi DAK. Dengan terlaksananya kegiatan DAK NF POM, peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pangan UMKM meningkat.
	Meningkatkan kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan terutama uji cemaran pada pangan (misal : MCPD dan akrilamid) dan menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian.	Bimbingan teknis/pelatihan parameter uji unggul sesuai konsep baru Regionalisasi laboratorium oleh P3OMN dan terpenuhinya jaminan mutu hasil pengujian	closed	closed	Belum semua terpenuhi	Meningkatnya kemampuan laboratorium dan terpenuhinya jaminan mutu hasil pengujian

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
		melalui program kalibrasi peralatan, keikutsertaan pada uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, pelaksanaan verifikasi metode analisa, penggunaan baku pembanding bersertifikat				

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan lakip interm 2023, dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin, pendampingan sarana produksi atau pelaku usaha produk makanan sehingga menjamin produk makanan yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk

IK.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 22 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	90,99	101,55	●

Realisasi indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 90,99% jika dibanding dengan target 89,60 % , maka diperoleh 101,55% dengan kategori **Sangat Baik** . Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dari hasil pemeriksaan 584 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, dengan hasil 531 sampel MS (memenuhi syarat), 53 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 17 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 34 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 2 sampel).

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 14 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK3

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, 2021 dan 2022, realisasi tahun 2023 menunjukkan kenaikan. Tahun 2023, BBPOM di Semarang mampu melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,99% dari target

89,6%, dengan capaian 101,55%. BBPOM di Semarang secara berkesinambungan berupaya untuk mempertahankan/mencapai target Renstra tahun 2024.

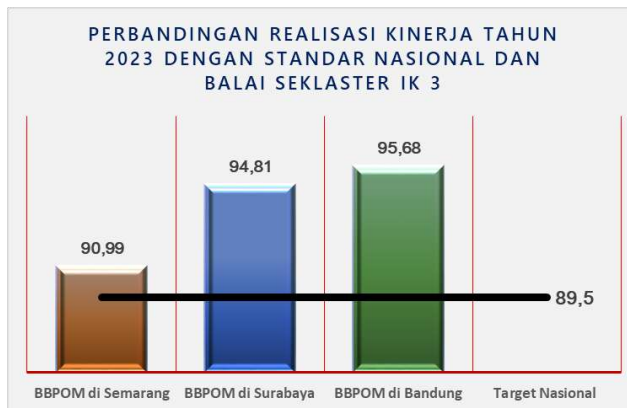
▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK3

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	90,99	99,99	▲

Realisasi Indikator kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 **akan mencapai** target jangka menengah sebesar 91,00% yaitu sebesar 90,99% (capaian 99,99%). BBPOM di Semarang secara berkesinambungan berupaya untuk mempertahankan/mencapai target Renstra tahun 2024

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK3

adalah BBPOM di Semarang. Namun jika dibandingkan dengan target nasional ketiga Balai Besar POM tersebut melampaui target.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung, di tempat kedua adalah BBPOM di Surabaya dan tempat terendah

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Rendahnya capaian BBPOM di Semarang dibandingkan dengan BBPOM di Bandung dan Surabaya dikarenakan masih ditemukannya sampel yang tidak memenuhi syarat, baik dari hasil pengujian laboratorium dan/ penandaan. Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat adalah sampel obat tradisional dengan parameter uji Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK). Sedangkan penyumbang terbanyak tidak memenuhi ketentuan penandaan adalah sampel kosmetik Dimana pada produk kemasan primer tidak mencantumkan informasi no. bets, netto, komposisi.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Peningkatan pengawasan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.
2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik
3. Komunikasi lebih intensif dengan organisasi profesi atau Apoteker Penanggung jawab sarana untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi
4. Pemanfaatan layanan Sinau Online Sareng (SOS) untuk informasi atau regulasi terbaru yang perlu diketahui pelaku usaha

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 24 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK3

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	186.143.137	186.057.836	99,95%	101,55	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan
5. Perlengkapan penunjang sampling berupa thermometer terkalibrasi dan boks sampling sesuai kriteria

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 25 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan	Pengawasan sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko.	Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/	Terus menerus dilakukan	mengefektifkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan	Semakin efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sehingga meningkatkan pengetahuan

(mengimplementasi Cara Produksi / Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik)			Ditilen Glikol (DEG) secara intensif		an, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/CPOTB/CPKB maupun cara distribusinya	n, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/CPOTB/CPKB maupun cara distribusi yang baik
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam pemenuhan Cara Produksi / Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan	Terus menerus dilakukan		

2	Bimtek kepada pelaku usaha terkait label/penandaan pada produk.		Bimbingan langsung ke sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui pemeriksaan rutin maupun layanan konsultasi.	Terus menerus dilakukan	Pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penggunaan label dan penandaan yang sesuai dengan ketentuan masih belum optimal	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam penggunaan label dan penandaan yang sesuai dengan ketentuan.
3	Melakukan pembinaan kepada sarana produksi terkait hasil uji yang TMS.		Pemeriksaan dan pembinaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pengujian produk	Terus menerus	Adanya gap terhadap pemenuhan aspek cara produksi obat/ obat tradisional/ suplemen Kesehatan/ kosmetik	Terpenuhinya aspek aspek cara produksi yang baik sehingga produk yang dihasilkan aman dan bermutu.

4	Mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan	Mengidentifikasi sarana dan prasarana pengujian yang dibutuhkan sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium	closed	closed	Belum terpenuhinya beberapa parameter pengujian	Meningkatnya kemampuan laboratorium
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

5	<p>Memelihara dan sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran menjadi efisien.</p>	<p>Mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan sehingga meningkatkan kompetensi personel</p>	closed	closed	<p>Belum terpenuhinya beberapa kompetensi personel</p>	<p>Meningkatnya kompetensi personel</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------

6	Meningkatkan koordinasi antara pemeriksaan dan pengujian Balai Regional Semarang dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling sampai dengan bulan Desember, serta koordinasi antar laboratorium penguji di Region Semarang	Closed	Closed	Perencanaan sampling dan pengujian oleh koordinator region	Koordinasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkelanjutan
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan lakip interm 2023, dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi serta pendampingan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

IK.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 26 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,05	100,06	

Realisasi indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 81,05% jika dibanding dengan target 81,00 % , maka diperoleh 100,06% dengan kategori **Sangat Baik**

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 16 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK4

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dan 2022, realisasi tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Namun dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi indikator kinerja tahun 2023 mengalami penurunan. Realisasi tahun 2023 masih di atas target 81%

yaitu 81,05%, naik sebesar 2,39% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 yaitu dari 78,66% tahun 2022 menjadi 81,05% di tahun 2023 (capaian 100,06%).

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

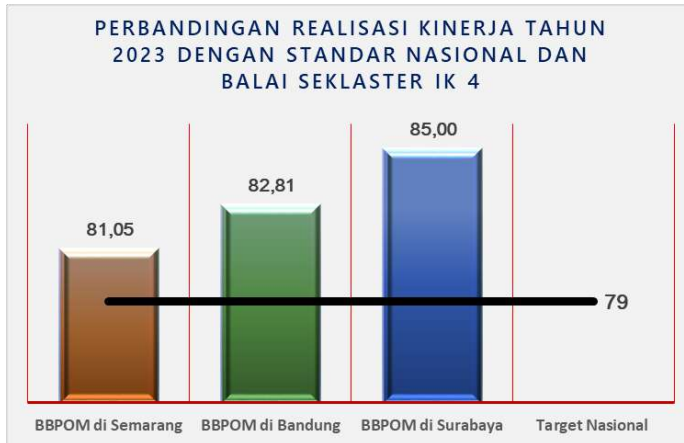
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK4

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	81,05	97,65	▲

Realisasi Indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 **akan mencapai** target jangka menengah sebesar 83% yaitu sebesar 81,05% (capaian 97,65%). BPOM di Semarang secara

berkesinambungan berupaya untuk mempertahankan/mencapai target Renstra tahun 2024.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK4

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya, di tempat kedua

adalah BBPOM di Bandung dan tempat terendah adalah BBPOM di Semarang. Namun jika dibandingkan dengan target target nasional ketiga Balai Besar POM tersebut melampaui target.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Sejumlah 239 sampel makanan targeted yang disampling terdapat 189 sampel yang memenuhi syarat dan 50 sampel tidak memenuhi syarat. Beberapa parameter uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) antara lain MPN E coli pada sampel PJAS, NaCl pada sampel TMS siklamat, E coli pada air baku coliform pada sampel AMIU.

Sesuai dengan konsep regionalisasi laboratorium yang baru, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Semarang, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di DKI Jakarta, BPOM di Bandung, BBPOM di

Serang, BPOM di Surakarta, Loka POM di Banyumas, BPOM di Tangerang, BPOM di Tasikmalaya, dan BPOM di Bogor. Demikian pula sebaliknya dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Semarang, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

Dari target 198 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 239 (104,50%) sampel yang disampling dan diuji, hal ini disebabkan adanya jumlah sampel penelusuran kasus boraks yang cukup banyak.

Masih adanya sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi terutama UMKM dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi (termasuk UMKM) agar melakukan produksi sesuai ketentuan CPPOB terutama terkait penggunaan BTP, serta pemenuhan aspek sanitasi dan higiene.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha secara terus menerus dan memantau konsistensi kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan pangan olahan yang baik
3. Bimbingan teknis intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang berkelanjutan di wilayah kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 28 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK4

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	110.502.616	110.473.173	99,97%	100,06	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan pengawasan dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan
6. Tersedianya perlengkapan pendukung sampling berupa thermometer terkalibrasi dan boks sampling yang memadai
7. Optimalisasi penggunaan anggaran DAK dalam mendorong UMKM pangan di daerahnya menerapkan CPPOB untuk produk PIRT

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal
Maupun Eksternal)**

Tabel 29 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan kegiatan KIE kepada penjamah pangan/pedagang PJAS di lingkungan sekolah.	Bimtek intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Magelang, Kota Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Temanggung, Kab. Kendal	Kolaborasi antara BPOM Semarang dan pihak sekolah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keamanan pangan di kalangan siswa dan masyarakat	Terus menerus	Penjamah pangan/pedagang PJAS di lingkungan sekolah belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan pangan yang baik di lingkungan sekolah, yang mencakup aspek-aspek seperti	komitmen penjamin pangan/pedagang PJAS dalam menerapkan standar keamanan pangan yang baik di lingkungan sekolah.
					pengelolaan limbah, kebersihan sanitasi, dan pengawasan kualitas makanan	

2	Meningkatkan Bimtek kepada pelaku usaha UMKM pangan untuk menerapkan CPPOB selama proses produksi secara konsisten.	Pendampingan terhadap 24 sarana UMKM Pangan di Jawa Tengah dalam Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan	Melakukan Bimbingan dan pendampingan sarana UMKM dalam penerapan CPPOB mulai dari tahap sosialisasi CPPOB, Pendampingan PSB, Pengujian produk, Desk Registrasi sampai keluar Izin edar dari Badan POM	Desember 2023 dan dilanjutkan tahun 2024	kemudahan pelaku usaha UMKM dalam pengurusan ijin CPPOB dan ijin edar BPOM.	Dengan penerapan CPPOB yang konsisten dari pelaku usaha produk pangan dapat meningkatkan produk pangan yang aman dan bermutu dan memiliki izin edar BPOM.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Meningkatkan kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan terutama uji cemaran pada pangan (misal : MCPD dan akrilamid) dan menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian.	Bimbingan teknis/pelatihan parameter uji unggul sesuai konsep baru Regionalisasi laboratorium oleh P3OMN dan terpenuhinya jaminan mutu hasil pengujian melalui program kalibrasi peralatan, keikutsertaan pada uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, pelaksanaan verifikasi metode analisa, penggunaan baku pembanding bersertifikat	closed	closed	Belum semua terpenuhi	Meningkatnya kemampuan laboratorium dan terpenuhinya jaminan mutu hasil pengujian
4	Pembinaan kepada sarana produksi pangan terkait hasil uji yang TMS.		Pemeriksaan dan pembinaan sarana dalam rangka tindaklanjut hasil pemeriksaan pangan yang tidak memenuhi ketentuan	Terus menerus	Adanya gap terhadap pemenuhan aspek aspek cara produksi pangan olahan yang baik	Terpenuhinya aspek aspek cara produksi pangan olahan yang baik, sehingga produk pangan yang dihasilkan aman dan bermutu.


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022 bahwa dalam mencapai presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh informasi hambatan antara lain Kegiatan KIE kepada penjamah pangan/pedagang PJAS belum optimal karena pedagang berpindah-pindah tempat/keliling, sehingga pada tahun 2023 dilakukan bimtek intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengkolaborasi antara BPOM Semarang dan pihak sekolah (sebagai kader keamanan pangan sekolah) dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keamanan pangan di kalangan siswa dan masyarakat. Salah satu tujuannya agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program pengawasan pangan jajanan yang dikonsumsi anak usia sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

IK.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 30 Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (MS)

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	94,06	104,51	

Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) sebesar 94,06% jika dibanding dengan target 90,00 % , maka diperoleh 104,51% dengan kategori **Sangat Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 18 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK5

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) tahun 2021 dan 2022, realisasi tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Realisasi indikator kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,97% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 yaitu dari 83,09% tahun 2022 menjadi 94,06% di tahun 2023.

Tahun 2023, BBPOM di Semarang mampu mencapai target dengan capaian 104,51%.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK5

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	91,00	94,06	103,36	▲

Realisasi Indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 **melampaui** target jangka menengah sebesar 91,00% yaitu sebesar 94,06% (capaian 103,36%). BBPOM di Semarang secara berkesinambungan berupaya untuk mempertahankan/ mencapai target Renstra tahun 2024.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK5

Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa dari 3 Balai Besar POM, 2 (dua) Balai Besar POM dengan realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 melampaui target nasional (90,00%), yaitu BBPOM di Bandung (97,60%) dan BBPOM di Semarang (94,06%). Sedangkan BBPOM di Surabaya belum mencapai target nasional dengan realisasi kinerja sebesar 83,00%.

Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa dari 3 Balai Besar POM, 2 (dua) Balai Besar POM dengan realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 melampaui target nasional (90,00%), yaitu BBPOM di Bandung

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :** Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Sejumlah 101 sampel pangan fortifikasi yang disampling terdapat 95 sampel yang memenuhi syarat dan 6 sampel tidak memenuhi syarat. Parameter uji yang Tidak Memenuhi Syarat yaitu kadar KIO_3 sebanyak 5 sampel dan kadar vitamin A sebanyak 1 sampel. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang secara terus menerus dan konsisten berdampak pada sikap, pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha produksi dalam mengimplementasikan aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). Konsistensi sikap dan pengetahuan yang baik dari pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit perlu terus dibangun, dipertahankan dan ditingkatkan agar produk yang dihasilkan terjamin mutunya.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
 1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi melalui pemeriksaan rutin implementasi aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)
 2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
 3. Advokasi dengan Pemda/lintas sektor terkait di Jawa Tengah yang memiliki sentra produksi garam seperti Kabupaten Pati, Rembang, Kebumen untuk pembinaan produsen garam memenuhi standar SNI dan ketentuan produk MD.
 4. Bimtek kepada pelaku usaha pangan fortifikasi khususnya garam konsumsi agar konsisten memenuhi kualitas sebagai produk fortifikasi, ketentuan pelabelan dll dan perlu dilakukan desk jemput bola untuk sarana produksi sebelum habis masa izin edarnya.
 5. Perlunya koordinasi lebih intensif dengan aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Kepolisian dalam rangka memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan.

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 32 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK5

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	28.125.000	27.958.750	99,41%	104,51	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, antara lain :**
 1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko.
 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan. Koordinasi dengan tim pengawasan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) Provinsi Jawa Tengah dan secara berkala melakukan pengawasan ke UMKM garam konsumsi di Pati
 3. Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit
 4. Pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 33 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan kepada sarana produksi pangan terkait hasil uji yang TMS.		Pengawasan, pemeriksaan sekaligus pembinaan langsung ke sarana produksi pangan fortifikasi, seperti sarana produksi garam, sarana produksi minyak goreng yang tidak memenuhi ketentuan, baik secara mandiri atau bersama dengan Badan POM Pusat.	Terus menerus	<ol style="list-style-type: none"> Proses pengolahan pangan tidak sesuai dengan kaidah CPPOB Produk pangan fortifikasi yang diproduksi tidak memenuhi persyaratan 	Sarana produksi pangan melakukan perbaikan dalam proses pembuatan produk pangan fortifikasi mengikuti aspek CPPOB sehingga produk pangan fortifikasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan.

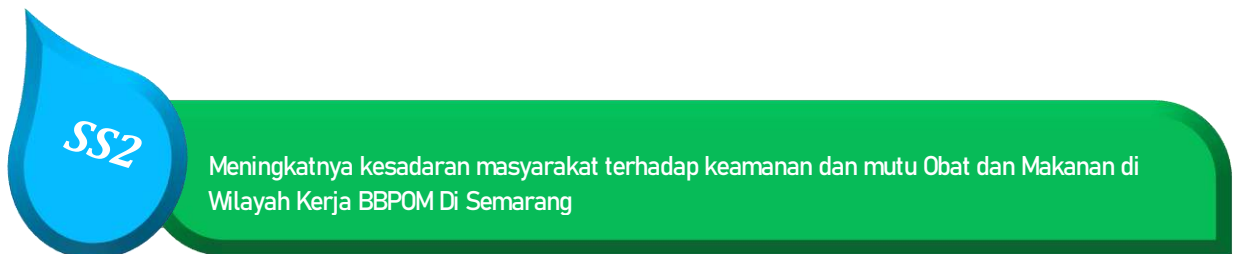
2	Meningkatkan frekuensi dan cakupan pelaksanaan bimtek kepada pelaku usaha industri minyak goreng sawit dan garam serta audiensi ke pemerintah daerah/stakeholder terkait usaha industri pangan fortifikasi.		1. Pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas	Terus menerus	inkonsistensi pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). dan kesadaran pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan	Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan semakin meningkat

			<p>Kesehatan , dll</p> <p>2. Sosialisasi tentang Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit kepada UMKM minyak goreng sawit, penambahan Iodium pada garam konsumsi.</p> <p>3. Kegiatan sampling, pengujian kadar Iodium dan pembinaan langsung di tempat produksi garam fortifikasi</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022 dan interim triwulanan tahun 2023, dimana masih sering ditemukan sampel fortifikasi yang TMS

terutama TMS kadar yodium pada garam konsumsi serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit maka diperlukan upaya yang lebih untuk menurunkan sampel fortifikasi yang TMS tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan kegiatan sampling, pengujian kadar iodium dan pembinaan langsung di tempat produksi garam fortifikasi dengan melibatkan dari tim inspeksi, pengujian dan infokom. Diharapkan program pembinaan langsung di tempat tersebut dapat meningkatkan realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



Tabel 34 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 2


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81,00	80,56	99,46	Cukup
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			99,46	Cukup

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 99,46% dengan kriteria **Cukup**. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan media sosial, belum beragamnya alat peraga atau promosi yang dibuat agar materi promosi atau penyebaran informasi makin mudah dipahami dan belum memadainya frekwensi pameran maupun KIE langsung pada masyarakat di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

IK.6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 35 Realisasi Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81,00	80,56	99,46	

Pada tahun 2023 hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diperoleh capaian nilai Indeks Kesadaran Masyarakat sebesar 99,46% dengan kriteria cukup.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 20 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK6

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat penurunan realisasi indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023, dengan capaian 99,46 dalam kategori capaian cukup. Upaya BBPOM di Semarang untuk memberdayakan masyarakat meliputi

berbagai kelompok seperti PKK, pramuka dan masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK6

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	84,00	80,56	95,90	▲

Realisasi kinerja indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 akan mencapai target renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya peningkatan kinerja agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK6

realisasinya diatas target Nasional 2023 (83), nilai indeks kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih dibawah target nasional 2023, ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang harus terus berupaya melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman.

Bila dibandingkan nilai Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar seklaster, BBPOM di Semarang memperoleh realisasi Indeks Kinerja yang terendah dibandingkan dengan Balai Besar yang lainnya. Hanya BBPOM Di Bandung dan BBPOM Di Surabaya yang

- **Analisis penyebab kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan :**

Analisis penyebab dari belum tercapainya kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat dengan kriteria baik, antara lain karena :

 1. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, twitter, tiktok, website) BBPOM di Semarang , media cetak, media elektronik yaitu radio-TV, sms blast dan media online lainnya dalam mempromosikan dan menyebarkan informasi tentang Obat dan makanan yang aman.
 2. Belum beragamnya alat peraga atau promosi yang dibuat agar materi promosi atau penyebaran informasi makin mudah dipahami,
 3. Belum memadainya frekwensi pameran maupun KIE langsung pada masyarakat di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
 - a. Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah dengan :
 - b. Makin mengoptimalkan media sosial yang dimiliki dengan membuat konten yang mampu meningkatkan engagement follower sehingga lebih banyak follower terpapar materi atau konten edukasi yang diberikan.
 - c. Memperbanyak pembuatan video edukasi dengan menggunakan bahasa daerah atau dengan melibatkan millennial atau influencer sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses edukasi yang diberikan.
 - d. Meningkatkan frekuensi pameran dan KIE sehingga masyarakat makin terinformasi tentang Obat dan Makanan yang aman.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk menyempurnakan kinerja agar dapat mampu mencapai target yang ditetapkan, BBPOM di Semarang melakukan program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut, antara lain :

 1. Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui pemanfaatan media sosial yang lebih maksimal (instagram, facebook, tik tok, dll), media cetak, media elektronik yaitu radio-TV, sms blast dan media online lainnya dengan sasaran generasi millennial yang banyak menggunakan media sosial
 2. Melakukan Edukasi / Pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif melalui peningkatan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi tentang keamanan obat dan makanan.
 - a. Antara lain dengan melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat

- (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan *influencer* yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat .
- b. Memperkuat kemitraan dan mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi agen untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll. Serta memperluas cakupan pemberdayaan di kabupaten yang belum atau jarang terpapar KIE tentang Obat dan Makanan yang aman.
 3. Meningkatkan kapasitas kader Keamanan Pangan dengan menambah pengetahuan para kader tentang Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan suplemen Kesehatan yang aman, sehingga para kader dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau komunitasnya tentang obat dan makanan yang aman
 4. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
 - a. Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat Jawa Tengah baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 1. Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target *audience* seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
 2. Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE serta anggaran yang ada.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 37 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK6

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	111.600.000	111.600.000	100,00%	99,46	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indeks kesadaran masyarakat BBPOM di Semarang masih lebih rendah dibandingkan target Balai maupun target nasional. Dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 38 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK6

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Memaksimalkan keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)	Renovasi sarana dan prasarana kantin sekolah dengan melibatkan CSR	Closed	Closed	Kantin sekolah minim sarana dan prasarana	Kantin sekolah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang keamanan pangan

2	Penyelenggaraan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi ngGugah UMkm REsik sakinG bahan berbAHaya (GUMREGAH).	Bimtek Kader Keamanan Pangan kepada TP PKK berasal dari 6 Kecamatan di Kota Semarang	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Pedagang mi & Bakso menggunakan bahan baku mie yang mengandung formalin / boraks	Pedagang mi & Bakso telah beralih menggunakan bahan baku yang aman dari formalin dan boraks
3	Terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pramuka, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka	Forum komunikasi dengan pelanggan	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Komunikasi terbatas	Komunikasi lebih mendekatkan kepada pelanggan

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2023, maka perlu dilakukan :

Optimalisasi media sosial yang dimiliki, peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk edukasi tentang Obat dan makanan yang aman serta peningkatan intensitas dan menyusun strategi dalam melakukan KIE kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hasil survey indeks kesadaran msyarakat. Dengan perencanaan strategi KIE yang tepat dan makin luasnya edukasi tentang Obat dan makanan yang dilakukan, harapannya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga kesadaran Masyarakat juga akan semakin baik.



Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Tabel 39 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	94,70	106,05	Sangat Baik
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	75,99	103,28	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	94,97	103,23	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			104,18	Sangat Baik

IK.7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 40 Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	94,70	106,05	

Indeks kepuasan pelaku usaha diukur melalui tingkat kepuasan terhadap kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan regulasi. Jenis kegiatan bimbingan dan pembinaan dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

1. pendampingan, merupakan layanan yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara intensif dalam serangkaian aktivitas tatap muka langsung atau online dan/atau kunjungan lapangan, individual, serta berdampak

- langsung terhadap proses perizinan/sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha
2. desk,
merupakan layanan terhadap pelaku usaha secara intensif, individual, tatap muka secara langsung atau online, dan berdampak langsung terhadap proses perizinan/sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha
 3. bimbingan teknis,
merupakan layanan yang dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha dalam jumlah tertentu atau kelompok dengan materi bimbingan umumnya bersifat teknis untuk membantu mengatasi masalah yang sama
 4. sosialisasi.
merupakan layanan yang dilakukan kepada pelaku usaha secara luas dengan peserta relatif banyak, biasanya mengenai isu terbaru, dan keikutsertaannya lebih bersifat sukarela.

Pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen, distributor, importir, eksportir, pelayanan (apotek, RS, dll), lainnya (ritel, stockiest, depot, dll). Pengukuran kepuasan usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yang terdiri dari 5 aspek, yaitu Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4 dalam bentuk simbol bintang. Survei dilakukan secara online (surveiprkom.pom.go.id) saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Periode survei adalah antara 2 Januari - 30 November 2023.

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan terhadap target 2023 adalah sebesar 106,05% dengan kriteria Sangat Baik.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 22 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK7

Pada gambar di bawah ini dapat dilihat jika dari capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jika dibanding tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK7

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,00	94,70	99,68	▲

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada tahun 2023 akan mencapai target jangka menengah. Akan tetapi BBPOM di Semarang tetap terus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan sehingga indeks kepuasan pelaku usaha terus mengalami kenaikan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK7

Dari gambar terlihat bahwa jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka BBPOM di Semarang menduduki urutan ketiga setelah BBPOM di Bandung dan BBPOM di Surabaya. Tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Pelayanan bimbingan dan pembinaan secara online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara online.

Kenaikan realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dari tahun 2022 (94,5%) menjadi 94,7% pada tahun 2023 didukung oleh faktor pengembangan aplikasi survei indeks kepuasan pelaku usaha dari PRKOM yang sudah cukup mumpuni sehingga lebih mobile friendly untuk mencegah kesalahan pengisian survey. Selain itu banyaknya

kegiatan bimbingan yang dilakukan secara luring lebih diminati oleh pelaku usaha dan narasumber karena lebih interaktif dan materi KBP dapat diterima dengan lebih baik.

Tabel 42 Rincian Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BBPOM Semarang Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	16	94,36
2	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	5	97,08
3	Desk / Desk/Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	2	97,69
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
4	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2023-01-02 s.d 2023-03-31	4	98,01
5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Izin Penerapan CPPOB Series 1	Daring	2023-02-16 s.d 2023-02-16	29	89,85

6	Pendampingan / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 15 Maret 2023	Hybrid	2023-03-15 s.d 2023-03-15	17	94,61
7	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang, 16 Maret 2023	Luring	2023-03-16 s.d 2023-03-16	3	96,83
8	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW II	Luring	2023-04-03 s.d 2023-06-30	14	93,96
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
9	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Tips & Trik Pengisian Penilaian Mandiri CPPOB	Daring	2023-05-04 s.d 2023-05-04	9	95,8
10	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	6	99,15

11	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi Penerapan Aspek CPKB dan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	2	95,14
12	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	6	98,5
13	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW II	Luring dan Daring	2023-04-01 s.d 2023-06-30	3	97,94
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
14	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Update Regulasi Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Luring dan Daring	2023-06-21 s.d 2023-06-21	50	93,75

15	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2023-06-14 s.d 2023-06-14	31	94,94
16	Desk / Desk CAPA hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan	Luring	2023-07-27 s.d 2023-07-27	16	98,66
17	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang : Bimbingan Teknis Update Regulasi Notifikasi Kosmetik dan Penyusunan DIP	Luring dan Daring	2023-07-04 s.d 2023-07-04	24	91,44
18	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Kab. Kebumen	Luring	2023-08-03 s.d 2023-08-03	35	88,53
19	Desk / Desk CAPA hasil pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Luring	2023-08-29 s.d 2023-08-29	17	93,35
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
20	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Kab. Pati	Luring	2023-08-23 s.d 2023-08-23	23	89,5

21	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Kab. Pekalongan	Luring	2023-09-13 s.d 2023-09-13	30	92,18
22	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TW III	Luring	2023-07-01 s.d 2023-09-30	4	97,06
23	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW III	Luring	2023-07-01 s.d 2023-09-30	1	100
24	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW III	Luring	2023-07-01 s.d 2023-09-30	20	96,53
25	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW III	Luring	2023-07-01 s.d 2023-09-30	2	100
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
26	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang 2	Luring	2023-10-19 s.d 2023-10-20	35	90,77

27	Sosialisasi / Awareness dan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan Kewaspadaan Obat Ilegal/ Penyalahgunaan Obat	Luring	2023-10-19 s.d 2023-10-20	48	90,54
28	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2023-11-15 s.d 2023-11-15	18	89,06
29	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang : Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Topik Khusus)	Hybrid	2023-11-23 s.d 2023-11-23	142	93,53
30	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA IP CPPOB/PSB dan Registrasi Produk	Luring	2023-10-01 s.d 2023-11-30	10	89,42
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
	Pangan Olahan dan BTP -TW IV				
31	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB - TW IV	Luring	2023-10-01 s.d 2023-11-30	4	99,29

32	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi Penerapan Aspek CPKB dan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik - TW IV	Luring	2023-10-01 s.d 2023-11-30	3	89,17
33	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW IV	Luring	2023-10-01 s.d 2023-11-30	8	97,56
34	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW IV	Luring	2023-10-01 s.d 2023-11-30	2	95
TOTAL				639	94,68

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Menindaklanjuti saran dari responden yang relevan dengan peningkatan kualitas kegiatan bimbingan dan pembinaan
2. Melakukan perencanaan target kegiatan dan jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring pelaksanaan KBP.
3. Melaksanakan kegiatan secara luring diutamakan kegiatan berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/sertifikasi pelaku usaha

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 43 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK7

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	497.298.000	497.046.402	99,95%	106,05	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan .

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan adalah:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan secara luring dengan metode yang lebih interaktif dan menghadirkan narasumber dari BBPOM di Semarang, Lintas sektor terkait (Dinkes, DPMPTSP, Perindag, dll) dan Akademis/Praktisi sehingga pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dialami secara langsung dan narasumber dalam memberikan alternatif solusi secara langsung.
2. Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM Semarang yang mengangkat tema beragam menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha merupakan salah satu kegiatan BBPOM di Semarang yang banyak diminati oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha mendapatkan update dan refreshment terhadap regulasi yang perkembangnya dinamis.
3. Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi Produk memberikan dampak langsung terhadap percepatan penyelesaian proses sertifikasi maupun registrasi yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha

sehingga layanan ini mendapat apresiasi yang baik dan meningkatkan kepuasan pelaku usaha.

4. Hasil evaluasi diatas akan ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2024

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tabel 44 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menindaklanjuti saran dari responden yang relevan dengan peningkatan kualitas kegiatan bimbingan dan pembinaan	Dilaksanakan bimtek "The Series" untuk tema/materi yang bersifat teknis dan mendetail	Closed	Closed	pelaku usaha tidak memahami alur pengajuan perijinan BPOM	pelaku usaha memiliki pemahaman terkait syarat-syarat perijinan BPOM dan prosesnya
2	Melakukan perencanaan target kegiatan dan jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring pelaksanaan KBP.	Dilaksanakan bimtek "The Series" untuk tema/materi yang bersifat teknis dan mendetail	Closed	Closed	pelaku usaha tidak memahami alur pengajuan perijinan BPOM	pelaku usaha memiliki pemahaman terkait syarat-syarat perijinan BPOM dan prosesnya
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai*	Belum**			

					Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
3	Melaksanakan kegiatan secara luring diutamakan kegiatan berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/sertifikasi pelaku usaha	meningkatkan kegiatan yang bersifat Desk/Pendaftaran Penda mpingan CAPA sehingga mempercepat proses perijinan	Closed	Closed	pelaku usaha mengeluhkan lamanya proses perizinan di BPOM	Mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas terhadap penyelenggaraan KBP sehingga akan memperkaya hasil survei IKEPU. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2024.

IK.8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan


Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam

menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 45 Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	75,99	103,28	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan terhadap target 2023 adalah sebesar 103,28% dengan kriteria Sangat Baik.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Pada grafik terlihat bahwa realisasi 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Harapannya kedepannya akan terjadi peningkatan mengikuti target yang telah ditetapkan.

Gambar 24 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK8

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK8

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,90	75,99	98,82	▲

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah realisasi 2023 (75,99) belum mencapai target jangka menengah (76,90). Maka di tahun 2024 masih perlu usaha keras agar target jangka menengah dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK8

Dari gambar di bawah ini, jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka BBPOM di Semarang menduduki urutan ketiga setelah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung. Dan dari ketiga balai yang belum

mencapai target nasional hanya Semarang.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Yang telah dilakukan BBPOM Semarang agar Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai inovasi dalam mempermudah layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.
2. Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 yang melampaui target dapat dilihat dari peningkatan minat responden terhadap informasi yang diberikan dengan metode penyuluhan. Metode tatap muka langsung melalui penyuluhan adalah yang paling diminati responden sehingga mampu meningkatkan pemahaman
3. Peningkatan kualitas berita dan informasi yang disampaikan di medsos mudah dipahami dan menarik untuk masyarakat
4. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
5. Dukungan Anggaran DAK yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota memberikan dampak positif pada kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan obat
6. Pada triwulan III telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Internal Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dan BBPOM di Semarang memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 4,62 dengan kategori Pelayanan Prima.
7. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan/atau konsistensi dari pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB, penandaan yang sesuai dengan regulasi maupun cara distribusi yang baik.
8. Proses investigasi baik melalui daring maupun luring lebih mendalam sehingga informasi mengenai karakteristik dari pelaku tindak pidana obat dan makanan dapat lebih akurat

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.

2. Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.
3. Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 47 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK8

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	49.807.000	49.692.100	99,77%	103,28	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Sarana Prasarana di Pelayanan public terpenuhi
2. Pelaksanaan KIE tatap muka langsung melalui penyuluhan
3. Peningkatan kualitas berita dan informasi yang disampaikan di medsos mudah dipahami dan menarik untuk masyarakat
4. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
5. Dukungan Anggaran DAK yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota memberikan dampak positif pada kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan obat
6. Pendampingan secara konsisten ke pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB, penandaan yang sesuai dengan regulasi maupun cara distribusi yang baik.

7. Investigasi baik melalui daring maupun luring lebih mendalam sehingga informasi mengenai karakteristik dari pelaku tindak pidana obat dan makanan dapat lebih akurat

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 48 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang langkah langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh BPOM.	Pelaksanaan KIE dan Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui pemanfaatan media sosial yang lebih maksimal (instagram, facebook, tik tok, dll), media cetak, media elektronik yaitu radio-TV, sms blast dan media online lainnya dengan	Closed	Closed	Pemahaman masyarakat masih kurang	Mulai meningkat pemahaman masyarakat

		sasaran generasi millennial yang banyak menggunakan media sosial				
2	Program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi ngGugah UMkm REsik sakinG bahan berbAHaya (GUMREGAH).	pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen yang masih menggunakan bahan berbahaya	Closed	Closed	Sebelum rencana aksi dilakukan, belum diketahui apakah bahan baku yang digunakan oleh pedagang pangan siap saji yang berbahan baku mie adalah mie yang aman, bebas dari formalin/boraks	Setelah dilakukan program gumregah, dari 6 kecamatan yang diintervensi di Kota Semarang, berhasil disampling dan diuji mie dari 178 pedagang pangan siap saji. Setelah diuji, sejumlah 19 positif Formalin dan 5 sampel positif Formalin dan boraks Setelah dilakukan pembinaan yang pertama, telah turun jumlah pedagang yang menggunakan bahan baku mie mengandung Formalin,

						yaitu turun menjadi 14 , selanjutnya akan dilakukan pembinaan kedua.
3	Pelayanan Pengaduan secara Komprehensif.	Pelayanan Pengaduan sudah Komprehensi.	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Pelayanan Pengaduan sudah Komprehensi.	Pelayanan Pengaduan sudah Komprehensi.
4	Peningkatan profesionalisme dalam kegiatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan untuk semakin lebih baik lagi.	Pelatihan dark Web dan penggalan gan, serta bimtek siber (Penangan an BB Elektronik	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Pengetahuan tentang pengawasan OM secara online masih kurang	Pengetahuan tentang pengawasan OM secara online bertambah
5	Alur informasi siber dan intelijen bisa mengalir dengan lebih baik dan tepat sasaran, sehingga pimpinan mampu membuat keputusan dengan lebih tepat.	Dukungan dari direktorat siber, personel sebagian sudah dilatih melakukan siber patrol dg efektif, kerja sama dg lintas sektor terkait data2 kependuduk an	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Alur informasi siber dan intelijen belum sepenuhnya mengalir dengan lebih baik dan tepat sasaran, sehingga pimpinan mampu membuat keputusan dengan lebih tepat.	Alur informasi siber dan intelijen sudah mengalir dengan lebih baik dan tepat sasaran, sehingga pimpinan mampu membuat keputusan dengan lebih tepat.

6	Memonitor dan memberikan umpan balik atas masukan pelanggan sampel pihak ketiga dari inovasi layanan publik KLIK PATAS yang telah dimanfaatkan	Memonitor dan memberikan umpan balik atas masukan pelanggan sampel pihak ketiga	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Pelayanan pengujian sampel pihak ketiga belum optimal, karena pelanggan harus menghubungi petugas untuk mengetahui progress sampel yang diujikan	Pelayanan pengujian sampel pihak ketiga lebih optimal, efektif dan efisien dengan adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap usulan, saran dan masukan dari pelanggan
7	Lebih intensif dalam melakukan pendampingan UMKM yang memproduksi pangan resiko tinggi dalam mendapatkan ijin edar MD, sehingga lebih banyak lagi yang terfasilitasi mendapatkan ijin edar MD.	Melakukan Gap Assessment ke sarana dan mendampingi dalam proses pembuatan panduan mutu serta upload dokumen ke website BPOM	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi sarana produksi tidak sesuai prinsip CPPOB/CPOTB/CPKB - pelaku usaha tidak memahami dokumen/panduan mutu yang harus dimiliki - pelaku usaha kesulitan mengajukan permohonan sertifikasi melalui website BPOM 	<ul style="list-style-type: none"> - Layout sarana produksi sesuai prinsip CPPOB/CPOTB/CPKB - pelaku usaha mampu menyusun dokumen/panduan mutu untuk produksi - pelaku usaha mampu secara mandiri mengajukan permohonan sertifikasi

8	Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya keagamaan dan Intensifikasi pengawasan kosmetika Tanpa Ijin Edar dilaksanakan bersama-sama dengan lintas sektor terkait.	Telah terlaksana saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru fokus terhadap temuan produk pangan olahan, apakah itu TIE, ED atau rusak			pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat sekitar masih kurang terkait pangan aman dari bahan berbahaya	Menambah pemahaman pelaku usaha terkait dan masyarakat sekitar terkait pangan aman dari bahan berbahaya
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan kegiatan KIE yang lebih intens dan lebih menarik baik melalui tatap muka dan media sosial.

IK.9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 49 Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	94,97	103,23	

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang untuk tahun 2023 adalah 92,00.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Semarang di tahun 2023 untuk 10 (sepuluh) jenis layanan yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut

Tabel 50 Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Jenis Layanan	Responden
1	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	28
2	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	4
3	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A	1
4	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B	1
5	Pengujian Obat dan Makanan	11
6	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	146
7	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	4
8	Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	1
9	Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	26
10	Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	8
	Total	230

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang (berdasarkan hasil SKM) tahun 2023 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah 94,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang (berdasarkan hasil SKM) tahun 2023

Unsur Pelayanan		Tahun 2023
U1	Persyaratan	94,14
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94,54

U3	Waktu Penyelesaian	94,47
U4	Biaya/Tarif	95,78
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	93,91
U6	Kompetensi Pelaksana	95,85
U7	Perilaku Pelaksana	96,27
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95,37
U9	Sarana dan Prasarana	94,12
	Total	94,97

- Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APiP yang dikelola bersama antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang diperoleh BBPOM di Semarang adalah 94,97 menunjukkan realisasi telah melampaui target tahun 2023 dengan capaian 103,23%, dengan kriteria sangat baik.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**




Gambar 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK9

Peningkatan realisasi dan capaian indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari grafik di atas. Setiap tahunnya target mengalami peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Walaupun secara persentase capaian di tahun 2023 (103,23%) lebih

rendah dibandingkan persentase capaian pada tahun 2022 (103,49)%, namun petugas layanan public BBPOM di Semarang tetap konsisten untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Hal ini terbukti dari penilaian yang diberikan pelanggan melalui survey menunjukkan apresiasi yang baik dari seluruh pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK9

No	Indikator Kinerja	Jangka Menengah	Realisasi	Jangka Menengah	Notifikasi
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,50	94,97	99,45	

Berdasarkan data pada tabel, realisasi tahun 2023 akan mencapai target jangka menengah yang tercantum dalam Dokumen Renstra awal BBPOM di Semarang. Dengan persentase capaian jangka menengah sebesar 99,45.

Perubahan metode survei yang disesuaikan dengan jenis layanan yang tertuang pada Standar Pelayanan Publik, menyebabkan harus ada responden yang mewakili setiap jenis layanan. BBPOM di Semarang merupakan unit pelayanan publik yang memiliki bisnis proses yang hampir lengkap sesuai dengan kebutuhan layanan dan kompetensi petugas layanan yang dimiliki.

Adanya perbedaan persepsi responden untuk setiap jenis layanan pada umumnya berkaitan dengan permasalahan pemenuhan persyaratan dan kendala dalam penggunaan aplikasi saat proses pendaftaran produk. Penyelesaian permasalahan ini tidak hanya menuntut peranan dari BBPOM di Semarang, namun juga peran serta dari unit kerja BPOM lainnya dan Instansi Lintas sektor terkait. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai upaya mencari strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ataupun kendala yang dihadapi pelanggan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK9

Berdasarkan data pada grafik perbandingan realisasi kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di tingkat UPT Tahun 2023, BBPOM di Semarang memperoleh realisasi tertinggi dan di tempat kedua adalah BBPOM di Bandung sedangkan BBPOM di Surabaya menempati urutan

ketiga. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan target (standar Nasional) Badan POM, ketiga UPT seklaster tersebut termasuk BBPOM di Semarang melampaui target.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Semarang perlu mengadakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan BBPOM di Semarang. Sesuai dengan pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 pengukuran penilaian ditujukan terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang antara lain:

- a. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap Standar Pelayanan Publik BBPOM di Semarang yang memuat unsur-unsur pelayanan publik. Penyusunan Standar Pelayanan dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
- b. Memfasilitasi dan melengkapi pemenuhan standar pelayanan untuk semua kepentingan dan hak-hak pelanggan/ masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk pelanggan kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, serta korban bencana sosial dan korban bencana alam. Revisi Standar

Pelayanan Publik ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

- c. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik terutama untuk kelompok rentan sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 19 aspek yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keseluruhan 19 sarana prasarana tersebut terbagi atas 12 Aspek Pemenuhan dan 7 Aspek Pendukung. Adapun Aspek Pemenuhan meliputi Area parkir khusus, jalur pemandu/guiding block bertekstur dan berwarna kuning, jalur landai dan pegangan rambat, kursi roda/tongkat/kruk dan kursi tunggu prioritas; toilet khusus; loket khusus area bermain anak; ruang laktasi/menyusui, dan alat bantu tunanetra dan tunarungu. Ketujuh Aspek Pendukung Sarpras ramah kelompok rentan terdiri dari ketersediaan petugas pemandu disabilitas/lansia ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat, lift khusus/ eskalator kelompok rentan disertai huruf Braille; pintu masuk yang mudah diakses, selasar yang menghubungkan semua ruang, sistem informasi yang disediakan khusus bagi kelompok rentan, inovasi pelayanan inklusif yang dikembangkan serta standar pelayanan yang mengakomodir kelompok rentan. Seluruh fasilitas baik aspek pemenuhan dan aspek pendukung tersebut telah dipenuhi oleh BBPOM di Semarang. Salah satu komponen aspek pemenuhan alat bantu tuna rungu berupa media informasi yang memuat bahasa isyarat sedang dalam proses pembuatan. BBPOM di Semarang memperoleh peringkat kedua sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bersifat inklusif, berkeadilan, non-diskriminatif dan setara dari 10 Unit Pelayanan Publik yang memiliki nilai terbaik berdasarkan rekapitulasi hasil pengisian self assessment.
- d. Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut dengan menitikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai inovasi dalam mempermudah layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.
- f. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme

petugas merupakan salah satu kompetensi utama. Sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan secara rutin maupun berjenjang. Karena seorang petugas pelayanan publik harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menangani keluhan pelanggan.

- g. Memanfaatkan fasilitator mahasiswa magang yang terlatih untuk mendampingi pelaku usaha yang mengalami kendala menggunakan aplikasi layanan publik. Kolaborasi eksternal ini dipandang perlu dalam mengatasi kendala SDM.
- h. Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- i. Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- j. Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.
- k. Meningkatkan kompetensi, memberikan reward dan punishment kepada petugas layanan sebagai bentuk apresiasi dan stimulan untuk senantiasa memberikan yang terbaik.
- l. Memberikan alternatif solusi dan pendampingan kepada pelanggan apabila mengalami kendala dalam menerima pelayanan dari BBPOM di Semarang.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk meningkatkan pelayanan publik. Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM di Semarang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pemberi maupun penerima layanan.

Rekomendasi Perbaikan kinerja :

- a. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penyamaan persepsi petugas layanan informasi dan petugas layanan sertifikasi terkait prosedur perizinan obat dan makanan serta penerbitan rekomendasi SKI/SKE
- b. Menambah jadwal dan lokasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di beberapa daerah. Penjadwalan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing MPP ataupun dengan penetapan tanggal pelaksanaan yang rutin setiap bulannya.

- c. Sebelum mengisi survei, petugas hendaknya memberi informasi terlebih dahulu kepada responden bahwa pengisian survei hanya terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai termasuk sarana pendukungnya.
- d. Pelatihan bahasa isyarat bagi seluruh petugas pelayanan publik dan penyediaan media informasi yang memuat video dengan bahasa isyarat.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 53 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK9

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	47.883.500	47.806.145	99,84%	103,23	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BBPOM di Semarang pada tahun 2023. Namun tetap perlu dilakukan revaluasi efisiensi penggunaan anggaran agar lebih efektif seperti mengoptimalkan pelaksanaan inovasi maupun sinergi penyelenggaraan beberapa inovasi layanan publik. Yang tidak kalah penting adalah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan publik.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sepanjang tahun 2023 BBPOM di Semarang melaksanakan tidak ada importir/eksportir baru, sehingga tidak ada kegiatan audit sarana importir/eksportir dalam rangka penerbitan sertifikat SKI/SKE.

- a. BBPOM di Semarang juga secara konsisten melaksanakan kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya antara lain pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu MELON MANIS (MELalui Online Memberikan InformaSi); Selama penyelenggaraan pelayanan di tahun 2023, pelaksanaan MELON MANIS hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali dengan total 39

- peserta. Pelanggan MELON MANIS tidak terbatas dari Wilayah Provinsi Jawa Tengah, ada yang dari Denpasar, Bali; dari Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, DKI Jakarta, dan dari Bandung, Jawa Barat.
- b. Inovasi lainnya adalah LAKONE SEKTI (Layanan Konsultasi Efektif Sertifikasi Registrasi Obat dan Makanan upaya mendekatkan kepada Masyarakat/ pelanggan, sudah dibuka gerai pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, Purworejo, Boyolali dan Kudus dan Kota Semarang. Tahun 2023 juga dilakukan uji coba kegiatan Lakone Sekti di MPP Kabupaten Pati. Untuk tahun depan akan dibuka pelayanan di MPP Kota Tegal dan MPP Kabupaten Wonosobo.
 - c. Layanan CEKATAN (Pengecekan Laboratorium Untuk Masyarakat dan Sekolah). Layanan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau perbaikan yang sudah dilakukan.
 - d. Klik PATAS Terdapat perbaikan Penilaian terhadap Aplikasi KLIK PATAS, Informasi dan fitur yang tersedia, Saat ini pelanggan sudah bisa mendownload langsung hasil uji sampelnya, tidak perlu mengambil hardcopy ke kantor BBPOM di Semarang.
 - e. Pada tahun 2023 dilaksanakan Inovasi baru Inovasi GUMREGAH (NgGUGah UMK Resik Saking Bahan Berbahaya), awalnya bernama PANGGUL SEKZI dengan tahapannya pelaksanaan Gumregah (Advokasi, Sampling dan Uji, BimTek, Monitoring).

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar.	BimTek dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2023,	Diseminasi internal Prosedur Perizinan Obat dan Makanan dan Penerbitan SKI/SKE kolaborasi kegiatan Sertifikasi dan InfoKom	Awal tahun 2024	Kompetensi petugas belum merata	Kompetensi petugas dalam hal teknis sudah merata

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline
		Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan, BimTek Tata Cara Notifikasi Kosmetik, Diseminasi Persiapan Integrasi Sistem ASROT dengan OSS RBA, Pelatihan PKP Berbasis Kompetensi; BimTek CPOTB Aspek HS				
2	Menambah jadwal dan lokasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik di beberapa daerah.	Jadwal rutin yang sudah dilaksanakan setiap bulannya untuk MPP Kudus dan MPP Boyolali, Kebumen dan Purworejo. setiap bulannya MPP Pati sudah dilakukan uji coba pelaksanaan kegiatan Lakone Sekti	Penambahan Lokasi kegiatan Lakone Sekti di MPP Wonosobo dan MPP Tegal	Dimulai awal tahun 2024	Konsumen kesulitan untuk berkonsultasi langsung karena terkendala jarak dan waktu	Konsumen lebih mudah dan dekat untuk melakukan konsultasi tatap muka

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	Sebelum mengisi survei, responden diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survei terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari badan POM, dan juga diberi informasi tentang jenis pelayanan yang diterima (Pelayanan Pengujian/Pelayanan SKI-SKE/Pelayanan Informasi dan Pengaduan). Hal ini untuk mengurangi adanya perbedaan persepsi dari responden terhadap isian survei.	Responden selalu diberikan informasi sebelum mengisi survei	Closed	Closed	Banyak Responden yang persepsinya keliru saat mengisi survei	Responden tidak keliru dalam memberikan penilaian dalam pengisian survei
4	Perbaiki sarana dan prasarana di ruang layanan dengan menyediakan informasi dalam bentuk huruf braille bagi penyandang disabilitas.	Di ruang Layanan sudah tersedia informasi dalam huruf Braille.	Closed	Closed	Sarpras Pelayanan Publik bagi Kelompok rentan belum lengkap	Sarpras Pelayanan Publik bagi Kelompok rentan sudah dilengkapi

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

BBPOM di Semarang telah melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian BBPOM di Semarang tetap harus konsisten berupaya lebih keras serta bekerja cerdas dan tuntas untuk memberikan service excellence kepada masyarakat. Perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh unsur pelayanan tetap diupayakan terutama pada unsur pelayanan yang memperoleh persepsi penilaian terendah. Perlunya

sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll yang dikemas secara menarik melalui media sosial maupun media lainnya. Disamping itu pelaksanaan pemberian layanan konsultasi dan pendampingan hingga layanan jemput bola (LAKONE SEKTI) agar lebih dioptimalkan. Berdasarkan hasil survei juga terlihat bahwa pemerataan maupun peningkatan kompetensi serta perilaku petugas pemberi layanan tetap memerlukan perhatian khusus. Penuntasan tindak lanjut pengaduan masyarakat juga akan ditingkatkan. Saat ini sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform. Hal ini demi memberikan ruang kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan.

CAPAIAN INTERNAL PERSPECTIVE

SS4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Tabel 55 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	84,74	102,09	Sangat Baik
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,77	100,37	Sangat Baik
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,17	113,04	Sangat Baik
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,71	109,32	Sangat Baik
Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,62	102,44	Sangat Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			108,77	Sangat Baik

IK.10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 56 Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Semarang telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 48 keputusan/rekomendasi dari 48 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 107,53 % dan mendapat kriteria **Sangat Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 28 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK10

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020. Tahun 2022 terdapat realisasi sama seperti tahun 2021 namun capaian lebih rendah dari tahun 2021 karena target meningkat

di tahun 2022. Pada tahun 2023 realisasi masih sama dengan tahun 2022 meskipun terjadi penurunan capaian dibanding tahun 2022, namun target tetap tercapai.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK10

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	▲

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 **telah mencapai**

target Renstra tahun 2024, namun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK10

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 oleh BBPOM di Semarang sama dengan BBPOM Bandung, yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Ketiga balai yang diperbandingkan telah

mencapai target nasional.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pada tahun 2023, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %, karena 7 (tujuh) semua surat tindak lanjut telah dilaksanakan. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %, karena 14 (empat belas) semua surat tindak lanjut telah dilaksanakan.. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT juga memperoleh hasil 100,0 % karena 27 (dua puluh tujuh) surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monev secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan, dan segera melaksanakan yang belum ditindaklanjuti sehingga target tercapai.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 58 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK10

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	498.363.000	497.986.142	99,92%	107,53	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 adalah:

- a. Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 685 sarana, penelusuran kasus terhadap 23 sarana dan dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 13 kasus, yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Surabaya.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 59 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		

1	Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.	Setiap bulan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta kendala yang terjadi.	Closed	Closed	Keputusan / rekomendasi tidak selalu dilaksanakan / tidak sesuai jadwal (ada kegiatan lain yang mendadak)	Dengan menetapkan prioritas maka semua keputusan/rekomendasi dapat dilaksanakan
2	Meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan.	Komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan lintas sektor dan/atau UPT/pusa/UPT lain	Closed	Closed	Mengirimkan keputusan/rekomendasi secara formal	Setelah Keputusan / rekomendasi dikirimkan, ditindaklanjuti dengan komunikasi melalui Whatsapp


▪ **Infirmasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan melakukan monitoring pelaksanaan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dengan melakukan komunikasi yang lebih inten.dengan pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

IK.11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 60 Realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	84,74	102,09	

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan / Pencabutan Ijin. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

- 1) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan
- 2) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Semarang telah menerbitkan keputusan/rekomendasi sebanyak 332 keputusan/rekomendasi dan yang telah dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 102,09 % dan mendapat kriteria **Sangat Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 30 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK 11

Pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, dari tahun 2020. Tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi maupun capaian dari tahun 2021 meskipun target meningkat di tahun 2022. Pada tahun 2023 realisasi dan capaian mengalami penurunan target dan capaian

tahun 2022, namun demikian target tetap tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK11

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00	84,74	99,69	▲

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, yang dilaksanakan tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun kriteria nya masih baik, sehingga diperlukan upaya yang lebih lagi realisasi dapat tercapai pada tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK11

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tahun 2023 oleh BBPOM di Semarang lebih rendah dari BBPOM Bandung dan BBPOM di Surabaya, namun ketiga balai yang

diperbandingkan telah mencapai target nasional.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Meningkatnya pengetahuan/pemahaman pelaku usaha menindaklanjuti hasil inspeksi, sebagai dampak atas pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha

2. Monitoring / pemantauan yang lebih intensif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti pemangku kepentingan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Pendampingan / konsultasi khususnya bagi UMKM dalam penyusunan tindakan perbaikan dan Tindakan pencegahan atas temuan / hasil inspeksi
2. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor ditingkatkan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi melalui Whatsapp grup maupun pribadi dengan pemangku kepentingan

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 62 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK11

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	498.363.000	497.986.142	99,92%	102,09	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator **lebih tinggi** daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Bimbingan teknis dan pendampingan khususnya bagi pelaku usaha UMKM berdampak meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha
2. Monitoring terhadap penyampaian surat tindaklanjut kepada palaku usaha mendorong pelaku usaha segera menyelesaikan

pembuatan Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA)

3. Koordinasi dan komunikasi sangat membantu dalam pelaksanaan tindak lanjut baik oleh pemangku kepentingan.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 63 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut hasil inspeksi. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait baik secara formal maupun informal.	Penggunaan aplikasi Srikandi dan whatsapp	Closed	Closed	Koordinasi dan komunikasi berjalan dengan lancar	Terjalin kerja sama yang baik karena koordinasi dan komunikasi berjalan dengan lancar
2	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi peraturan terkini, dan pendampingan penyusunan CAPA.	Pemanfaatan jaringan komunikasi melalui Whatsapp grup maupun pribadi	Closed	Closed	Pelaku usaha tidak segera membuat CAPA	Jumlah CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha meningkat


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan melakukan monitoring pelaksanaan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi serta melakukan komunikasi yang lebih intens pemangku kepentingan sehingga target renstra tahun 2024 akan bisa lebih cepat tercapai.

IK.12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 64 Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,77	100,37	

Keputusan penilaian sertifikasi meliputi Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, hasil pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk, surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran, hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik, dan Pangan Olahan, surat rekomendasi hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK, dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Pada tahun 2023, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,77% dan jika dibandingkan dengan target (99,40%), maka capaian adalah 100,37% sehingga termasuk dalam kriteria Sangat Baik (kategori Efektif). Jika dibandingkan dengan target (99,4%), maka realisasi tahun ini telah melampaui target. Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha

mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 32 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK12

Pada tahun 2023, jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 5210 layanan menunjukkan capaian sebesar 100,37% (kriteria Sangat Baik). Jika dilihat dari gambar disamping dibandingkan dengan tahun 2022, 2021, dan 2020, terjadi penurunan capaian kinerja, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan target kinerja

dan terkait SLA e-bpom, beberapa kali terjadi kendala di Pusat Data Nasional yang menyebabkan layanan e-bpom sama sekali tidak bisa diakses oleh pelaku usaha maupun oleh evaluator pada bulan Mei, Juni, dan Desember 2023.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

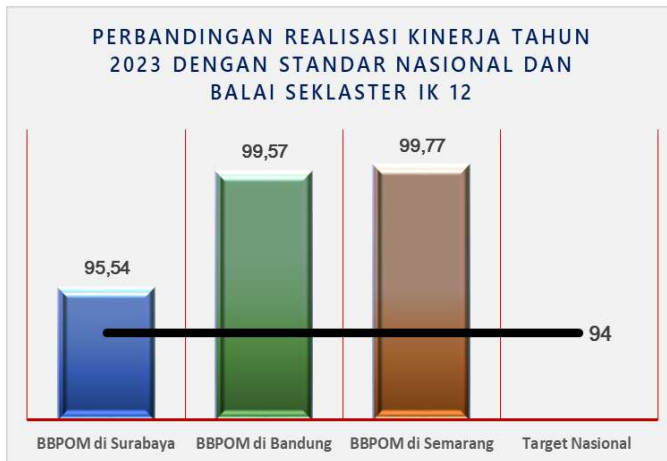
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK12

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,80	99,77	99,97	▲

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat jika pada tahun 2023, jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 5210 layanan menunjukkan realisasi sebesar 99,77% (kriteria Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi dari

BBPOM Semarang akan tercapai dengan upaya cukup keras untuk menyelesaikan seluruhnya berkas SLA tepat pada waktunya.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK12

Jika dilihat dari gambar dibawah, maka dapat disimpulkan bahwa capaian BBPOM di Semarang untuk persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan balai seklaster. Dan jika dibandingkan dengan target jangka

menengah nasional, capaian kinerja BBPOM di Semarang tahun 2023 sudah melebihi target

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Jika dilihat dari masing-masing kegiatan yang mempengaruhi keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu, maka bisa dilihat bahwa pemenuhan SLA SKI SKE yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

1. Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan dan pengembalian proses evaluasi SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id.
2. Penerbitan SKI yang tidak tepat waktu karena permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sistem e-bpom, yaitu nomor SKI tidak terbit sehingga harus direkomendasi ulang dan menyebabkan waktu penyelesaian menjadi 10 jam (SLA < 6 jam)

- b. Terdapat pengajuan SKI yang revisi berulang dan waktu evaluasi merupakan akumulasi
 - c. Kendala sinyal ketika petugas dinas (untuk role evaluator, penindaklanjut, dan perekom)
3. Seringnya kejadian gangguan pada jaringan server Pusat Data Nasional sehingga berimbas pada sistem e-bpom.go.id dan pelaksanaan proses evaluasi SKI/SKE

Terkait dengan kendala diatas, BBPOM di Semarang berusaha melakukan perbaikan berkesinambungan dengan cara :

- a. terus berkomunikasi dengan Pusdatin dan kedeputian melalui WAG
- b. memberikan informasi kepada pelaku usaha ekspor/impor baik melalui WA Layanan Sertifikasi, email, atau WAG Pelanggan e-bpom

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah

- 1. Peningkatan *soft competency* petugas sesuai regulasi terbaru
- 2. Melakukan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP untuk menyajikan layanan yang berkualitas
- 4. Melakukan koordinasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meminimalisir keluhan pelanggan

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 66 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK12

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	417.285.000	417.099.769	99,96%	100,37	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi

daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu .

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Melakukan regulatory assistance untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (Corrective Action Preventive Action) serta pelayanan konsultasi online maupun offline dalam rangka sertifikasi CDOB
2. Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
4. Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
5. Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 67 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan <i>soft competency</i> petugas sesuai regulasi terbaru	Melakukan pelatihan kepada petugas	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	belum semua petugas mendapatkan pelatihan Food Inspector dasar	semua petugas sudah mendapatkan pelatihan Food Inspector
2	Melakukan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha	Melakukan bimtek dengan menggandeng Dinas terkait	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	produk UMKM kurang dikenal di masyarakat	terlaksananya bimtek dengan melibatkan lintas sektor/dinas terkait sehingga produk-produk UMKM bisa dikenalkan dan mendapatkan fasilitas promosi melalui pameran-pameran dll
3	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP untuk menyajikan layanan yang berkualitas	Monitoring terhadap masing-masing role per 1 jam	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA

		Penjadwalan petugas untuk dinas mempertimbangkan ntuk setiap role ada yang standby di kantor			timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA
		Konfirmasi di WAG jika ada proses di e-bpom (Evaluasi, Tindak Lanjut, Rekomendasi dan Penolakan)			timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA
		Menyampaikan informasi pelayanan lebih mendetail kepelanggan			timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA
4	melakukan koordinasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meminimalisir keluhan pelanggan	Koordinasi dengan Pusdatin terkait permasalahan Nomor SKI tidak terbit	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA
		Melakukan rapat evaluasi untuk persamaan persepsi petugas			timeline tidak sesuai SLA	timeline SKI SKE sesuai SLA

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**


Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan penyesuaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2023, antara lain :

1. monitoring pengajuan permohonan rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik di oss.go.id secara rutin
2. melakukan desk konsultasi CAPA sertifikasi CDOB sebelum disubmit ke sertifikasicdob.pom.go.id
3. menentukan timeline internal dalam proses evaluasi permohonan di e-sertifikasi.pom.go.id

IK.13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 68 Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,17	113,04	

Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dimaksud adalah sarana produksi yang meliputi industri farmasi, fasilitas produk biologi/sarana khusus (Unit Transfusi Darah /Lab Sel Punca), Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, industri farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan, industri kosmetik, industri pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan yang menunjukkan kesesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana ala. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan rutin maupun sebagai tindak lanjut / rekomendasi dari pusat maupun pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Semarang melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi sebanyak 341 sarana, 212 sarana memenuhi

ketentuan dan 129 sarana tidak memenuhi ketentuan. Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 113,04 % dan mendapat kriteria **Sangat Baik**.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 34 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK13

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020. Tahun 2022 terdapat realisasi meningkat tetapi capaian lebih rendah dari tahun 2021 karena target meningkat di tahun 2022. Pada tahun

2023 realisasi dan capaian mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan target tetap tercapai.

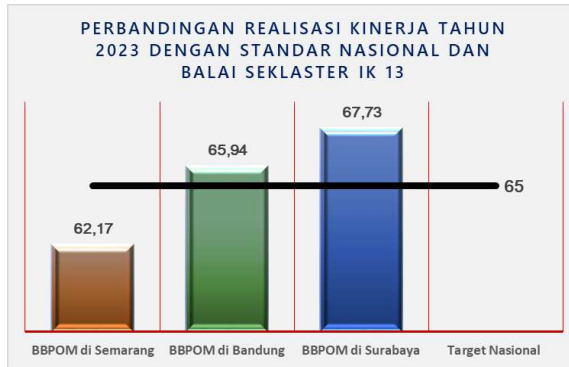
- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK13

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62,50	62,17	99,47	▲

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan tahun 2023 akan mencapai target Renstra tahun 2024, namun demikian upaya masih diperlukan untuk mencapai realisasi hingga tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK13

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Ssurabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Capaian BBPOM Semarang masih dibawah target nasional.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Sarana produksi yang menjadi target pemeriksaan ditetapkan berdasarkan Analisa risiko meliputi beberapa kriteria dengan sistem pembobotan. Dengan system ini, sarana baru memiliki bobot yang tinggi sehingga menjadi prioritas pemeriksaan, sehingga penerapan aspek -aspek cara produksi yang baik belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten meskipun telah dilakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya selanjutnya untuk meningkatkan capaian indikator adalah melakukan, bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha baik pada saat pelaksanaan inspeksi maupun yang diselenggarakan secara khusus baik secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan. Disamping itu juga memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 70 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK13

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	471.252.000	471.213.400	99,99%	113,04	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator **lebih tinggi** daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator presentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 1. Bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha baik pada saat pelaksanaan inspeksi maupun yang diselenggarakan secara khusus baik secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan
 2. memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) hasil inspeksi.
 3. Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk akses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 71 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline

1	Pendampingan dan pembinaan sarana produksi obat dan makanan diprioritaskan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah sehingga pemahaman terhadap peraturan dan Cara Produksi yang Baik semakin meningkat.	Desk CAPA Sarana Produksi Pangan dan OT Kosmetik tanggal 27 Juli 2023 secara luring.	Bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha baik pada saat pelaksanaan inspeksi maupun yang diselenggarakan secara khusus baik secara luring maupun daring	Akan dilaksanakan tahun 2024	Bintek dan Sosialisasi Peraturan baru Desk CAPA	Terjadi peningkatan MK pengawasan sarana produksi
2	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana	1. Kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) sebagai media sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peraturan maupun persyaratan terkini agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan. 2. Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan	Melakukan monev sebagai bahan pemeriksaan tahun berikutnya (Sebagian sarana produksi tutup)	2024	Terdaftar dalam data base tetapi sarana tidak aktif / tutup	Pemeriksaan sarana dilakukan lebih efektif dan tepat

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**


Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi untuk percepatan capaian kinerja dengan melakukan komunikasi dan himbauan agar para pelaku usaha sehingga lebih memahami pedoman / prinsip-prinsip cara produksi yang baik sehingga pelaku memapu menghasilkan produk yang memenuhi

persyaratan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

IK.14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 72 Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,71	109,32	

Cakupan sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa meliputi :

1. Sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pedagang Besar Farmasi)
2. Sarana pelayanan kefarmasian (apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin)
3. Sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan (depot/toko jamu, distributor obat tradisional, distributor suplemen kesehatan)
4. Sarana distribusi kosmetika (Badan Usaha Pemilik Notifikasi, importir kosmetika, toko koametika, klinik kecantikan, salon/spa, counter kosmetika, distributor kosmetika)
5. Sarana distribusi pangan (toko, minimarket, hypermarket, distributor pangan)

Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dimaksud adalah sarana distribusi Obat dan Makanan yang menunjukkan kesesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan rutin maupun sebagai tindak lanjut/rekomendasi dari pusat maupun pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Semarang melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 1.038 sarana, 817 sarana memenuhi ketentuan dan 221 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Indikator kinerja kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 mencapai realisasi 78,71% dari target yang ditetapkan sebesar 72,00%, dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 109,32 % dan mendapat kriteria **Sangat Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 36 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK14

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2020, 2021 dan 2022. Meskipun terdapat peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 72% dari target 2022 (71%), target 2021 (70%) dan target 2020 (55%) namun BBPOM di Semarang mampu mencapai realisasi sebesar 78,71% dan capaian

sebesar 109,32% pada tahun 2023, ini merupakan realisasi dan capaian tertinggi dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020,2021 dan 2022.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK14

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	78,71	99,63	▲

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 sebesar 78,71% akan **mencapai** target Renstra tahun 2024 (79,00%), dengan demikian upaya masih terus diperlukan untuk meningkatkan realisasi hingga tahun 2024.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK14

Realisasi kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Semarang tahun 2023 sebesar 78,71% telah melampaui target Nasional (68%). Di antara Balai seklaster, realisasi BBPOM di Semarang

lebih baik dibanding BBPOM di Surabaya (70,86%) namun masih di bawah BBPOM di Bandung (81,1%).

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan kriteria **Sangat Baik** didukung oleh antara lain :

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
2. Khusus pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mengelola vaksin, dilakukan pengawalan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin yang baik dan benar.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah,

pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk.

4. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
5. Dukungan Anggaran DAK yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota memberikan dampak positif pada kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan obat

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melalui upaya :

1. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi obat dan makanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana.
3. Peningkatan kompetensi inspektur/petugas melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait peraturan dan pedoman terkini di bidang obat dan makanan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 74 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK14

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	820.599.000	820.062.083	99,93%	109,32	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator **lebih tinggi** daripada % realisasi anggaran 2023. Capaian output sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa adalah 1.038

sarana (109,03%) dari target output 952 sarana. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu.
2. Memberikan kesempatan/forum diskusi bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action)
3. Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi obat dan makanan terkait penggunaan aplikasi *B POM Mobile* untuk melakukan pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar, aplikasi *e-Public Warning Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan* untuk melakukan pengecekan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat, website *pom.go.id* dan *jdih.pom.go.id* untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 75 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline

					Rencana Aksi	Rencana Aksi
1	Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi obat dan makanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.	Bimtek kepada pelaku usaha kosmetik termasuk klinik kecantikan dalam kegiatan National Gathering BUPN	Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu	Akan terus menerus dilakukan di tahun 2024	pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.	pelaku usaha untuk semakin mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri. Terjadi peningkatan persentase MK pengawasan sarana distribusi.
		Bimtek "Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik Dan Complay Terhadap Peraturan di Era Gen Z	Konsistensi pengawasan pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari Instalasi Farmasi/Gudang Farmasi Kabupaten/Kota sampai dengan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan	Akan terus menerus dilakukan di tahun 2024		

			capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan.			
			Sosialisasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile, e-Public Warning Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan, website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan makanan.	Akan terus menerus dilakukan di tahun 2024		
2	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana.	Desk CAPA untuk sarana pelayanan farmasi yang belum melakukan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action)	Memberikan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action) untuk menindaklanjuti temuan hasil	Akan terus menerus dilakukan di tahun 2024	Sarana belum tertib melakukan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action) terhadap	Meningkatnya sarana yang mengirimkan dokumen Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau CAPA (Corrective Action and

		terhadap temuan hasil pemeriksaan.	pemeriksaan		temuan hasil pemeriksaan	Preventive Action) terhadap temuan hasil pemeriksaan
		Melakukan Updating database sarana distribusi kosmetik dan obat tradisional			Terdaftar dalam data base tetapi sarana tidak aktif / tutup	Pemeriksaan sarana dilakukan lebih efektif dan tepat
3	Peningkatan kompetensi inspektur/petugas melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait peraturan dan pedoman terkini di bidang obat dan makanan.	Menyelenggarakan Pelatihan Inspektur CPOTB Junior	Mengikuti pelatihan atau sosialisasi baik secara daring maupun luring sehingga meningkatkan kompetensi dalam melakukan bimbingan, pendampingan dan pengawasan obat dan makanan	Akan terus menerus dilakukan di tahun 2024	Inspektur yang kompeten	Meningkatnya kompetensi inspektur dalam melakukan bimbingan, pendampingan dan pengawasan obat dan makanan
		Menyelenggarakan Pelatihan Teknik Inspeksi dan Komunikasi Pada Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Dan Makanan.				

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**


Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan

diedarkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

IK.15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM Di Semarang

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 76 Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM Di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
15	Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,62	102,44	

Dalam rangka menjalankan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BBPOM di Semarang melaksanakan Evaluasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan kebijakan pelayanan publik serta untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Semarang.

Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BBPOM di Semarang dilakukan menggunakan instrument Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Profesionalitas SDM (18%)
Penilaian aspek profesionalisme meliputi kompetensi, responsivitas, kode etik, pemberian *reward and punishment* dan budaya pelayanan
3. Sarana Prasarana (15%)
Penilaian aspek Sarana dan Prasarana meliputi kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana *front office* dan sarana penunjang lainnya.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)

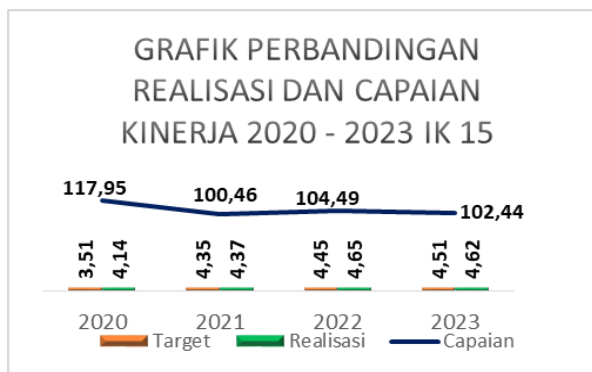
Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik

5. Konsultasi dan Pengaduan (15%)

Penilaian aspek konsultasi dan pengaduan meliputi ketersediaan sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses.

6. Inovasi (7%)

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 38 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK15

Berdasarkan data grafik, persentase capaian realisasi maupun Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 dan 2020 serta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Nilai indeks maksimal (nilai sempurna 5) diperoleh

pada Aspek Sarana Prasarana sedangkan pada Aspek lainnya (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan dan Inovasi) masih perlu dievaluasi, ditindaklanjuti dan diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penilai Internal Badan POM

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK15

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
15	Indeks Pelayanan Publik	4,70	4,62	98,30	▲

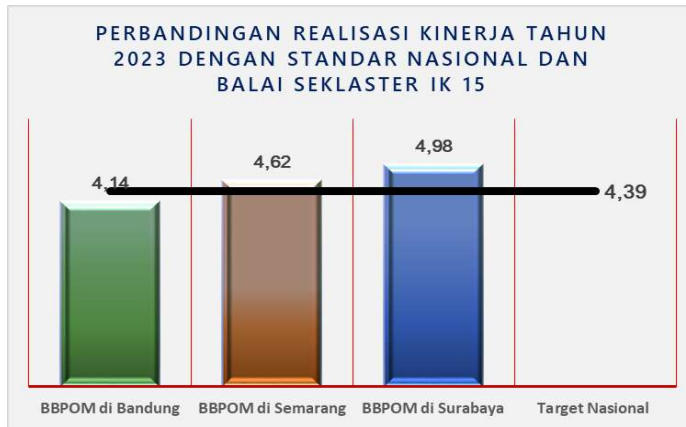
Berdasarkan data pada tabel, realisasi tahun 2023 belum melampaui target jangka menengah yang tercantum dalam Dokumen Renstra awal BBPOM di Semarang dengan persentase capaian jangka menengah sebesar 98,30.

BBPOM di Semarang sebagai unit yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan wajib mewujudkan budaya pelayanan prima di lingkungan BPOM. Berbagai kendala yang dihadapi maupun rekomendasi dari Tim Penilai Internal BPOM harus dievaluasi dan difindaklanjuti. BBPOM di Semarang juga harus melakukan pemantauan dan penilaian mandiri terhadap 6 (enam) aspek pelayanan yang meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan,
- 2) Profesionalisme SDM,
- 3) Sarana Prasarana,
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik,
- 5) Konsultasi dan Pengaduan, serta 6) Inovasi.

Hal ini penting untuk mendorong perbaikan kinerja pelayanan secara terus menerus, mekanisme penilaian transisi yang diterapkan BBPOM di Semarang diharapkan dapat memberikan gambaran penilaian yang objektif dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna layanan yang jauh lebih baik di masa depan.pengguna layanan. Upaya perbaikan secara maksimal. pemenuhan data dukung, dan perbaikan berkelanjutan pada seluruh aspek penilaian sebagai unit penyelenggara pelayanan public harus dilakukan sehingga BBPOM di Semarang mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK15

Berdasarkan data pada grafik perbandingan realisasi kinerja untuk Indeks Pelayanan Publik di tingkat UPT Tahun 2023, BBPOM di Semarang memperoleh realisasi nomor dua setelah BBPOM di Surabaya, sedangkan BBPOM di Bandung menempati urutan ketiga. Secara

keseluruhan apabila dibandingkan dengan target (standar Nasional) Badan POM, UPT seklaster tersebut BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya melampaui target. Hanya BBPOM di Bandung yang realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publiknya di bawah standar Nasional.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Pada triwulan III telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Internal Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dan BBPOM di Semarang memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 4,62 dengan kategori Pelayanan Prima.

Berikut adalah Hasil Evaluasi dari tiap aspek :

Tabel 78 Hasil Evaluasi IPP

No.	Aspek	Bobot (%)	Aspek Indeks	Rekomendasi
1	Kebijakan Pelayanan	24	4,58	<ul style="list-style-type: none"> • Agar Dasar Hukum KepKa Standar Pelayanan BBPOM di Semarang dapat ditambahkan Peraturan No. 28 Tahun 2022 sebagai acuan; • Agar mencantumkan 6 service delivery pada media publikasi lainnya (Media Elektronik); • Agar disampaikan laporan atau dokumen yang membuktikan peninjauan ulang 1 Tahun atau lebih cepat terhadap seluruh layanan; • Apabila memiliki aplikasi yang dapat diunduh dapat ditambahkan sebagai data dukung; <ul style="list-style-type: none"> • Agar dilampirkan data dukung yang membuktikan tindak lanjut SKM
2	Profesionalisme SDM	25	4,4	<ul style="list-style-type: none"> • Agar ditambahkan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin atau memiliki layanan 24 jam; • Agar dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti beasiswa, pelaksanaan konseling (partisipasi dalam kegiatan psikoedukasi Biro SDM) dan

				<p>mekanisme peningkatan motivasi kerja lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria-kriteria pemberian pengharagaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi dapat ditetapkan dalam SK
3	Sarana dan Prasarana	18	5	Semua Indikator telah terpenuhi
4	Sistem Informasi Pelayanan	11	4,3	<ul style="list-style-type: none"> • Agar ditambahkan layanan publik pendukung operasional pelayanan SIASN pada Subsite; • Agar dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian
5	Konsultasi dan Pengaduan	10	4,5	Agar dokumentasi konsultasi dan pengaduan ditindaklanjuti
6	Inovasi	12	4,5	<ul style="list-style-type: none"> • Terus melakukan penyempurnaan inovasi agar mendapatkan prestasi; • Dapat diberikan keterangan pada alokasi anggaran DIPA untuk inovasi yang sudah dilakukan

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 79 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK15

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	47.883.500	47.806.145	99,84%	105,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang telah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana bagi pelanggan kelompok rentan / berkebutuhan khusus. Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Semarang pada tahun berjalan untuk diutamakan juga untuk pengembangan program sesuai kebutuhan terkini, pengembangan kompetensi petugas layanan publik, dan program lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pertemuan dengan pelaku usaha dalam rangka pendampingan.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Semarang dalam rangka meraih kategori penilaian "Pelayanan Prima", yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, hanya 1 (satu) aspek mendapatkan nilai maksimal yaitu Aspek Sarana dan Prasarana. Sehingga BBPOM di Semarang harus terus bekerja lebih keras agar keseluruhan Aspek Penilaian IPP juga memperoleh

penilaian maksimal. Dengan mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Tim penilai internal Badan POM, BBPOM di a perlu mengupayakan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
2. Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan. Selain itu konsistensi melakukan publikasi hasil SKM melalui berbagai media termasuk aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat. SKM internal perlu dievaluasi secara periodik dan saran/masukan perbaikan dari pelanggan ditindaklanjuti.
3. Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
4. Peningkatan peran dan profesionalisme SDM dengan menerbitkan SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional ataupun pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
5. Secara berkelanjutan memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, *capacity building* dan mekanisme lainnya guna untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
6. Pemberian *reward* dan *punishment* untuk petugas pelayanan publik secara rutin tidak hanya insidental saja.
7. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan.
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas SIPP (Sajian Istimewa Pada Pelanggan) berupa penyediaan minuman dan kue tradisional di ruang layanan tidak hanya pada hari-hari tertentu, dan penyediaan kelengkapan *coffee corner* di ruang tunggu dll.
9. Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik.
10. Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPP, dll.
11. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai *timeline*, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N

Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.

12. Pengembangan dan penyempurnaan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran yang memadai.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 80 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Membuat inovasi-inovasi baru terkait pelayanan publik yang lebih mendekatkan diri dengan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan cakupan Lakone Sekti dengan penambahan lokasi di MPP Kota Semarang dan Uji Coba ke MPP Pati. • Peluncuran GUMREGAH (Ngunggah UMK Resik Saking Bahan Berbahaya) 	Penambahan Lokasi Lakone Sekti di MPP Kota Tegal dan MPP Wonosobo	Per awal 2024	<p>Konsumen yang jauh kesulitan untuk akses konsultasi tatap muka langsung</p> <p>Konsumen terpapar bahan berbahaya dari pangan olahan UMK</p>	<p>Konsumen yang tinggal di daerah /kota sekitar MPP tsb, lebih mudah untuk akses konsultasi tatap muka langsung</p> <p>Konsumen terlindungi, pangan olahan UMK bebas dari bahan berbahaya</p>

2	Menyusun rencana penggunaan anggaran guna pemenuhan maupun fasilitas layanan 160ublic yang lebih baik dan berkesinambungan baik secara kualitas maupun kuantitas	Melengkapi Sarana prasana pelayanan publik utamanya untuk pelanggan kelompok rentan	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Fasilitas Sarpras Yanblik untuk kelompok rentan kurang lengkap	Fasilitas Sarpras YanBlik khusus untuk kelompok rentan sudah terpenuhi semua.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2022 dan Laporan interim triwulanan Tahun 2023, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,62 melebihi target tahun 2023 yaitu 2,51. Namun demikian perolehan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang tahun 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022. Sehingga BBPOM di Semrang harus terus melakukan perbaikan aspek pelayanan publik secara berkesinambungan termasuk perbaikan dari evaluasi di tahun 2022.

Di tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan inovasi layanan publik yang sudah dimiliki sejak tahun sebelumnya seperti pengembangan kolaborasi, peningkatan penganggaran, penambahan sasaran pelayanan, peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan, kemudahan pelayanan, dan lain-lain. Inovasi baru untuk menyempurnakan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus, agar kepuasan masyarakat pengguna layanan publik BBPOM di Semarang semakin meningkat. Pelaksanaan kaji ulang/ reuiu Pelayanan Publik secara periodik diharapkan mampu menggambarkan komitmen serius BBPOM di Semarang selaku UPT Badan POM dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Perbaikan lebih efektif bila berangkat dari rekomendasi hasil evaluasi tim internal Badan POM. Disamping itu kontinuitas penyelenggaraan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui berbagai survei kepada pelanggan juga diperlukan guna memperoleh mendapatkan masukan dari masyarakat demi perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas pelayanan publik.

IK.16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 81 Realisasi Kinerja Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, merupakan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, maka capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 126,58% (tidak dapat disimpulkan). Hal ini dikarenakan sebanyak 24 UMKM Pangan, 5 UMKM OT, dan 5 UMKM Kosmetik mendapatkan pendampingan sesuai tahapan dan memperoleh SPA CPKB, Sertifikat CPOTB Bertahap, dan IP CPPOB tepat waktu.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 40 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK 16

Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan Gap 1 untuk pendampingan UMKM sejak Desember 2022 - Januari 2023. Tujuan dari dilakukannya Gap 1 ini adalah untuk melakukan seleksi UMKM sehingga

diperoleh UMKM yang benar-benar siap berkomitmen untuk mengikuti tahapan pendampingan UMKM.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK16

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	89,00	100,00	112,36	▲

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sudah tercapai/melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan, dimana realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, sehingga jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 112,36%.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Jika dibandingkan dengan balai seklaster, BBPOM di Semarang menduduki peringkat pertama dengan realisasi 100%. Dan dibandingkan dengan standar nasional, BBPOM di Semarang memperoleh realisasi lebih tinggi.

Gambar 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK16

▪ **Analisis Penyebab**

Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 100% disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan mendorong UMKM agar menyelesaikan dokumen dan masuk ke tahapan sertifikasi
2. Intensifikasi pelaksanaan pendampingan ke sentra-sentra produksi
3. Fokus melakukan evaluasi dan pendekatan terhadap UMKM yang sudah memiliki dokumen untuk menyelesaikan tahapan pendampingan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik offline maupun online
2. Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 83 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK16

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	127.727.000	127.679.000	99,96%	126,58	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
2. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
3. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 84 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik <i>offline</i> maupun <i>online</i>	Melakukan Gap Assessment ke sarana dan mendampingi dalam proses pembuatan panduan mutu serta upload dokumen ke website BPOM	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi sarana produksi tidak sesuai prinsip CPPOB/CPOT B/CPKB - pelaku usaha tidak memahami dokumen/panduan mutu yang harus dimiliki - pelaku usaha kesulitan mengajukan permohonan sertifikasi melalui website BPOM 	<ul style="list-style-type: none"> - Layout sarana produksi sesuai prinsip CPPOB/CPOT B/CPKB - pelaku usaha mampu menyusun dokumen/panduan mutu untuk produksi - pelaku usaha mampu secara mandiri mengajukan permohonan sertifikasi

2	Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	melakukan seleksi UMKM yang akan dijadikan target pendampingan	closed	closed	- target pendampingan tidak tercapai	- capaian pendampingan tahun 2023 sebesar 100%
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------	--------	--------------------------------------	------------------------------------------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022, realisasi hanya berkisar 86,67%, maka untuk meningkatkan capaian pada tahun 2023 AoC BBPOM di Semarang menggagas sebuah inovasi yaitu Surprise sertif, sebuah inovasi dimana petugas BBPOM di Semarang melakukan jemput bola proses permohonan sertifikasi ke sentra-sentra usaha dan pelaku usaha yang mempunyai kendala baik dalam hal sarana prasarana dan sumber daya manusia. Petugas BBPOM di Semarang akan membantu pelaku usaha menyusun panduan mutu produksi dan melakukan proses pendaftaran secara online melalui oss.go.id dan melalui website BPOM. Dengan demikian, target tahun 2023 bisa lebih cepat tercapai.

SS5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Tabel 85 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,60	100,64	Sangat Baik
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	123,00	103,36	Sangat Baik
Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00	Baik
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	21,00	21,00	100,00	Baik

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

101,00

Sangat Baik

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 101% dengan kriteria **Sangat Baik**.

IK.17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan


Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 86 Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,60	100,64	

Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan digunakan untuk mengukur efektifitas pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. BBPOM di Semarang melaksanakan Survei Efektifitas KIE di tahun 2023 dengan jumlah responden sebanyak 455 orang. Survei diberikan kepada responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan metode kegiatan yang beragam seperti KIE melalui media sosial, media elektronik, media luar ruang, maupun penyuluhan secara langsung. Berdasarkan survei tingkat efektifitas KIE, didapatkan:

1. penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE

sebesar 93,87%;

2. nilai tingkat pemahaman Masyarakat terhadap konten informasi yang , diterima sebesar 95,88%;
3. penilaian Masyarakat terhadap manfaat program KIE 96,54%
4. dan minat Masyarakat terhadap informasi obat dan makanan adalah yang paling rendah yaitu sebesar 87,86%.

Keempat indikator tersebut memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan capaian efektifitas KIE (100,64%).

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 42 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK17

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan % capaian dari tahun 2020 hingga 2022, namun jika dilihat realisasinya, Indeks efektifitas KIE selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai tahun 2020 sebesar 91,38; tahun 2021 senilai 92,5; tahun 2022 senilai 93,38 dan tahun 2023 sebesar 94,60 .

Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 yang melampaui target dapat dilihat dari peningkatan minat responden terhadap informasi yang diberikan dengan metode penyuluhan. Metode tatap muka langsung melalui penyuluhan adalah yang paling diminati responden sehingga mampu meningkatkan pemahaman, dan manfaat KIE sehingga meningkatkan % capaian di tahun 2023.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

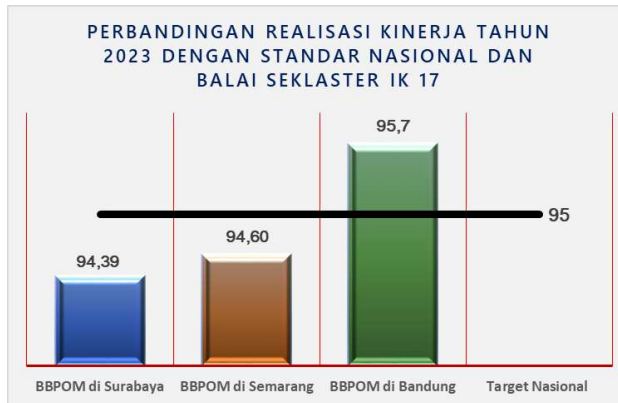
Tabel 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK17

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,50	94,60	99,06	▲

Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 (94,60) hampir mendekati target Renstra tahun 2024 dengan capaian sebesar

99,07. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai target Renstra 2024 (95,50).

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK17

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Kinerja BBPOM di Semarang berada diatas BBPOM di Surabaya, namun masih dibawah Realisasi Standar nasional. BBPOM di Bandung memiliki realisasi kinerja diatas BBPOM di Semarang dan telah mampu melebihi standar nasional. Agar realisasi indeks efektifitas KIE BBPOM di Semarang

melampaui standar nasional, maka BBPOM di Semarang perlu Menyusun strategi, inovasi, dan metode kegiatan KIE agar lebih menarik minat masyarakat , meningkatkan pemahaman serta meningkatkan manfaat KIE.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil survey pada tahun 2023, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar (100,41) ke tahun 2023 sebesar (100,64). Peningkatan capaian dipengaruhi oleh penambahan jumlah responden yang mendapatkan atau terpapar KIE oleh BBPOM di Semarang. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang telah melakukan KIE kepada 73.331 orang dari target 65.388 orang, dengan pengikut instagram lebih dari 10.000 orang. Sesuai survei efektifitas KIE, yang dinilai masyarakat paling bagus dan bermanfaat adalah metode KIE secara langsung (41,4%) diikuti KIE melalui Media Sosial (13,9%) dan webinar / daring (9,5%). Maraknya isu dan atau hoax terkait obat dan makanan di masyarakat juga berpengaruh terhadap peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan mendapatkan manfaat dari KIE.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja agar dapat melebihi realisasi standar nasional, antara lain :

1. Melakukan monitoring capaian survey efektivitas KIE melalui evaluasi.pom.go.id secara periodik sehingga dapat memantau capaian indeks sehingga dapat memenuhi target responden minimal 30 per Triwulan
2. Melakukan input data survei efektivitas KIE pada aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id> secara tepat waktu, maksimal pada hari terakhir tiap triwulan
3. Meningkatkan *branding* kataB POM serta memperbesar atau memperluas KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
4. Melakukan pengelolaan media sosial lebih baik lagi untuk meningkatkan *engagement follower* , antara lain dengan memperbanyak konten berupa video / *reels* di media sosial terutama di instagram.
5. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat, agar dapat menciptakan inovasi KIE yang makin menarik dan bermanfaat untuk masyarakat.
6. Penambahan variasi kegiatan (senam bersama, demo kecantikan, *talkshow, games, dll*) khususnya pada saat KIE secara langsung.
7. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait, termasuk media dan *influencer* atau duta / kader untuk memperluas penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 88 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK17

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	19.488.300.000	19.486.683.542	99,99%	100,64	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Tingkat

Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemblokiran sebesar 8.730.230.000 pada awal tahun anggaran tetapi dibuka kembali pada akhir triwulan kedua. Anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat/Lintas Sektor.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Salah satu kegiatan yang pada saat penyelenggaraannya dilakukan survei terhadap efektifitas KIE yaitu KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX. Termasuk juga KIE yang dilaksanakan oleh lintas sektor yang melibatkan petugas BBPOM di Semarang sebagai narasumber.

Sepanjang tahun 2023 BBPOM di Semarang telah melaksanakan KIE sejumlah 130 titik bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI Komisi IX dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah 14 kegiatan KIE langsung ke masyarakat serta 106 KIE dg lintas sektor dimana petugas BBPOM Semarang bertindak selaku narasumber. Besarnya jumlah peserta dan penganekaragaman kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman memberikan kontribusi positif pada peningkatan ragam dan minat masyarakat mengikuti KIE .

Beberapa kegiatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat juga memberi kontribusi dalam meningkatkan nilai kemanfaatan KIE. Adanya inovasi Gumregah (Nggugah UMKM Resik Saking bahan Berbahaya) dimana pada kegiatan ini para kader PKK dan sanitarian yang terlibat , diberikan KIE tentang keamanan pangan dan cara uji Bahan Berbahaya pada pangan dengan menggunakan alat uji cepat. Dari hasil KIE ini, para kader dapat melakukan sampling dan uji mie bakso, bakmie Jowo dan mi kopyok yang dijual di daerah masing masing yang dicurigai mengandung formalin dan boraks secara mandiri.

Pendampingan para Pelaku Usaha yang akan mengurus legalitas produk melalui inovasi Melon Manis (Melalui On line Memberikan Informasi), ini merupakan salah satu ragam KIE dengan platform zoom meeting yang menarik minat pelaku usaha, karena lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan nilai minat pelaku usaha pada KIE .

Adanya Inovasi Layanan Cekatan, pameran , kegiatan bersama Pramuka melalui SAKA POM, banyaknya konten berupa video di medsos, kolaborasi dengan media elektronik / media online dan lintas

sektor, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi adalah kegiatan/program yang dapat meningkatkan ragam media KIE, minat masyarakat, pemahaman masyarakat dan manfaat KIE sehingga capaian indeks efektifitas meningkat .

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 89 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Realisasi Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat Dan Makanan tahun 2022 telah mencapai target balai maupun target nasional, tetapi belum mencapai target renstra tahun 2024, supaya dapat mencapai target renstra maka dapat dibuat kajian dari hasil survey tahun 2022 dan menjadi masukan bagi BBPOM Di Semarang untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan KIE.	Telah dilakukan kajian hasil survey tahun 2022	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Efektifitas KIE tahun 2022 mencapai indeks 93,38	Efektifitas KIE tahun 2023 meningkat dengan indeks 94,6 namun belum mencapai target renstra jangka menengah 95,5

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan dilakukan revaluasi kembali terhadap target tingkat efektifitas KIE untuk akhir tahun Renstra tahun 2024. Harapannya di tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi tingkat efektifitas KIE.

IK.18. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan

kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.


Tujuan intervensi keamanan PJAS adalah untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Satuan Pendidikan yang diintervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Tahapan pelaksanaan intervensi keamanan PJAS berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan adalah meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Intervensi utama dilakukan melalui bimbingan teknis keamanan pangan yang diberikan kepada siswa dan guru, pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah benar-benar menerapkan persyaratan keamanan pangan dan sampling PJAS di jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 90 Realisasi Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00	123,00	103,36	

Intervensi keamanan PJAS dilaksanakan pada satuan Pendidikan mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMK/SMA/MA di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Target tahun 2023 adalah 40 sekolah baru dan 79 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun dari 2020 hingga tahun 2022.

Pada tahun 2023 realisasi sekolah yang mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman sebanyak 123 sekolah. Progres capaian jumlah sekolah yang telah memperoleh Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman

mencapai 103,36% melebihi dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 44 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK18

Terdapat peningkatan realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Capaian tersebut secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, dengan pencapaian hingga 103,36% di tahun 2023. Penetapan target indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dilakukan secara kumulatif hingga tahun 2024

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

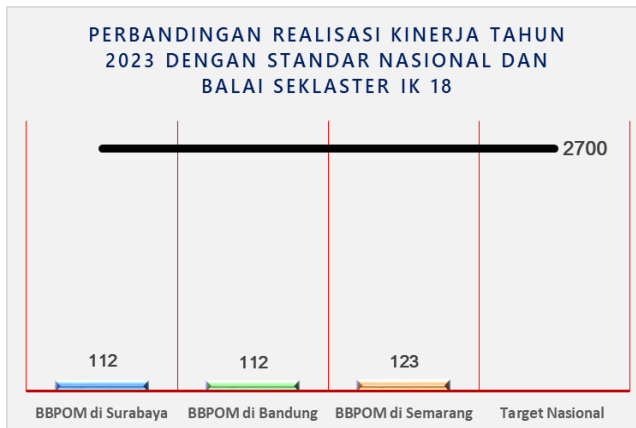
Tabel 91 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK18

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	153	123	80,39	▲

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah



sekolah dengan PJAS aman tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Semarang sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Gambar 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK18

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan terbentuknya sekolah dengan sertifikasi PJAS aman adalah:

1. Meningkatkan komitmen yang baik dari sekolah intervensi dalam mengimplementasikan program keamanan pangan.
2. Meningkatkan komitmen dan peran aktif kader keamanan pangan sekolah yang diintervensi dalam melakukan tindak lanjut program keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Memberikan Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.
4. Menumbuhkan dukungan dari pihak internal maupun lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah dengan PJAS aman agar program berjalan lancar dan efektif

Setiap tahun BBPOM Semarang senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan apresiasi lomba sekolah dengan sertifikat PJAS Aman. Melalui upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2023, salah satu sekolah intervensi BBPOM di Semarang yaitu SDN kedondong 2 Banyumas berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori lomba sekolah dengan Sertifikat PJAS aman di tingkat wilayah kerja Regional Barat.

Prestasi ini menjadi bukti nyata dari kolaborasi antara BPOM Semarang dan pihak sekolah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keamanan pangan di kalangan siswa dan masyarakat. SDN Kedondong 2 Banyumas telah menunjukkan komitmen mereka dalam menerapkan standar keamanan pangan yang baik di lingkungan sekolah, yang mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, kebersihan sanitasi, dan pengawasan kualitas makanan.

Keberhasilan ini diharapkan bahwa SDN Kedondong 2 Banyumas dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut untuk mengikuti jejak mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi siswa. Ini juga mencerminkan komitmen BPOM Semarang dalam mendukung upaya-upaya pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan di kalangan generasi muda.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka melakukan perluasan cakupan sekolah yang mendapatkan sosialisasi maka sekolah yang diintervensi diwajibkan untuk melakukan pengimbasan kepada 1 sekolah yang berada di sekitarnya sebagai bentuk komitmen sekolah dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 92 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK18

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	961.026.000	960.657.421	99,96%	103,36	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- a. Koordinasi awal secara langsung dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas

- Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi) dalam menentukan usulan sekolah yang akan dijadikan lokus intervensi di Kabupaten/Kota
- Pendampingan terhadap komunitas sekolah dilakukan oleh BBPOM Di Semarang secara intensif.
 - Peran serta lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi yang mendukung penuh program PJAS aman.
 - Bersinergi dengan kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan CEKATAN (PengeCEKAn laboratorium untuk masyarakAT dan sekolahAN) yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta komunitas sekolah pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang, sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 93 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pada awal tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman, akan dilakukan koordinasi secara langsung dan lebih intensif ke masing-masing lintas sektor terkait agar maksud dan tujuan dari kegiatan ini dapat tersampaikan dengan lebih baik sehingga usulan sekolah-sekolah yang akan diintervensi lebih tepat sasaran.	Koordinasi secara langsung dan intensif dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi sebelum advokasi ke Pemda sehingga masing-	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Lintas sektor terkait belum mendapatkan gambaran dengan baik mengenai pelaksanaan program sertifikasi dengan PJAS Aman	Lintas sektor terkait dapat memberikan usulan sekolah yang akan diintervensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

		masing lintas sektor mendapatkan gambaran penuh terkait pelaksanaan program				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022 dilakukan penyesuaian anggaran untuk pengadaan buku pedoman PJAS series 1 dan 2 supaya kader keamanan pangan lebih memahami program dan dapat mengimplementasikannya dengan baik di sekolah masing-masing.

IK.19. Jumlah Desa Pangan Aman


Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.

Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin.keamanan, mutu dan gizinya. Pelaksanaan Desa Pangan Aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah, salah satunya program percepatan penurunan stunting, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa akibat dampak pandemi Covid-19.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan: advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 94 Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
19	Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00	

Intervensi desa pangan aman tahun 2023 dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Sukoharjo. Target intervensi adalah 9 desa baru dan 28 desa pengawalan yang merupakan target intervensi tahun dari 2020 hingga tahun 2022. Progres capaian jumlah desa pangan aman mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 46 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK19

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat terdapat kenaikan realisasi jumlah desa pangan aman dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Capaian dari tahun 2020 hingga 2023 adalah 100 % sesuai target yang ditetapkan. Target indikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK19

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
19	Jumlah desa pangan aman	46,00	37,00	80,43	▲

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru berhasil dicapai di akhir periode Renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK19

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2023 BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung dalam sama. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak

dapat dibandingkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk membentuk desa pangan aman yang mandiri adalah:

- a. Menjalinkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa/ kelurahan dan lintas sektor terkait

- b. Menumbuhkan komitmen desa/kelurahan dalam melaksanakan program desa pangan aman sehingga semua tahapan program kegiatan desa pangan aman bisa berjalan lancar.
- c. Meningkatkan dan mendorong peran serta dari lintas sektor terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pukesmas setempat selaku pendamping desa dan yang memiliki wilayah cukup besar untuk menggerakkan kader keamanan pangan semakin aktif.
- d. Memotivasi dan memfasilitasi kader keamanan pangan desa untuk selalu aktif dalam menyusun dokumen perencanaan program keamanan pangan dan melaksnakannya secara mandiri untuk menjaga kesinambungan program
- e. Memberi Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasl, flipchart dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh kader keamanan pangan desa sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan desa

Melalui upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang, salah satu contoh keberhasilan program Desa Pangan Aman adalah terwujudnya pencapaian Desa Randusari sebagai juara pertama dalam kategori lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional di wilayah kerja Regional Barat.

Desa Randusari ini dapat dijadikan sebagai contoh desa pangan aman bukan hanya sebuah kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Jawa Tengah untuk mengikuti jejak mereka dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat bagi masyarakatnya.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka menggerakkan dan mengaktifkan tim keamanan pangan desa dan kader keamanan pangan desa perlu adanya pemberian penghargaan bagi kader atau desa yang aktif dan memiliki program keamanan pangan mandiri yang berjalan dengan baik

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 96 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK19

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	1.089.691.000	1.089.175.580	99,95%	100,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator jumlah desa pangan aman.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sepanjang tahun 2023 BBPOM di Semarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pembentukan desa pangan aman sebagai berikut :

1. BBPOM di Semarang senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan pihak desa dalam menentukan personil yang akan ditunjuk sebagai tim keamanan pangan desa dan juga kader keamanan pangan desa sehingga terpilih orang-orang yang aktif dan berdedikasi tinggi.
2. Pengawasan/ pendampingan intensif dalam penyiapan dokumen perencanaan program keamanan pangan mandiri baik dengan dana desa, atau integrasi dengan program lain.
3. Kegiatan GKPD dapat disnergikan dengan inovasi BBPOM di Semarang yaitu Nggugah UMKM resiko saking bahan berbahaya (Gumregah) berupa kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha pangan yang diduga masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya, sehingga produk yang dihasilkan aman dan bebas dari bahan berbahaya.
4. Kegiatan bimtek komunitas pelaku usaha yang disinergikan dengan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha sehingga dapat diterbitkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam perizinannya.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 97 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Merencanakan pelaksanaan tahapan kegiatan secara matang	Dibuat perencanaan tahapan kegiatan dengan memperhatikan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan tidak sesuai dari jadwal yang ditetapkan juknis	Pelaksanaan Tahapan kegiatan dapat terlaksana lebih cepat dari jadwal
2	Melakukan pejadwalan tahapan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM					
3	Melakukan koordinasi di awal tahun dengan lintas sektor sebelum audiensi untuk mencari informasi dan menjajaki usulan-usulan desa dari lintas sektor.	Koordinasi dilakukan ke lintas sektor terkait di tiap kabupaten/kota yang akan diintervensi	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Belum dilakukan koordinasi ke masing-masing lintas sektor	Didapatkan informasi terkait desa-desa yang dapat dijadikan lokus intervensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
4	Melakukan survei terlebih dahulu ke calon-calon desa intervensi GKPD usulan lintas sektor terkait untuk menggali potensi desa usulan sebelum penentuan desa target (sebelum audiensi dengan kepala daerah dan linsek terkait)	Survei dilakukan bersama lintas sektor terkait untuk menggali potensi desa agar dapat dijadikan usulan lokus intervensi	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Desa yang diintervensi kurang memiliki komitmen dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan	Usulan desa yang diintervensi sesuai dengan kriteria dan potensi yang dipersyaratkan.
5	Menggalang komitmen dan konsistensi petugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan /rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di awal tahun	Komitmen petugas dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disusun awal tahun didukung dengan penyusunan SKP (Satuan Kinerja Pegawai) Petugas BBPOM di Semarang	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Terdapat tahapan yang dilaksanakan melewati perencanaan	Pelaksanaan /rencana aksi kegiatan program desa pangan aman dapat dilaksanakan sesuai perencanaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
6	Menggalang komitmen dan konsistensi pihak desa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan /rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di akhir tahun oleh desa	Melakukan komunikasi, koordinasi dan pengawalan kepada desa intervensi sebelumnya agar kegiatan tetap berkesinambungan	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Rencana aksi yang sudah tersusun di desa tidak terlaksana dengan baik di tahun berikutnya	Rencana aksi yang sudah disusun terlaksana dengan baik
7	Menjalin Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman	Terbentuknya WA grup dengan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader dan lintas sektor Pembina (PLD, Puskemas, dan Dinas Kesehatan) sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait keberlanjutan program.	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Keberlanjutan program keamanan pangan di desa intervensi belum dapat dilaksanakan dengan baik	Desa mempunyai perencanaan kegiatan keamanan pangan mandiri yang akan dilaksanakan setelah intervensi selesai dilakukan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
8	Mensinergikan dan mengintegrasikan Program Desa Pangan Aman dengan Program Ketahanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.	Integrasi kegiatan keamanan pangan dalam pelaksanaan Bimtek dan fasilitasi keamanan pangan pada Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa menjadi salah satu pemenuhan persyaratan yang mendukung proses perizinan SPP IRT / Laik hygiene / labelisasi	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Kegiatan Bimtek keamanan pangan pada komunitas pelaku usaha hanya sebagai salah satu kegiatan sosialisasi	Komunitas pelaku usaha memiliki sertifikat Penyuluhan keamanan pangan yang menjadi syarat pemenuhan komitmen dalam perizinan
9	Melakukan Stikerisasi "Tidak Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya dan Memenuhi Higiene dan Sanitasi" terhadap tempat pengolahan pangan	-	Stikerisasi bahan berbahaya difokuskan pada para pelaku usaha	Triwulan II tahun 2024.	Pelaksanaan stikerisasi tidak menggunakan bahan kimia berbahaya pada pelaku	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	(IRTP dan Rumah Makan).		pangan siap saji di Kota Semarang dan Kota Magelang, khususnya pada para pelaku usaha pangan siap saji berbahan baku mie basah seperti mie jowo, mie bakso dan mie kopyok		usahan pangan desa belum dilaksanakan selama tahun 2023	
10	Pada saat monitoring dan evaluasi program desa pangan aman, para kader dianjurkan untuk menyusun Rencana Program Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan secara mandiri, termasuk memanfaatkan secara maksimal	Kader membuat rencana aksi mandiri program keamanan pangan di desanya Bersama tim KPD	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Kader tidak memiliki rencana aksi	Terdapatnya rencana aksi mandiri kader sebagai salah satu indicator keberhasilan desa pangan aman

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Rapid Test Kita Bahan Berbahaya yang telah diberikan oleh BBPOM Semarang.					
11	Melakukan pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya dengan pendampingan intensif melalui metode tatap muka.	Pengawalan dilakukan dengan kunjungan dan monev kegiatan yang dilakukan di desa	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Rencana aksi mandiri desa tidak dilakukan karena tidak ada pemantauan	Desa melaporkan realisasi kegiatan mandiri yang dilakukan berdasarkan rencana mandiri yang telah disusun


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022 dan untuk menunjang kegiatan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting maka untuk penentuan desa lokus stunting dilakukan penyesuaian komposisi jumlah kader dan komunitas yang diintervensi. Semula kader keluarga hanya 5 orang disesuaikan menjadi 8-10 orang dan komunitas keluarga menjadi minimal 18 orang. Penyesuaian anggaran juga dilakukan untuk melakukan pengawalan tatap muka ke desa untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi mandiri desa.

IK.20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 98 Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	21,00	21,00	100,00	

Pada tahun 2023 jumlah pasar pangan aman yang diintervensi oleh BPOM di Semarang berjumlah 21 pasar, terdiri dari 5 pasar baru yang diintervensi pada tahun 2023, 6 pasar intervensi tahun 2022, 7 pasar intervensi tahun 2021, dan 3 pasar intervensi pada tahun 2020. Realisasi target intervensi seluruhnya 21 pasar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 21 pasar, sehingga capaian kinerja 100% dengan kriteria baik.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 48 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK20

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan revitalisasi Pasar Pangan Aman dari bahan Berbahaya pada tahun 2020 dengan melibatkan beberapa stakeholder. Realisasi PPABK tahun 2023 merupakan akumulasi dari tahun 2020 dimana realisasi BPOM di Semarang selalu meningkat tiap tahunnya.

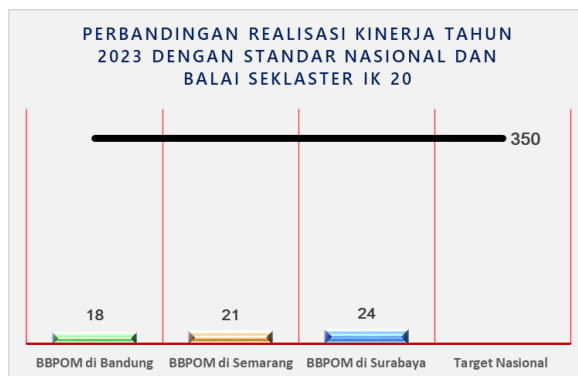
Tabel 99 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK20

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	27,00	21,00	77,78	▲

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Realisasi Kinerja Tahun 2023 Jumlah pasar pangan aman dari bahan berbahaya masih dibawah target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya-upaya agar tercapai Target Renstra.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK20

Realisasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM seklaster semua memenuhi target dengan capaian 100%, namun realisasi jumlah PPABK intervensi BBPOM di Semarang masih dibawah BBPOM di Surabaya dan sudah diatas BBPOM di Bandung

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Koordinasi bersama dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan terkait

kewenangan pengawasan pangan olahan berupa ikan asin yang mengandung bahan berbahaya

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
 1. Perlu ragam kegiatan yang menarik dalam pelaksanaan kampanye dan penyuluhan pasar agar pedagang dan pembeli lebih tertarik dan tidak lagi menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya
 2. Diberikan pembinaan lebih intensif kepada pedagang yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 100 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK20

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	307.621.000	307.501.932	99,96%	100,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 1. Peningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program
 2. Pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan sesuai dengan target
 3. Pelaksanaan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam rangka keterpaduan keamanan pangan
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 101 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK20

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan survei pasar usulan lintas sektor terlebih dahulu sebelum audiensi	Telah dilakukan survei pasar yang telah diusulkan di 5 Kab/Kota di Jawa Tengah dan terpilih 5 pasar yang memenuhi kriteria untuk diintervensi PPABK	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Penentuan lokus pasar intervensi mengikuti usulan/rekomendasi dari Pemda, namun dari usulan tersebut ada yang belum sesuai dengan kriteria PPABK	Lokus pasar intervensi sudah sesuai dengan kriteria PPABK
2	Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada petugas pasar yang melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.	Telah dilakukan Bimtek dan pendampingan kepada Petugas pasar agar dapat melakukan sampling dan pengujian sederhana secara mandiri terhadap pangan	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Beberapa jenis sampel yang diuji belum tepat penentuan parameter ujiannya	Jenis sampel dan penentuan parameter uji sudah tepat

		yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.				
3	Memberikan masukan kepada pengelola pasar untuk memberikan pembinaan kepada pedagang pasar yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya	Telah diberikan masukan kepada pengelola pasar untuk memberikan pembinaan kepada pedagang pasar yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Belum dilakukan pembinaan oleh pengelola pasar kepada pedagang pasar yang menjual pangan mengandung bahan berbahaya.	Pengelola pasar sudah melakukan pembinaan kepada pedagang yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.
4	Berkomunikasi kepada pengelola pasar untuk mendisplay pangan yang mengandung bahan berbahaya di tempat strategis di lingkungan pasar agar dapat dilihat oleh pedagang dan pengunjung pasar.		Penyediaan display pangan yang mengandung bahan berbahaya direncanakan pada tahun 2024	Tahun 2024	Komunitas pasar belum mengetahui contoh-contoh produk pangan yang mengandung bahan berbahaya	-

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023 dan peraturan pemerintah no 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, maka pada tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian pada jenis pangan yang akan disampling dan diuji sesuai pembagian kewenangan kementerian/lembaga terkait.



Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM Di Semarang

Tabel 102 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	Sangat Baik
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			120,00	Sangat Baik

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik.

IK.21. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 103 Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Target sampel Obat Tahun 2023 (2095

sampel) telah terpenuhi (2117 sampel) dan seluruhnya (100%) telah diperiksa sesuai standar.

Sampel Obat diuji sesuai standar Pedoman Sampling dan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, meliputi pengujian dasar dan pengujian spesifik/unggul. Sampel dapat berasal dari Balai Besar POM dan Loka POM yang berada dalam Regional Semarang. Jumlah sampel obat yang masuk Laboratorium seluruhnya (100%) telah diuji sesuai standar. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 terealisasi 100% telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 120,00% termasuk dalam kategori kriteria capaian sangat baik.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 50 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK21

Berdasarkan grafik terdapat kenaikan realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun terdapat penurunan capaian karena target telah direvisi sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun dan naik kembali di tahun 2023.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 104 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK21

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	▲

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori sangat baik. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK21

Berdasarkan grafik...., dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat Tahun 2023 yang diperiksa menunjukkan hasil yang sama dengan BPOM Surabaya dan sudah mencapai target/standar nasional, kecuali BBPOM di Bandung.

Demikian halnya dengan realisasi Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar tahun 2023 BBPOM di

Semarang dan BBPOM di Surabaya sudah mencapai target nasional, sedangkan BBPOM Bandung belum tercapai.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Semarang pada tahun 2023 adalah sebesar 120 %. Dari 2430 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 3000 sampel yang masuk ke laboratorium seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar memenuhi target yang ditetapkan yaitu 120 % dengan kategori sangat baik. Perbedaan jumlah sampel yang disampling oleh BBPOM di Semarang dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, karena telah diterapkannya sistem regionalisasi laboratorium. Implementasi sistem ini memungkinkan BBPOM di Semarang menerima sampel dari

BBPOM / BPOM / Loka yang berada di wilayah Regional Semarang, atau sebaliknya.

Adanya perencanaan sampling yang telah ditetapkan sesuai pedoman sampling, penjadwalan dan pelaksanaan sampling tepat waktu merupakan faktor terealisasinya pencapaian target indikator kinerja ini. Kompetensi personil yang memadai serta kemudahan akses data registrasi obat sepenuhnya mendukung dalam proses pemeriksaan sampel obat sesuai standar.

Upaya untuk mengatasi kendala – kendala terkait kebutuhan pengujian agar dapat terpenuhi sesuai standar, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Kekurangan reagen/media mikrobiologi serta baku pembanding diatasi dengan sharing dengan UPT lain yang memiliki reagen atau baku pembanding tersebut
2. Pemenuhan kompetensi personil terkait parameter uji unggul laboratorium regional. dilakukan melalui bimtek dengan pendampingan dari P3OMN di BBPOM Semarang atau mengikuti UPT lain yang menyelenggarakan bimtek tersebut
3. Sebagai Balai Regional BBPOM di Semarang mendapatkan transfer alat dari Laboratorium lain untuk memenuhi sarana dan prasarana, diantaranya Spektrofluorometer, Sitotoksik Kabinet, LC-MSMS, serta Ion Chromatography.
4. Mengoptimalkan tambahan alokasi anggaran untuk biaya transfer alat laboratorium, uji fungsi alat serta pelatihan
5. Mengoptimalkan tambahan alokasi anggaran untuk biaya transfer alat laboratorium, uji fungsi alat serta pelatihan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Balai Besar POM di Semarang akan selalu memenuhi target sampel obat yang ditetapkan pada tahun berjalan dan seluruhnya diperiksa sesuai dengan pedoman sampling maupun peraturan perundangan terkait yang berlaku, sehingga Persentase Sampel Obat yang diperiksa dapat terealisasi 100%. Upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Peningkatan kompetensi inspektur secara continuous
2. pemanfaatan data registrasi obat secara terintegrasi dan adanya kemudahan akses akan mendukung pencapaian Persentase Sampel Obat yang diperiksa menjadi lebih optimal, efisien, dan efektif.

3. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2023
4. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015 secara konsisten
5. Melakukan koordinasi antar balai dalam Regional Semarang maupun dengan Ditwas/KMEI dan P3OMN
6. Melaksanakan pelatihan personel terkait pemenuhan parameter uji unggul yang belum bisa dilaksanakan tahun 2023
7. Peningkatan kompetensi inspektur secara continuous, dan pemanfaatan data registrasi obat secara terintegrasi dan adanya kemudahan akses akan mendukung pencapaian Persentase Sampel Obat yang diperiksa menjadi lebih optimal, efisien, dan efektif.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 105 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK21

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	686.368.500	686.053.967	99,95%	120,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan sampling obat yang telah dilaksanakan dan diperiksa sesuai dengan pedoman sampling, serta adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi yang baik dengan laboratorium regionalisasi.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 106 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK21

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
----	-------------	---------------	--	--

		Selesai*	Belum**		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan dan memelihara konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015	Terpenuhi ya jaminan mutu hasil pengujian melalui program kalibrasi peralatan, keikutsertaan pada uji profisiensi/ uji kolaborasi/ uji banding, pelaksanaan verifikasi metode analisa	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Perencanaan program jaminan mutu hasil pengujian	Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015
	Meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara kontinyu	Pendampingan pelatihan parameter uji unggul sesuai konsep baru Regionalisasi oleh P3OMN	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Belum memiliki kompetensi pengujian parameter uji unggul	Peningkatan kompetensi personel laboratorium Regional
	Monitoring ketaatan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling yang telah ditentukan	Melakukan monitoring kesesuaian parameter uji dengan pedoman	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Perencanaan pengujian sesuai dengan	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan

		sampling serta melakukan koordinasi dengan Ditwas/KM El dan P3OMN			Pedoman Sampling	Pedoman Sampling
2	Meningkatkan koordinasi antara pemeriksaan dan pengujian balai Regional Semarang dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling	Koordinasi antara pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling sampai dengan bulan Desember, serta koordinasi antar laboratorium pengujian di Region Semarang	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Perencanaan sampling dan pengujian oleh koordinator region	Koordinasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkelanjutan
3	Peningkatan kompetensi personil terutama terkait pengawasan penandaan/label mencakup nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan kesesuaian dengan desain	Peningkatan kompetensi dilaksanakan antara lain dengan mengikuti sosialisasi/pertemuan	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Updating terkait penandaan/ label terbaru yang disetujui belum sepenuhnya dapat diakses	Diperoleh informasi penandaan/ label serta peraturan terupdate sehingga memperc

	label/penandaan yang disetujui BPOM)	/ forum/ komunikasi terkait pengawasan penandaan/ label yang diselenggarakan oleh Badan POM			melalui shaing folder	epat pemeriksaan dan penetapan hasil yang tepat
--	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------------------------------


▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan interim tahun 2023, persentase realisasi obat yang diperiksa dan diuji seseuai standar tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Agar realisasi obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tetap mencapai target dilakukan melalui upaya penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015 serta koordinasi antar balai dalam Regional Semarang maupun dengan Ditwas/KMEI dan P3OMN.

IK.22. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 107 Realisasi Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B)/2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah sampel})$$

Makanan yang masuk Laboratorium) x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 52 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK22

Berdasarkan grafik terdapat kenaikan realisasi indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun terdapat penurunan capaian karena target telah direviu sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun dan naik kembali di tahun 2023.

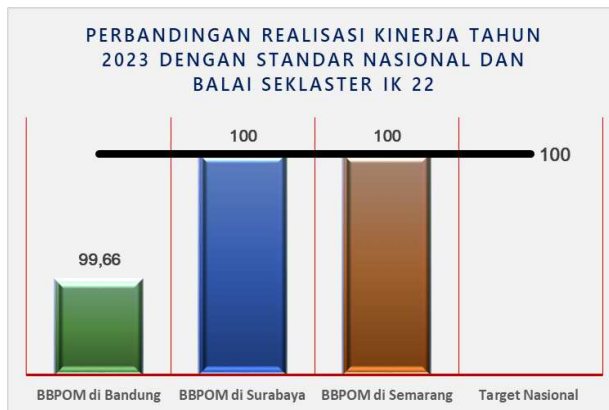
- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 108 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK22

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	▲

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori sangat baik. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi pada tahun 2024 tetap dapat memenuhi target Renstra tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana pengujian agar pengujian dapat diuji sesuai timeline.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK22

Berdasarkan grafik...., dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya sudah mencapai target nasional, sedangkan BBPOM Bandung belum tercapai. Demikian halnya dengan realisasi Persentase sampel Pangan yang diuji sesuai

standar tahun 2023 BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya sudah mencapai target nasional, sedangkan BBPOM Bandung belum tercapai.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

BBPOM di Semarang telah memeriksa dan menguji sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling (100%)

Pemenuhan ini dapat dicapai karena komunikasi yang cukup efektif terkait perencanaan dan realisasi sampling serta uji,. Upaya untuk peningkatan kinerja serta perbaikan masih perlu dilakukan karena sebagai Lab Regional, kapasitas, kemampuan uji dan sarpras masih perlu ditingkatkan, diantaranya :

1. Perlunya pemeliharaan alat secara intensif terutama alat laboratorium utama LCMSMS. Sebagai laboratorium regional, penggunaan LCMSMS yang tinggi sangat berisiko bila mengalami

kerusakan, berakibat tidak dapat menguji sampel dari UPT lain. Banyak sampel pangan dengan parameter pengujian unggul yang menggunakan LCMSMS, juga untuk konfirmasi apabila uji Nitrofurant dan kloramfenikol dengan ELISA positif, sehingga perlu rujuk dengan LCMSMS.

2. Pemeliharaan ICP MS untuk uji logam pada pangan sangat penting, karena di Pedoman Sampling sebagian besar uji logam berat pada pangan menjadi parameter uji wajib. Adanya kerusakan eksternal pump pada ICP MS yang memerlukan investigasi kerusakan di Jakarta, dapat menghambat penyelesaian uji, karena saat ini baru memiliki 1 unit ICP MS
3. Alat laboratorium yang sudah berusia lebih dari 10 tahun performanya menurun, bahkan sering mengalami kerusakan. Sebagai contoh HPLC yang integrated dengan PC lama, sering mengalami kendala dan menghambat pengujian. Penggantian dengan PC baru tidak kompatibel, sementara HPLCnya masih belum dapat diberikan status rusak berat untuk pengajuan pengadaan HPLC baru
4. Dalam rangka regionalisasi laboratorium, banyak parameter uji yang baru pada sampel pangan yang menyebabkan pengujian mengalami kesulitan dalam mendapatkan kondisi yang optimal. Selain itu beberapa instruksi pusat untuk menguji komoditi terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat, juga cukup berpengaruh terhadap pengujian sampel rutin, seperti misalnya pengujian BPA pada AMDK dan uji EG DEG pada pangan dan BTP

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman sampling 2023 serta mengintensifkan komunikasi dengan UPT lain berkaitan dengan pelaksanaan sampling dan pengiriman sampel uji
2. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO IEC 17025 2005 dan ISO 9001 2015 secara konsisten
3. Mengusulkan kenaikan anggaran pemeliharaan alat, anggaran pengadaan suku cadang serta pengadaan alat laboratorium yang diperlukan
4. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi personil guna pemenuhan parameter uji unggul yang belum dapat dilaksanakan sebelumnya

- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 109 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK22

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	367.506.500	367.249.823	99,93%	120,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 110 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK22

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi			Timeline

1	Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015.	Pendampingan pelatihan parameter uji unggulan sampel pangan sesuai konsep baru Regionalisasi oleh P3OM, diantaranya : PK residu kloramfenikol, sulfonamida, golongan quinolon, kloramfenikol, PK metabolit Nitrofurantoin, dan PK akrilamid, yang kesemuanya secara LCMSMS, serta bimtek uji konfirmasi gelatin porcine	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Belum memiliki kompetensi pengujian parameter uji unggulan	Peningkatan kompetensi personel laboratorium Regional
2	Meningkatkan koordinasi dengan Balai Pengujian dalam satu regional pada program Regionalisasi Laboratorium Badan POM	Menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Reg Lab Region Semarang bersama	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Perencanaan sampling dan pengujian oleh koordinator region	Koordinasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara

		seluruh anggota region luring maupun daring secara berkala				berkelanjutan
--	--	------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan interim tahun 2023, persentase realisasi pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Agar realisasi pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tetap mencapai target dilakukan melalui upaya penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2015 serta koordinasi antar balai dalam Regional Semarang maupun dengan P3OMN dan Ditwas Peredaran Pangan Kedeputan 3.



Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM Di Semarang

Tabel 111 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 7


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	84,06	107,76	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			107,76	Sangat Baik

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 107,76 dengan kriteria **Sangat Baik**.

IK.23. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 112 Realisasi Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	84,06	107,76	

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di tahun 2023 merupakan indikator yang harus dicapai oleh BBPOM di Semarang. Target persentase keberhasilan penindakan di BBPOM di Semarang pada tahun 2023 adalah sebesar 78%. Realisasi persentase keberhasilan penindakan BBPOM di Semarang tahun 2023 adalah 84,06 % dengan capaian 107,76% dan kriteria SANGAT BAIK.

Tahapan Proses Penyidikan yang dilakukan dalam perhitungan capaian keberhasilan penindakan, yaitu:

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
2. Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (Serah Tahap I)
3. Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21)
4. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Serah Tahap II)

Realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 107,76% dengan kriteria SANGAT BAIK menunjukkan bahwa antara penyusunan target dengan realisasi telah dilaksanakan / tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 54 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK23

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa target dan realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan meningkat dari tahun 2020 – 2022. Peningkatan persentase realisasi menunjukkan bahwa terjadi continuous improvement dari tahun 2020 - 2022.

Ada perbaikan – perbaikan pada proses investigasi dan penyidikan serta jalinan kerja sama dengan lintas sektor Criminal Justice System (CJS) yang semakin kompak/erat sehingga kegiatan penindakan dan pencapaian target bisa menjadi lebih baik. Namun demikian pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi keberhasilan penindakan dikarenakan pada tahun 2022 realisasi mencapai 122,67% sehingga kriteria menjadi TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Realisasi pada tahun 2022 ini yang menjadikan dasar agar pencapaian target penindakan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sehingga dapat dihasilkan realisasi 107,76 dengan kriteria SANGAT BAIK

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK23

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00	84,06	95,52	▲

Sasaran strategis Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang yang ditetapkan tahun 2023 menggunakan parameter indikator yang sama dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Realisasi Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang tahun 2023 adalah 84,06% melampaui target jangka menengah dalam Renstra

Badan POM Tahun 2020-2024 yaitu 88,00%. Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan menaikkan target di tahun 2024 menjadi 88%.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK23

Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang dibandingkan

BBPOM seklaster yaitu BBPOM di Surabaya sebesar 71,17% dan BBPOM di Bandung sebesar 82,81%, menempati urutan tertinggi yaitu 84,06%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 77% maka BBPOM di Semarang telah melampaui target nasional tersebut.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja**

Terdapat beberapa peningkatan kemampuan, peluang, dan kendala yang ditemui selama melakukan kegiatan penindakan di tahun 2022 yang berpengaruh kepada tercapainya kinerja, antara lain:

1. Tercapainya predikat SANGAT BAIK oleh BBPOM di Semarang tak lepas dari kinerja personel yang selalu berusaha untuk memenuhi target yang telah ditetapkan
2. Perkara *carry over* tahun 2022 yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 4 perkara turut membantu tercapainya target keberhasilan tersebut. Adapun perhitungan capaian kinerja jika perkara *carry over* tersebut tidak terselesaikan, maka pencapaian kinerja terhitung sebesar 103,49%. Tambahan penyelesaian perkara *carry over* tahun 2022 sebanyak 4 perkara menyebabkan capaian kinerja naik menjadi 107,76%. Dari sini dapat dilihat, bahwa, penyelesaian perkara *carry over* memberikan kontribusi sebesar 4,27% capaian kinerja.

3. Hubungan yang semakin baik dengan lintas sektor yang tergabung dalam *Criminal Justice System*, yaitu Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Rupbasan Kelas I Semarang serta Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah mengakibatkan turut mendukung penyelesaian proses penyidikan dan pemberkasan sehingga dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat sehingga target dapat tercapai.
 4. Tata Kelola persuratan yang telah mulai menggunakan system digital salah satunya dengan program e-berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung semakin mempercepat bagi PPNS dalam permintaan izin maupun penetapan penggeledahan dan penyitaan sehingga penyelesaian pemberkasan menjadi lebih cepat.
 5. Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga pola distribusi Obat dan Makanan mengalami perubahan dari distribusi secara konvensional yang mengharuskan transaksi dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli menjadi online baik secara langsung antara penjual dan pembeli maupun melalui *e-commerce*. Hal ini mengakibatkan kegiatan distribusi obat dan makanan illegal semakin sulit untuk dilacak, sehingga perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang Teknologi Informasi dan juga sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengungkapan jaringan distribusi Obat dan Makanan illegal *online* tersebut melalui *cyber patrol*.
 6. Keterbatasan kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan menyebabkan potensi pelaku tindak pidana obat dan makanan tidak hadir pada tahapan proses penyidikan dapat berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 7. Pencabutan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memerlukan waktu untuk penyesuaian bagi PPNS untuk menerapkan aturan baru dalam penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.
- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
Kelompok Substansi Penindakan akan terus berupaya agar kerja sama dengan lintas sektor *Criminal justice System* semakin optimal, sehingga proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan

oleh PPNS Balai Besar POM di Semarang dapat berjalan dengan lancar. Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berimbas pada pergeseran pola distribusi obat dan makanan ilegal secara online melalui media sosial, e-commerce dll, petugas Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Semarang selalu meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang IT serta melengkapi sarana dan prasarana untuk mengungkap pelanggaran distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara *online*.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 114 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK23

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.136.798.000	1.136.375.464	99,96%	107,76	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023 yaitu capaian kinerja sebesar 107,76% disbanding dengan realisasi anggaran 99,96%. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Target perkara Balai Besar POM di Semarang adalah 10 perkara dan tercapai sebanyak 10 perkara dengan capaian persentase keberhasilan penindakan 107,76%. Namun demikian ada 1 perkara tahun 2018, 1 perkara tahun 2021, dan 4 perkara tahun 2023 yang belum dapat diselesaikan sampai Serah Tahap II. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menghindari agar tidak terjadi *carry over* perkara serta kinerja tahun berjalan lebih optimal perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi kerja sama lintas sektor dengan CJS agar proses penyidikan berjalan lancar salah satunya terkait bantuan penangkapan dan penahanan apabila pelaku tindak pidana tidak kooperatif atau tidak memenuhi panggilan pada saat

dilakukan pemeriksaan atau proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

2. Proses investigasi baik melalui daring maupun luring lebih mendalam sehingga informasi mengenai karakteristik dari pelaku tindak pidana obat dan makanan dapat lebih akurat
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor selain CJS seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Layanan Sambungan Telepon.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 115 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK23

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga pola distribusi Obat dan Makanan mengalami perubahan dari distribusi secara konvensional yang mengharuskan transaksi dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli menjadi online baik secara langsung antara penjual dan pembeli maupun melalui e-commerce. Hal ini mengakibatkan	Kemampuan personel dalam melakukan patroli siber sangat diperlukan mengingat saat ini distribusi obat dan makanan ilegal banyak dilakukan secara <i>online</i>	Pelatihan patrol siber yang melibatkan semua personel penindakan	Desember 2024	Distributor obat dan makanan ilegal online masih aktif menjual produk ilegal	Distributor obat dan makanan ilegal online masih aktif menjual produk ilegal

	kegiatan distribusi obat dan makanan illegal semakin sulit untuk dilacak, sehingga perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang Teknologi Informasi dan juga sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengungkapan jaringan distribusi Obat dan Makanan illegal <i>online</i> tersebut melalui <i>cyber patrol</i> .					
3	Proses investigasi baik melalui daring maupun luring lebih mendalam sehingga informasi mengenai karakteristik dari pelaku tindak pidana obat dan makanan dapat lebih akurat.	Latar belakang pelaku tindak pidana obat dan makanan dapat diketahui lebih lengkap			Fokus investigasi pada aktifitas dan pemilik peroduksi dan atau peredaran obat dan makanan ilegal	Fokus bertambah pada latar belakang pemilik, termasuk aktifitas lain dan keluarga, serta hal lain yang bisa berpengaruh terhadap proses penyidikan apabila sudah dilakukan

						operasi penertiban
4	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor selain CJS seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Layanan Sambungan Telepon	Data berupa Alamat, nomor HP dapat diketahui dengan koordinasi dengan lintas sektor selain CJS			Apabila ditemukan data berupa nomor HP, plat nomor petugas kesulitan melakukan klarifikasi kepemilikan dan posisi pemilik atau TKP tindak pidana obat dan makanan	Apabila ditemukan data berupa nomor HP atau plat nomor bisa dilakukan permohonan informasi ke lintas sektor terkait
	Mengefektifkan sumber data dari informan	Komunikasi penjangkaran informasi, telah dilakukan dengan baik dimana bisa menghasilkan temuan			Informasi belum akurat	Informasi lebih akurat

		besar, termasuk penelusuran lanjutan dari informasi yang diberikan informan				
	Mengefektifkan sumber data siber	Penelusuran siber dilakukan rutin dengan jumlah minimal 30 akun di takedown dan 3 akun di profiling yang berpotensi bermuara ke penindakan			Informasi dari patrol siber masih minim	Informasi dari patrol siber lebih optimal
	Belum memiliki alat scanner kapasitas besar (50 lembar sekali scan)	Sangat diperlukan untuk upload berkas perkara dalam e-berpadu	Pengajuan alat	Desember 2024	Scan dilakukan manual satu per satu	Scan dilakukan manual satu per satu

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2023 dan interim triwulanan tahun 2023, dapat diketahui bahwa meskipun target kinerja penindakan dapat tercapai namun demikian ada perkara *carry over* yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab PPNS Balai Besar POM di Semarang untuk diselesaikan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi kerja sama dengan lintas sektor baik CJS maupun lintas sektor lain seperti Direktorat

Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Layanan Sambungan Telepon agar penyelesaian perkara tindak pidana obat dan makanan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

CAPAIAN LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SS8

Terwujudnya tatakelola Pemerintahan BBPOM Di Semarang yang optimal

Tabel 116 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 8


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB	88,00	95,26	108,25	Sangat Baik
Nilai AKIP	80,50	80,56	100,07	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			104,16	Sangat Baik

Dari Hasil evaluasi Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Semarang diperoleh Indeks RB Balai Besar POM di Semarang di Tahun 2023 memperoleh Nilai 95,26 melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,00. Dengan Capaian 108,25 masuk kriteria **sangat baik**.

IK.24. Indeks RB BBPOM di Semarang

- Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 117 Realisasi Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
24	Indeks RB UPT	88,00	95,26	108,25	

Berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada BBPOM di Semarang ,Indeks RB Balai Besar POM di Semarang di Tahun 2023 memperoleh capaian 108,25 dengan kategori **sangat baik**. Dengan Total Nilai 95,26 melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,00.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 56 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK24

Berdasarkan grafik di atas realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2020, 2021 dan 2022, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan realisasi dan capaian kinerja dibandingkan dengan target.

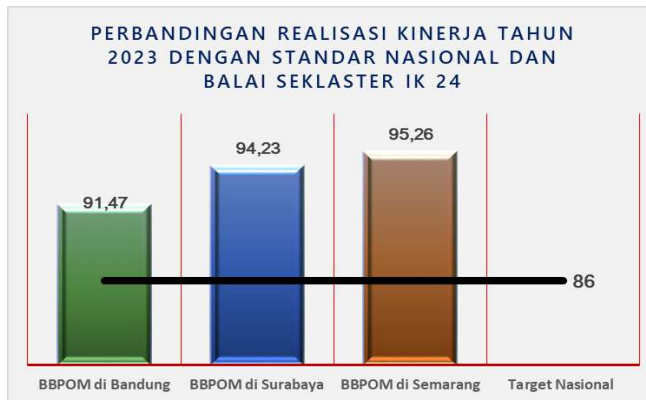
- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK24

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
24	Indeks RB UPT	96,26	95,26	98,96	▲

Realisasi Indeks RB Balai Besar POM Semarang tahun 2023 **belum mencapai** target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK24

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Realisasi dari ketiga balai yang diperbandingkan berada di atas target nasional BPOM.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pembangunan ZI di Balai Besar POM di Semarang, diperoleh hasil bahwa :

1. BBPOM di Semarang telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB tahun 2020. Pada tahun 2023 telah memenuhi persyaratan minimal mempertahankan predikat WBK baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil.
2. Sistem pengukuran kinerja dan operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi. Penerapan SOP juga telah selaras dengan peta bisnis proses dan telah terdapat inovasi yang seluruhnya terintegrasi dan dapat diakses dalam 1 portal inovasi, yaitu Lawang Sewu <http://lawangsewu.bbpomsemarang.id>.
3. BPOM di Semarang telah mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi untuk kebutuhan internal maupun eksternal yang memudahkan akses masyarakat untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan berbagai informasi obat dan makanan, seperti:
 - a. Inovasi GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya), merupakan inovasi dengan melakukan intervensi kepada pedagang UMKM untuk tidak menggunakan bahan berbahaya sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

- b. Inovasi LAYANAN CEKATAN (Layanan Pengecekan Laboratorium Untuk Masyarakat dan Sekolah) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas sekolah pada keamanan pangan.
 - c. Pemberian informasi dan konsultasi dilakukan melalui berbagai inovasi yaitu:
 4. Inovasi LAKONE SEKTI (LAYanan KONSultasi Efektif Sertifikasi registrasi obat dan makanan).
 5. Inovasi SOS (Sinai Online Sareng).
 6. Inovasi MELON MANIS (Melalui Online Memberikan Informasi)
 - d. Inovasi aplikasi ADITS untuk pelaksanaan anggaran, merupakan inovasi terkait pengendalian dari resiko pagu minus, sehingga meminimalkan terjadinya anggaran pagu minus, termasuk pemantauan kesesuaian penggunaan anggaran.
 - e. Inovasi SIPERAN (Sistem Informasi Permintaan Persediaan BMN di Lingkungan BBPOM di Semarang) merupakan inovasi terkait pengendalian resiko BMN.
 - f. Inovasi survei Beritahu Integritas Petugas (Si BERGAS), yaitu survey kepada sarana yang diperiksa oleh BBPOM di Semarang terkait integritas petugas.
4. Inovasi pelayanan publik BBPOM di Semarang yaitu Inovasi QR Code Info Registrasi yang menyediakan informasi terkait persyaratan registrasi produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan bagi para konsumen telah direplikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,76 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,86 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 5 (syarat 2,5) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sesuai rekomendasi Tim Penilai Internal (TPI) sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan ZI sesuai dengan rencana serta melakukan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjuti hasil monitoring evaluasi pada seluruh area perubahan.
2. Melakukan evaluasi dan tidak lanjut terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi pemerintah dan bidang pelayanan publik sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Melakukan penyesuaian jenis pelayanan pada Standar Pelayanan BBPOM di Semarang sesuai dengan peraturan BPOM nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan POM.
4. Meningkatkan komitmen dan kepatuhan dalam penyampaian dokumen hasil pembangunan ZI dan kelengkapannya secara tepat waktu.
5. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja sesuai dengan karakteristik unit serta dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
6. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 119 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK24

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	76.533.000	76.532.300	100,00%	108,25	Efisien

Berdasarkan penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja dapat diketahui dari tabel di atas bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB. Penggunaan Sumber Daya untuk pemenuhan Target output dan target indikator tetap dapat tercapai karena semua kegiatan dilakukan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa hal yang dilakukan selama pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI, namun belum dilaksanakan pada seluruh area perubahan. Dokumen monitoring dan evaluasi belum menunjukkan bahwa seluruh kegiatan Pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.
2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi pemerintah dan bidang pelayanan publik sehingga belum terlihat adanya perbaikan secara berkelanjutan.
3. Belum dilakukan penyesuaian jenis layanan pada Standar Pelayanan BBPOM di Semarang dengan peraturan BPOM nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan POM.
4. Kurangnya komitmen dan kepatuhan dalam penyampaian dokumen hasil pembangunan ZI serta kelengkapannya

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 120 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK24

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegritas	Seluruh Jajaran di BBPOM di Semarang akan terus berkomitmen dalam pembangunan ZI untuk mewujudkan birokrasi yang mampu	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Fasilitas pelayanan kelompok rentan belum ada assesment	Assesmen fasilitas pelayanan kelompok rentan mendapatkan nilai 100 dengan kategori terbaik dan menjadi unit percontohan

		memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegritas : dengan tetap tidak melakukan KKN, melengkapi fasilitas layanan agar pengguna merasa aman dan nyaman, terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dll				
2	Meningkatkan komitmen terhadap pengawasan Obat dan Makanan secara lebih mendalam agar mampu melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan.	Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan di momen momen tertentu dan focus terhadap isu terkini	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2022 yaitu 75,08	Terjadi Peningkatan 0,81 poin Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu 75,99

3	Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan stakeholder sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan	Melakukan penyesuaian jenis pelayanan pada Standar Pelayanan BPOM di Semarang sesuai dengan peraturan BPOM nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan POM.	closed	closed	Pelayanan Masih manual	Munculnya inovasi yang mempermudah pengguna layanan : a. Inovasi LAYANAN CEKATAN (Layanan Pengecekan Laboratorium Untuk Masyarakat dan Sekolah) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas sekolah pada keamanan pangan. b. Pemberian informasi dan konsultasi dilakukan melalui berbagai inovasi yaitu: - Inovasi LAKONE SEKTI (LAYANAN KONSultasi Efektif Sertifikasi registrasi obat dan makanan). - Inovasi SOS (Sinai Online Sareng).
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						- Inovasi MELON MANIS (Melalui Online Memberikan Informasi)
4	Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegritas serta mendorong berbagai inovasi di Unit Kerja dan diukur secara berkala efektifitasnya	Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja sesuai dengan karakteristik unit serta dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Belum ada portal khusus untuk menampung seluruh informasi yang dapat diakses seluruh pegawai	Sistem pengukuran kinerja dan operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi. Penerapan SOP juga telah selaras dengan peta bisnis proses dan telah terdapat inovasi yang seluruhnya terintegrasi dan dapat diakses dalam 1 portal inovasi, yaitu Lawang Sewu http://lawan.gsewu.bbpo.msemarang.id .

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2020-2022, Realisasi Indeks RB terjadi peningkatan maka Inspektorat melihat hal tersebut telah melakukan revaluasi kembali terhadap target Indeks RB untuk akhir tahun Renstra tahun 2024. Harapannya di tahun 2024 pencapaian Indeks RB akan semakin lebih baik lagi.

IK.25. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.11.23.394 tanggal 17 November 2023 dan Nomor PI.04.7.01.24.06 tanggal 2 Januari 2024.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - 2) Menilai tingkat implementasi;
 - 3) Menilai tingkat akuntabilitas;
 - 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - 5) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periodesebelumnya.
3. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek.
Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Semarang dilaksanakan melalui pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi. Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023 dapat dikategorikan A (Memuaskan)

yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:


Tabel 121 Hasil Evaluasi SAKIP 2022-2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	19.44	20.64
2.	Pengukuran Kinerja	24	18.48	18.96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9.48
4.	Evaluasi Internal	20	16.80	15.80
5.	Capaian Kinerja	20	16.62	15.67
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,82	80.55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Sumber : surat Plt Inspektur Utama No B-PI.04.7.02.24.220 tanggal 12 Februari 2024

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 122 Realisasi Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
25	Nilai AKIP UPT	80,50	80,56	100,07	

Berdasarkan surat Plt Inspektur Utama No B-PI.04.7.02.24.220 tanggal 12 Februari 2024, Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Semarang tahun 2023 adalah 80,56 dengan kategori A, nilai tersebut merupakan total dari 5 (lima) Komponen, yaitu

1. Perencanaan Kinerja sebesar 20,64
2. Pengukuran Kinerja sebesar 18,96
3. Pelaporan Kinerja sebesar 9,48
4. Evaluasi Internal sebesar 15,80
5. Capaian Kinerja sebesar 15,68

Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Semarang tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu **100,07%** dengan kategori **Sangat Baik**.

- **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 58 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK25

Berdasarkan grafik dan table hasil LKE SAKIP diatas terdapat peningkatan dari 2020-2022, tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan 0.27 poin. Ini disebabkan karena terjadi peningkatan di komponen Perencanaan dan pengukuran kinerja, tetapi pada komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja terjadi penurunan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 123 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK25

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
25	Nilai AKIP UPT	84,07	80,56	95,82	▲

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, Realisasi Nilai AKIP tahun 2023 akan mencapai target Renstra tahun 2024. Dengan upaya perbaikan di Evaluasi internal dan penyempurnaan di Perencanaan, pengukuran dan pelaporan diharapkan di tahun 2024 akan mencapai target jangka menengah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK25

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2023 di klaster I yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya, kedua BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang di posisi terendah. Realisasi dari ketiga balai yang diperbandingkan masih berada dibawah target nasional BPOM.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun sebelumnya melalui beberapa

a. Perencanaan Kinerja

Proses perencanaan kinerja Balai Besar POM di Semarang tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dilaksanakan melalui reviu Renstra paruh waktu dan penyusunan kertas kerja penetapan terget untuk penetapan RKT tahun 2024. Proses reviu tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penetapan target kinerja yang lebih reasonable, sesuai dengan kondisi pengawasan di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- 1) Kertas kerja penetapan target telah disusun untuk mendukung target setiap indikator sasaran kinerja telah ditetapkan, berdasarkan kertas kerja yang telah disusun, terdapat beberapa hal yang dapat dilengkapi seperti menyajikan hasil analisa perubahan target (kenaikan) per periode dan memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya seperti data SIPT untuk indikator yang berhubungan dengan pengawasan dan pengujian.

2) Terdapat perbedaan target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 antara dokumen Reviu Renstra Paruh Waktu, PK, RAPK, dan PK Kepala Balai yang telah diformalkan, yaitu:

No	Reviu Renstra Paruh Waktu	Reviu Renstra Paruh Waktu	Pada PK/RAPK/PK Kepala Balai
	Indikator	Target	Target
Tahun 2023			
1	Indeks pelayanan publik	4,51	4,4
2	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	22	21

b. Pengukuran

Balai Besar POM di Semarang telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang setiap bulan dan triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses pengukuran kinerja terdapat kelemahan terkait data kinerja yang belum dapat diandalkan, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan data target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

a.) Antara dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, antara lain:

Indikator	Dokumen	Realisasi
TW I 2023		
Persentase makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar	RHPK	23,13
	Laporan Evaluasi Internal	22,77
	Laporan Kinerja Interim	22,77

b.) Antara dokumen Aplikasi Simetris dan Laporan Evaluasi Internal:

Indikator	Dokumen	Target	Realisasi
TW III 2023			
Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	Simetris	4,40	4,62
	Laporan Evaluasi Internal	4,51	4,62

c. Pelaporan

Upaya perbaikan penyajian data dan informasi dalam Laporan Kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan. Laporan Kinerja yang telah disusun menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya dengan harapan laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan perencanaan. Untuk terus mendukung upaya yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat hal-hal yang dapat dioptimalkan antara lain:

- 1) Terdapat ketidakselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance);
- 2) Proses monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi perbaikan kinerja belum dilaksanakan secara berkesinambungan, rekomendasi perbaikan kinerja dalam Lapkin tahunan 2022 belum dievaluasi dalam rapat perencanaan tahun 2023 atau Laporan Evaluasi Internal periode berikutnya dengan harapan dapat berdampak langsung pada perbaikan realisasi capaian kinerja.

d. Evaluasi Kinerja Internal

Balai Besar POM di Semarang telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulanan dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta kendala hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- 1) Laporan evaluasi internal sudah disusun secara periodik namun belum dimanfaatkan secara parsial dalam proses perbaikan sistem evaluasi kinerja karena adanya kondisi sebagai berikut:
 - a. Belum dilengkapi dengan kertas kerja penghitungan capaian indikator;
 - b. Penyajian permasalahan/kendala/hambatan belum secara spesifik menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja sehingga rekomendasi/rencana aksi yang akan

dilaksanakan pada periode berikutnya sulit untuk disimpulkan keberhasilannya;

- 2) Belum seluruh rekomendasi/rencana aksi pada laporan kinerja disusun berdasarkan hasil analisis ketercapaian atau ketidaktercapaian indikator kinerja, kendala/hambatan serta pencapaian target. Terdapat target yang belum tercapai namun rekomendasi/rencana aksi dinilai selesai difindaklanjuti, belum terdapat upaya untuk menyusun rencana aksi lain yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian target yang lebih optimal;
- 3) Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja. Seperti pemanfaatan, pengungkapan dan penyajian data SIPT dalam kertas kerja sebagai data dukung capaian kinerja terutama untuk indikator kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian.

e. Capaian Kinerja

1) Output

- a) Realisasi kinerja output tahun 2022 tercapai seluruhnya (100 %).
- b) Perbandingan capaian kinerja output yang sama pada tahun 2022 dan 2021 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) capaian kinerja output (93,7%) lebih baik dibanding tahun 2021.

2) Outcome

- a) Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 23 (dua puluh tiga) dari 29 (dua puluh sembilan) (79,31%) indikator kinerja dapat tercapai.
- b) Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) capaian kinerja outcome (64,28%) lebih baik dibanding tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, early warning system yang diharapkan dapat memanfaatkan proses evaluasi internal belum sesuai dengan yang diharapkan.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasi kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyempurnakan kertas kerja penetapan target yang telah disusun menggunakan basis data yang mampu dipertanggungjawabkan, perhitungan data/justifikasi yang memadai (valid, komprehensif dan konsisten) serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya;
 - b. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra dengan dokumen perencanaan jangka pendek seperti Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) melalui kegiatan kaji dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
2. Pengukuran Kinerja
- a. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi dalam dokumen perencanaan dan capaian kinerja.
 - b. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik;
3. Pelaporan Kinerja
- a. Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance);
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.
 - c. Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya.
4. Evaluasi Kinerja Internal
- a. Melengkapi laporan evaluasi kinerja dengan Kertas Kerja data pendukung perhitungan capaian kinerja, seperti pemanfaatan, pengungkapan dan penyajian data SIPT dalam kertas kerja untuk mendukung penyajian data capaian kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian.
 - b. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:
 - 1) Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja;
 - 2) Rekomendasi/rencana aksi yang memadai dan berdampak langsung dalam rangka perbaikan kinerja;
 - 3) Proses penetapan rekomendasi/rencana aksi lain jika berdasarkan hasil penilaian disimpulkan bahwa

rekomendas/rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya belum berhasil meningkatkan realisasi capaian kinerja.

- 4) Tindaklanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode selanjutnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi kinerja;
- 5) Memastikan seluruh tahapan tersebut diatas sebagai proses evaluasi kinerja yang dilaksanakan berkala dan berkesinambungan.

5. Capaian Kinerja

Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 124 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK25

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	5.415.000	5.414.420	99,99%	100,07	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk meningkatkan nilai Akip di tahun 2023 telah dilakukan:

1. Membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya, agar data yang digunakan dalam pengukuran kinerja bersifat andal sehingga diperoleh data capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Pengajuan Revisi data Simetris Selama 3 TW dan perbaikan seluruh Capaian RAPK dan Laporan-Laporan Kinerja
 3. Melakukan Survei Manajemen Kinerja untuk Kepala Balai, Ketua tim, dan Tim Kinerja
 4. RHPK setiap bulan dimonitoring capaian sebelum dan bulan berjalan
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 125 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK25

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<p>Perencanaan Kinerja</p> <p>a Menyempurnakan analisis SWOT yang mencakup seluruh isu strategis terkini pada reuiu Renstra selanjutnya (dalam hal terdapat reuiu Renstra);</p> <p>b Menyelaraskan target kinerja antara kepala unit sampai dengan level individu serta menyelaraskan rencana kerja individu dari satu cascading indikator yang sama antara satu pegawai dan pegawai lainnya.</p>	<p>1. Analisis SWOT dilaksanakan untuk Renstra 2025-2029 dan reuiu renstra di Renstra 2025-2029</p> <p>2. Menyusun Casecading Tahun 2023 dengan menyelaraskan MPH dan SKP/PK dari setiap pegawai</p>	<i>closed</i>	<i>closed</i>	<p>1. SWOT belum pernah di update</p> <p>2. Belum ada Cascading</p>	<p>1. SWOT update untuk Renstra 2025-2029</p> <p>2. Cascading Updating</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan basis data yang andal sehingga diperoleh data capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>1. RHPK setiap bulan dimonitoring capaian sebelum dan bulan berjalan</p> <p>2. Membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data</p>	<i>closed</i>	<i>closed</i>	<p>Kibas Rambut hanya untuk inputan data</p>	<p>Kibas Rambut untuk monitoring data bulanan</p>

		<p>capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya, agar data yang digunakan dalam pengukuran kinerja bersifat andal sehingga diperoleh data capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>3. Pengajuan Revisi data Simetris Selama 3 TW dan perbaikan seluruh Capaian RAPK dan Laporan-Laporan Kinerja</p>				
3	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a Menjelaskan dasar/latar belakang perubahan aktivitas berupa penambahan indikator pada laporan kinerja interim/laporan kinerja</p> <p>b Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada</p>	<p>1. Penambahan uraian terkait Indikator Kinerja Tambahan pada BAB II</p> <p>2. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja</p>	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Kibas Rambut hanya untuk inputan data	Kibas Rambut untuk monitoring data bulanan

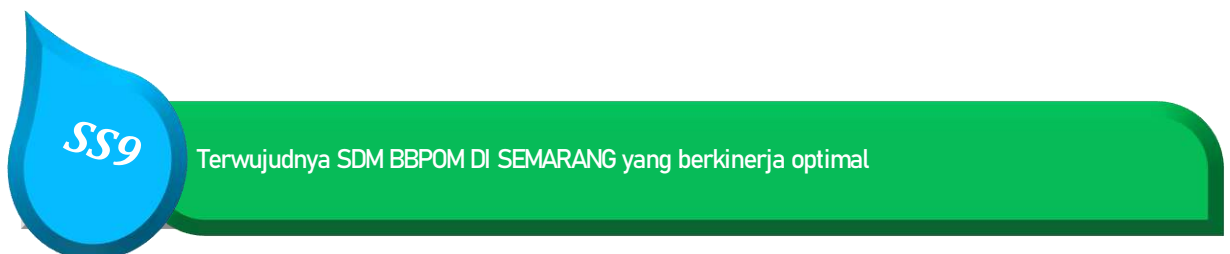
	<p>laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja</p>	<p>untuk perbaikan/peningkatan kinerja,</p> <p>kami membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. serta Pengajuan Revisi data Simetris Selama 3 TW dan perbaikan seluruh Capaian RAPK dan Laporan-Laporan Kinerja</p>				
4	<p>Evaluasi Internal</p> <p>Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan BBPOM di Semarang.</p>	<p>Untuk Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan</p>	<i>closed</i>	<i>closed</i>	<p>Kibas Rambut hanya untuk inputan data</p>	<p>Kibas Rambut untuk monitoring data bulanan</p>

		BBPOM di Semarang, kami akan membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut (TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya serta Pengajuan Revisi data Simetris Selama 3 TW dan perbaikan seluruh Capaian RAPK dan Laporan-Laporan Kinerja				
5	<p>Capaian Kinerja</p> <p>a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala;</p> <p>b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode</p>	Membuat Dashboard dan Kertas Kerja secara online untuk penyelarasan data capaian kinerja antara dokumen RHPK dengan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Keberhasilan dan Kegagalan, Upaya/Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Tindak lanjut	<i>closed</i>	<i>closed</i>	Kibas Rambut hanya untuk inputan data	Kibas Rambut untuk monitoring data bulanan

	<p>pengukuran (tahunan);</p> <p>c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya;</p> <p>d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2021</p>	<p>(TL) atas Upaya/RTL bulan/TW sebelumnya, untuk Meningkatkan pemantauan, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja dan Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya</p> <p>serta Pengajuan Revisi data Simetris Selama 3 TW dan perbaikan seluruh Capaian RAPK dan Laporan-Laporan Kinerja</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan evaluasi keselarasan data secara berkala agar data yang di sampaikan merupakan data yang akurat dan dapat diandalkan



Tabel 126 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
-------------------	--------	-----------	---------	----------

Indeks Profesionalitas ASN	86,00	91,17	106,01	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			106,01	Sangat Baik

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 106,01% dengan kriteria **Sangat Baik**.

IK.26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesional ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :

- Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot 25 %.
- Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%.
- Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN pada Balai Besar POM di Semarang dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari :

- Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir pegawai;
- Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM);
- Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;
- Dimensi Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 127 Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00	91,17	106,01	●

Pada tahun 2023 realisasi Indeks Profesional ASN UPT sebesar 91,17 dan mendapatkan penghargaan peringkat kedua dari seluruh UPT Badan POM. Jika dibandingkan dengan target 86 , capaian IPASN sebesar 106,01% dengan kategori **Sangat Baik**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 60 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK26

Terdapat peningkatan capaian Indeks Profesionalitas ASN yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2020 hingga 2022, hal ini dikarenakan ada perubahan cara pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sehingga terjadi tren positif pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 128 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK26

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	91,18	91,17	99,99	▲

Realisasi IP ASN tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024, meskipun demikian realisasi tersebut harus ditingkatkan supaya Target Renstra pada tahun 2024 tetap dapat tercapai.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi IP ASN Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang, sedangkan yang terendah adalah Balai Besar POM di Bandung.

Gambar 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK26

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Terdapat Pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan sebanyak 4 orang selama tahun 2016 s/d 2021 dan nilai ini akan terakumulasi sampai dengan akhir tahun renstra 2024.
2. Beberapa pegawai yang masih dalam proses Tugas Belajar atau Ijin Belajar S1.

Nilai IP ASN dipengaruhi oleh Dimensi Kualifikasi (pendidikan) pegawai yang disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki dengan bobot 25%. Dimensi Kinerja dengan bobot 30%. Dimensi Kompetensi dengan bobot 40%, dan Dimensi Disiplin dengan bobot 5%.

Hasil yang diperoleh Balai Besar POM di Semarang adalah

nilai kompetensi	: 21,30
nilai kompetensi	: 39.83
nilai kinerja	: 25.04
nilai disiplin	: 5

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : Pelaporan Disiplin Pegawai yang mengikuti Apel Pagi Nasional / Upacara, monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian, Penerapan Absen Ter-Cepat dan Ter-Lambat setiap bulan.
2. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
3. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
4. Dengan adanya peningkatan kompetensi teknis sebanyak 20 JP, maka setiap triwulan membuat rekapan capaian JP pengembangan kompetensi untuk mengingatkan pegawai yang capaian JP nya belum tercapai, agar segera meningkatkan capaian JP-nya sebanyak 20 JP. Yaitu dengan mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (pelatihan teknis, manajerial, bimbingan teknis dan workshop) baik yang diselenggarakan oleh PPSDM melalui aplikasi ideas atau pengembangang kompetensi mandiri. Sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 129 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK26

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	278.997.000	278.868.224	99,95%	106,23	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai, Peningkatan Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural TA 2023.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 130 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK26

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Membuat usulan fasilitasi kepada Pusat Pengembangan SDM POM terkait pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional	Membuat usulan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	<i>closed</i>	<i>closed</i>	2 (dua) orang belum mengikuti diklat	2 (dua) orang telah lulus melaksan akan diklat fungsional Analisis SDM Aparatur
2	Membuat usulan fasilitasi kepada Pusat Pengembangan SDM POM terkait pendidikan dan pelatihan jabatan struktural	Membuat usulan diklat struktural	<i>closed</i>	<i>closed</i>	2 orang belum mengikuti diklat struktural	1 orang lulus diklat pim III, 1 orang terjadwal diklat pim II tahun 2024
3	Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasive kepada pegawai agar berkenan meningkatkan kualifikasi Pendidikan diberikan penugasan untuk mengikuti tugas belajar/ijin belajar.	membuat usulan pegawai yang akan tugas belajar/ibel	<i>closed</i>	<i>closed</i>	2 orang mengajukan permohonan tubel	2 (dua) orang memperoleh sk tubel dan sedang mengikuti tugas belajar
4	Membuat usulan fasilitasi kepada Pusat Pengembangan SDM POM terkait pendidikan dan	membuat RTL diklat PFM	<i>closed</i>	<i>closed</i>	5 orang PFM belum diklat	5 orang lulus diklat

	pelatihan jabatan fungsional;					
5	Membuat usulan fasilitasi kepada Pusat Pengembangan SDM POM terkait pendidikan dan pelatihan jabatan struktural; dan	Membuat RTL untuk optimalisasi diklat teknis pegawai	<i>closed</i>	<i>closed</i>	31 orang belum memenuhi 20 JP teknis	30 orang memenuhi diklat teknis melalui ideas

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan kepada pegawai agar dapat mencapai target indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang”.

Dengan tercapinya Indeks Profesionalitas ASN, dapat menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Selain itu karena di tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan maka di tahun 2024 Target di reviu kembali, agar realisasi IPASN di akhir tahun renstra dapat meningkat sejalan dengan target yang telah di reviu.

SS10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 131 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	88,39	99,31	Cukup
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00	Sangat Baik


Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	120,00	Sangat Baik
--------------------------------------------------	---------------	--------------------

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 120% dengan kriteria **Sangat Baik**. Tahun 2023 ini Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tidak diperhitungkan karena Adanya perubahan penugasan BBPOM di Semarang sebagai Laboratorium Regional pada Triwulan III tahun 2023 berdasar Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 193 tahun 2023 menyebabkan perubahan Standar Ruang Lingkup dan Standar Peralatan yang harus dipenuhi.

IK.27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 132 Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	88,39	99,31	

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk:

1. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan;
2. menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; dan
3. monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Adanya SK Kepala Badan POM Nomor 470 tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan pada Triwulan III tahun 2023 maka terjadi perubahan tools penilaian SKL. Dengan adanya perubahan tools tersebut menyebabkan beberapa Balai Regional dimana salah satunya BBPOM di Semarang kesulitan untuk mencapai target yang telah ditentukan di awal tahun.

Adanya perubahan penugasan BBPOM di Semarang sebagai Laboratorium Regional pada Triwulan III tahun 2023 berdasar Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 193 tahun 2023 menyebabkan perubahan Standar Ruang Lingkup dan Standar Peralatan yang harus dipenuhi, sehingga beberapa parameter yang sudah terpenuhi di Triwulan sebelumnya tidak lagi dihitung sebagai capaian karena adanya perubahan penugasan tersebut.

Pada 2023 Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Semarang adalah 88,39% jika dibandingkan dengan target 2023 yaitu 89,00 %, maka Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 99,31% dengan kriteria **cukup**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 62 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK27

BBPOM di Semarang secara rutin melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan

sesuai standar GLP. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan karena adanya perubahan tools penilaian SKL pada triwulan III tahun 2023 terutama bagi balai Regional salah satunya BBPOM di Semarang yang ditunjuk sebagai Balai Regional sehingga pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi.

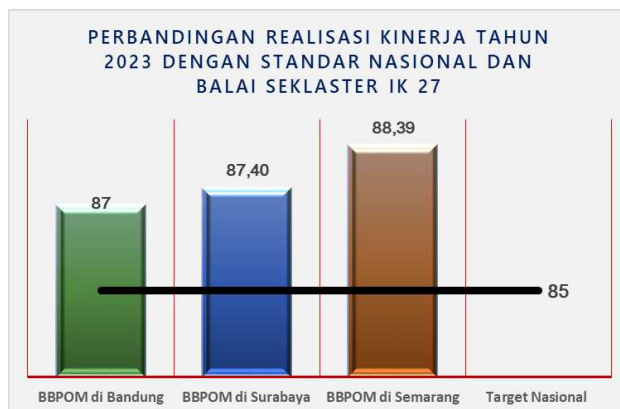
- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 133 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK27

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,84	88,39	99,49	▲

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 akan tercapai target jangka menengah dengan kategori cukup. BBPOM di Semarang masih memerlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target jangka menengah dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK27

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Semarang tahun 2023 sudah melebihi target nasional dan mempunyai capaian paling tinggi dibanding BBPOM di Surabaya dan BBPOM Bandung. BBPOM di Semarang sebagai Balai

Regional Baru merupakan balai yang terdampak cukup besar akibat perubahan tools monev SKL baru pada akhir triwulan III tahun 2023.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Penerapan konsep baru Regionalisasi Laboratorium pada TW III tahun 2023 menyebabkan perubahan tools penilaian SKL, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. Terdapat kendala untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut

1. Adanya perubahan standar minimal laboratorium sesuai konsep baru regionalisasi
2. Keterbatasan ketersediaan baku pembanding untuk pengujian obat dan makanan
3. Keterbatasan anggaran pengadaan , pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai Balai Regional, BBPOM di Semarang senantiasa berusaha melaksanakan kegiatan untuk mendukung capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 antara lain,

1. Peningkatan Pemenuhan Standar Kompetensi petugas pengujian melalui bimtek internal dan pendampingan dari PPPOMN maupun dari pihak eksternal dalam hal ini vendor alat.
2. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding
3. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 134 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK27

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	4.270.704.000	4.267.352.806	99,92%	99,31	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Membuat usulan permintaan tambahan anggaran baik itu anggaran pelatihan/kompetensi SDM atau anggaran pemeliharaan alat atau suku cadang untuk meningkatkan persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 135 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK27

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dalam kategori baik dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Agar kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dapat terus meningkat dan mencapai target perlu ditingkatkan kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi personil laboratorium dan pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar disertai dengan monitoring dan evaluasinya secara berkala, sehingga kendala yang ada bisa segera diatasi.	Monev SKL tiap triwulan yang dilaksanakan P POMN dan BBPOM Pemenuhan SRL melalui keikutsertaan uji profisiensi dan pemenuhan baku pembanding untuk pengujian obat dan makanan Pemenuhan standar peralatan laboratorium melalui perencanaan pengadaan alat laboratorium secara bertahap dan perlu adanya review standar peralatan laboratorium	Closed	Closed	Belum adanya perencanaan target tiap triwulannya Laboratorium tidak dapat menguji parameter pengujian tertentu karena tidak tersedianya baku Pemenuhan standar peralatan laboratorium tidak mengalami peningkatan karena terbatasnya	Tiap triwulan dapat dengan mudah di monitoring dan dievaluasi capaian SRL, Kompetensi atau alat yang menjadi target sudah tercapai atau belum Laboratorium dapat melakukan pengujian parameter tertentu sehingga SRL meningkat

		sesuai kebutuhan UPT Pemenuhan standar kompetensi personel melalui perencanaan dan pelaksanaan pelatihan sesuai konsep baru regionalisasi			anggaran. Pengadaan peralatan yang sesuai kebutuhan pengujian tidak bisa meningkatkan pemenuhan SKL (peralatan) Parameter uji balai regional belum dapat dilakukan karena personel pengujian belum mempunyai kompetensi pengujian parameter tersebut.	Pengadaan alat sesuai dengan kebutuhan pengujian dan sekaligus menambah pemenuhan SKL peralatan Personel pengujian sudah mempunyai kompetensi pengujian parameter regionalisasi dan melakukan verifikasi metode sehingga dapat melakukan parameter pengujian tersebut
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**


Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi adanya kekurangan biaya pemeliharaan alat laboratorium dan pengadaan suku cadang sebagai dampak dari regionalisasi sehingga sampel yang diuji lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan mengakibatkan alat laboratorium maupun suku cadang mudah

rusak. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuat usulan permintaan tambahan anggaran.

IK.28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Semarang Yang Optimal

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 136 Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Semarang Yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00	

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

- 2,26 - 3 : Optimal
- 1,51 - 2,25 : Cukup
- 0,76 - 1,5 : Kurang Optimal
- 0 - 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang mencakup komponen :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC.
BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada agar selalu ter-update pada saat digunakan, sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
Data dan informasi yang dimutakhirkan adalah :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang diverifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.

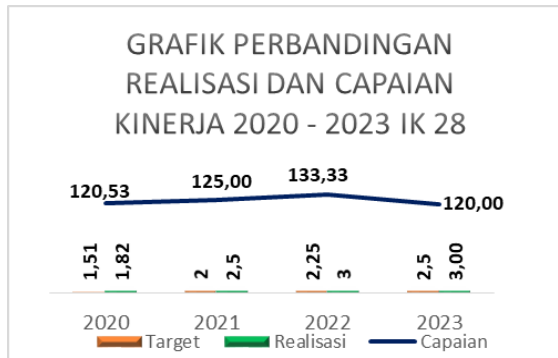
2. Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM

Mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja.

- a. Jumlah upload berita aktual setiap bulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
- b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.

Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya. Email Corporate dengan ketentuan akun email yang aktif dapat dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 64 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK28

Berdasar Grafik di atas bawah terjadi peningkatan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang Optimal di tahun 2020-2022 dan 2023 stuck dinilai 3 karena nilai optimal. Jika dilihat dari capaiannya terlihat fluktuatif, dan menurun di tahun 2023 karena dengan target yang meningkat tetapi realisasi tetap 3.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Tabel 137 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK28

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00	▲

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang Optimal telah tercapai. Diharapkan di tahun 2024 dapat mempertahankan di nilai 3 agar indikator ini dapat tercapai.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Berdasarkan grafik kluster I di atas terlihat bahwa BBPOM Surabaya dan Semarang telah mencapai nilai optimal (3). Sedangkan BBPOM di Bandung masih di nilai 2,88. Dan ketiga balai sudah melampaui target nasional.

Gambar 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK28

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
2. Koordinasi dengan rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
3. Penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusa
4. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
5. Pembuatan berita aktual dan pemantauan viewer setiap bulan
6. Sharing folder di setiap kegiatan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain :

1. melakukan monev input SIPT setiap bulan
2. memutakhirkan SPIMKER tepat waktu

3. meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stakeholder
4. penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
5. tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite dan menginformasikan berita-berita ke stakeholder Balai Besar POM di Semarang
6. mempertahankan penggunaan sharing folder di setiap kegiatan

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 138 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK28

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	123.702.000	123.311.200	99,68%	120,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Penggunaan email corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap hari Senin dan Kamis
2. Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutakhiran Sistem Informasi Setiap Bulan

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tabel 139 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK28

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<u>Sharing Folder</u>	Telah di sampaikan	Closed	Closed	data pre market dan	Teratasi dengan

	Perlu ditingkatkan data pre market dan post market yang dapat diakses pada sharing folder, misal pada data produk obat tradisional label/ penandaan yang disetujui belum semuanya dapat tersedia	pada pertemuan/Forkom dengan pusat terkait sampling dan label OT/SK			post market belum sepenuhnya diakses pada sharing folder	adanya monev dari Badan POM terkait penandaan OT/SK sehingga bisa dipelajari/dievaluasi dengan hasil monevnya melalui SIPT
2	<u>Email</u> Meningkatkan penggunaan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke pusat maupun stakeholder.	Meningkatkan penggunaan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke pusat maupun stakeholder	Closed	Closed	Pegawai yang mempunyai email corporate ada beberapa yang belum aktif menggunakan email corporate	Pengiriman link Apel Virtual melalui email semua pegawai, email corporate banyak digunakan semua pegawai
3	<u>Berita Aktual</u> Upload berita aktual terkait kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam waktu 3 (tiga) Bulan minimal 10 berita	Membuat berita aktual kegiatan Balai minimal 10 berita setiap bulannya dan memantau viewer berita actual tersebut	Closed	Closed	Masih kurangnya viewer pembaca berita	Terpenuhi jumlah viewer berita aktual

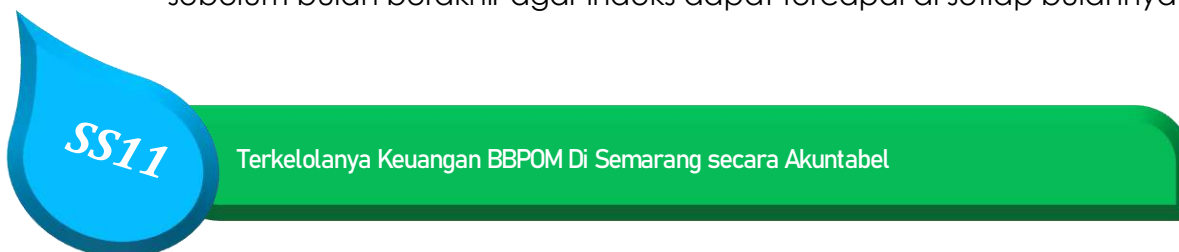
4	<u>Spimker</u> 1. Menghimbau rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER. Menghimbau agar data kasus keracunan diinput pada bulan yang sama. 2. Menghimbau kepada lintas sektor terkait (seperti : Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, atau Laboratorium Kesehatan Daerah/ Labkesda Provinsi Jawa Tengah) untuk menyampaikan data hasil uji pengujian sampel KLB ke BBPOM di Semarang.	Menambah jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai pelapor data kasus keracunan pada aplikasi SPIMKER	Closed	Closed	RS dan Puskesmas kurang aktif melaporkan data kasus keracunan melalui aplikasi SPIMKER	Mengingat kan RS dan Puskesmas agar aktif melaporkan n kasus keracunan pada aplikasi SPIMKER, termasuk melaporkan n data nihil apabila tidak ada kasus keracunan
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		

5	<p><u>SIPT</u></p> <p>1. Agar SIPT dapat digunakan dari awal tahun sehingga input sampel, sarana dan hasil pengujian tidak menumpuk di pertengahan sampai dengan akhir tahun.</p> <p>2. Melakukan pengembangan bitly kartu kendali pemeriksaan sarana di seksi inspeksi sehingga dapat digunakan untuk sistem monitoring input SIPT sarana, selain untuk monitoring tindak lanjut dan feedback CAPA dari sarana.</p> <p>3. Komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Pusdatin Badan POM tentang kendala yang dihadapi terkait SIPT baik secara WAGrup, Tiket di aplikasi SIPT, Layanan ITSM Badan POM</p> <p>4. Secara aktif melakukan monitoring realisasi input SIPT.</p>	<p>1. SIPT sudah dapat digunakan dari awal tahun 2023</p> <p>2. Sudah pengembangan bitly kartu kendali pemeriksaan sarana di seksi inspeksi sehingga dapat digunakan untuk sistem monitoring input SIPT sarana, selain untuk monitoring tindak lanjut dan feedback CAPA dari sarana.</p> <p>4. melakukan monitoring realisasi input SIPT terus menerus</p>	Closed	Closed	SIPT terkait regionalisasi masih perlu dikembangkan dan diperbaiki	SIPT terkait regionalisasi sudah dan terus dikembangkan tetapi masih terdapat kendala-kendala
6	<p><u>Dashboard BPOM Operational Center (BOC)</u></p> <p>Login dan mengakses/view melalui akun Direktur/Kepala</p>	Meningkatkan penggunaan dan manfaat Dashboard BCC	Closed	Closed	Telah dilakukan login dan akses ke Dashboard BCC oleh Kepala Balai dan Staf	Akun BOC Kepala Balai dan Staf telah melakukan login dan mengakses

Pusat /Biro/Kepala Balai minimal 4 kali sebulan.					s minimal 4 kali sebulan
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2022/interim triwulanan tahun 2023, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan pemantauan setiap komponen Pengelolaan data dan informasi setiap sebelum bulan berakhir agar indeks dapat tercapai di setiap bulannya.



Tabel 140 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	94,70	91,38	96,50	Cukup
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)			96,50	Cukup

IK.29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus :


$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran berjalan dan tahun

anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 141 Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Di Semarang

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Kriteria
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,70	91,38	96,50	

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Semarang tahun 2023 adalah 91,38, diperoleh dari nilai IKPA 96,11 dan nilai EKA 88,23. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Semarang tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 96,50% dengan kategori **Cukup**.

▪ **Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**



Gambar 66 Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020-2023 IK29

Berdasarkan grafik disamping, diperoleh informasi bahwa terjadi kenaikan capaian nilai kinerja anggaran di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan

realisasi namun belum dapat mencapai target tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dan target belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh penurunan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran relatif tinggi hingga 99,85%, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 142 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah IK29

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Jangka Menengah	Notifikasi
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,55	91,38	100,92	▲

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Terdapat Dalam Dokumen Renstra.**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 **mencapai** target Renstra tahun 2024, setelah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenkeu) bersama Unit Pengampu terkait. Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 terhadap Target 2024 pada Renstra setelah direviu masuk pada kategori **Tercapai/Melampaui**. Telah diusulkan reviu target untuk diturunkan di tahun 2024, karena pada indikator nilai kinerja anggaran ini terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi maka nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Dari hasil perhitungan proyeksi, diperkirakan target tahun 2024 sesuai Renstra awal tidak akan bisa tercapai bila masih ada instruksi target penyerapan anggaran 99%, sehingga setelah dilakukan reviu oleh Rorenkeu dan Unit Pengampu, terdapat penyesuaian target tahun 2024 menjadi 90,55.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster**



Gambar 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IK29

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dengan nilai 91,38 dan yang terendah

adalah BBPOM di Bandung dengan nilai 88,28. Realisasi dari ketiga balai yang diperbandingkan berada dibawah target nasional BPOM.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023. Dari 8 (delapan) indikator pada penilaian IKPA, terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Realisasi Anggaran dikarenakan pada 2024 terdapat deviasi sebesar 68,73% pada belanja barang (52) yang disebabkan rencana lebih rendah daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan kegiatan KIE yang pada mulanya dijadwalkan pada triwulan I dan II baru bisa dilaksanakan secara intensif di triwulan III, namun tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III DIPA karena proses revisi DIPA melalui DJA pada TW III realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan TW IV dalam rangka penambahan alokasi anggaran untuk belanja pegawai anggaran dari BA BUN
2. Tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Belanja Kontraktual disebabkan karena terdapat 4 (empat) kontrak tender dini (sebelum tahun anggaran) yang terlambat didaftarkan karena ada kendala pada pendaftaran akun SAKTI PPK.
3. Tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Pengelolaan UP dan TUP dikarenakan Beberapa pengajuan TUP disampaikan ke KPPN mendekati batas waktu yang ditetapkan maka SP2D cair pada esok hari

Tabel 143 Nilai IKPA 2023

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	134	063	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	68.73	97.19	98.78	100.00	99.17	100.00	100.00	96.11	100%	96.11
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.87	19.44	9.88	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	84.37		99.03					100.00			

Sumber : spanint.kemenkeu.go id, 2024

Nilai EKA tahun 2023 adalah 88,23 dengan komponen nilai penyerapan 99,85; konsistensi 95,74; capaian RO 100; efisiensi 4,64; dan nilai efisiensi 61,6. Efisiensi masih tergolong sangat rendah dibandingkan komponen penilaian yang lain. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran berbanding terbalik dengan nilai efisiensi, pada saat realisasi anggaran tinggi maka nilai efisiensi akan rendah. Sedangkan realisasi anggaran anggaran menjadi indikator penilaian pada penilaian IKPA.



Gambar 68 Grafik Nilai EKA/SMART

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>, 2024

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya perbaikan atas tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 yaitu:

1. Telah dilakukan usulan penurunan target Indikator Nilai Kinerja Anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100
3. dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Semarang II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel 144 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK29

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	27.809.631.000	27.729.570.996	99,71%	96,43	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Meskipun demikian, perlakuan automatic adjustmen anggaran tersebut tidak mengganggu terlaksananya kegiatan selama setahun.

▪ **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)**

Tabel 145 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya IK29

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring secara aktif oleh petugas Monev terhadap nilai IKPA dan EKA khususnya terkait unsur-unsur meliputi:	1. PPK lebih intens memonitoring POA/RPD	Closed	Closed	Monitoring jika di	Monitoring setiap hari

	Monitoring Realisasi DIPA, Hal III DIPA, Capaian Keluaran Kegiatan (CKK), Efisiensi, Saldo Minus, revolving UP, data kontrak, dispensasi SPM, Renkas, Kesalahan SPM, monitoring tagihan, rekonsiliasi keuangan dan monitoring penyampaian LPJ Bendahara, penyelesaian retur serta capaian output	<p>agar deviasi dan target realisasi anggaran dapat tercapai</p> <p>2. Penanggungjawab Data Monitoring capaian output secara berkala</p> <p>3. Mempertahankan penyelesaian tagihan (SPM) tepat waktu</p> <p>4. Tidak melakukan dispensasi SPM krn akan menurunkan nilai IKPA</p>			perlu n	
2	Mereview anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan	Merevisi sebagian anggaran untuk dialihkan kegiatan lain, di tahun 2023 yaitu Integrasi ISO	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Optimalisasi direncanakan menjelang akhir tahun	Optimalisasi direncanakan di TW III
3	Kerja sama dan komunikasi secara aktif antar Pelaksana, penanggung jawab kegiatan, bendahara, PPK dan PPSPM akan menjadikan keberhasilan dlm bisnis	Rapat Evaluasi rutin antar Pengelola Keuangan dengan KPA .	<i>Closed</i>	<i>Closed</i>	Rapat Evaluasi rutin antar Pengelola Keuangan	Rapat Evaluasi rutin dan lebih mendalam antar

	proses pertanggung jawaban keuangan				dengan KPA .	Pengelola Keuangan dengan KPA .
--	-------------------------------------	--	--	--	--------------	---------------------------------

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2020-2022 NKA belum pernah mencapai target yang ditetapkan maka telah dilakukan revaluasi kembali terhadap target NKA untuk akhir tahun Renstra tahun 2024. Harapannya di tahun 2024 dapat mencapai target yang telah direvisi.

3.2 REALISASI ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2023

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW I Tahun 2023, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2022 Sestama melalui surat No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 memerintahkan untuk melakukan pemblokiran Mandiri (Automatic Adjustment) sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pematangan 59 Titik KIE sebesar Rp 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah).

Kemudian pada 20 Juni 2023 Sestama melalui surat No. B-PR.05.03.2.21.06.23.457 memerintahkan untuk melakukan Penyampaian Usulan Pemanfaatan Automatic Adjustment TA 2023 sejumlah Rp 11.186.271.000 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Seribu Rupiah) terdiri Pematangan 59 Titik KIE sebesar 8.730.230.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 61.686.206.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pada tanggal 10 Juli 2023 Sestama melalui surat No. B-KU.02.03.21.212.07.23.166 tentang tindak lanjut penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari blokir Automatic Adjustment TA 2023 sebesar Rp 2.456.041.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Seribu Rupiah) yang berasal dari tunjangan kinerja. Maka pagu dipa menjadi Rp. 59.565.524.000,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pada TW III tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 39.272.528.389,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau telah mencapai target 65,93%. Pada tanggal 1 September 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan melalui surat nomor B-KU.02.03.21.212.09.23.220 tentang Optimalisasi Anggaran untuk Belanja Pegawai terdapat penambahan sebesar Rp 1.678.705.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah). Maka Pagu DIPA menjadi Rp 61.244.229.000 (Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), pada TW IV tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 61.154.028.792 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau mencapai 99,85%.

Realisasi 2023 Sakti yaitu 99,91% tetapi karena terdapat pengembalian sebesar Rp 36.725.593,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) maka realisasi anggaran di Omspan yaitu 99,85%. Ini yang mengakibatkan tahun 2023 terjadi penurunan 0,03 poin jika dibandingkan dengan realisasi 2022,



Gambar 69 Realisasi Anggaran 2020-2023

Pengelolaan anggaran BBPOM di Semarang senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap senin pada saat apel dan secara detail setiap awal bulan pada saat rapat bulanan.
- b. Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d. Percepatan pengadaan barang dan jasa.
- e. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan Laporan Kinerja

Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023 output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Semarang tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 146 Tingkat Efisiensi Kegiatan

Kode	KRO	Output	Input	IE	TE	Capaian	Kriteria
3165.AEA	Koordinasi	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	124,36	99,94	1,24	0,24	95%	Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	100,00	99,89	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	105,56	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	99,68	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	100,00	99,50	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	100,00	99,91	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	102,26	99,96	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	112,15	99,99	1,12	0,12	100%	Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	101,37	99,95	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	107,07	99,94	1,07	0,07	100%	Efisien
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	99,71	1,00	0,00	100%	Efisien
Rata-Rata		106,12	99,85	1,06	0,06	100%	Efisien

Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang melaksanakan 16 (enam belas) KRO (Kelompok Rician Output untuk mendukung pencapaian 11 Sasaran Kegiatan dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,24. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya mempunyai TE tertinggi karena output tercapai melebihi target dengan anggaran terserap seluruhnya. Tingginya output Pelayanan Publik Lainnya dikarenakan total fisik melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain ataupun realisasi yang tidak dapat diprediksi, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Kegiatan

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 147 Profil Tingkat Efisiensi Setiap Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang

No	Sasaran Strategis	Output	Input	IE	TE	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	103,86	99,95	1,04	0,04	100%	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	99,46	100,00	0,99	-0,01	75%	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	104,18	99,93	1,04	0,04	100%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	108,19	99,92	1,08	0,08	100%	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	101,00	99,95	1,01	0,01	100%	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	120,00	99,99	1,20	0,20	100%	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	107,76	99,95	1,08	0,08	100%	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	104,16	99,96	1,04	0,04	100%	Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	106,01	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00	99,95	1,20	0,20	100%	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	96,50	99,91	0,97	-0,03	75%	Tidak Efisien
Rata-Rata		106,14	99,85	1,06	0,06	100%	Efisien

Realisasi anggaran di 11 Sasaran Kegiatan cukup baik karena di atas 99%, namun realisasi anggaran pada Sasaran Kegiatan ke 2 dan 11

tidak selaras dengan pencapaian indikator, dimana anggaran yang terserap lebih tinggi dibandingkan pencapaian indikator sehingga terdapat ketidak efisienan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada Sasaran Kegiatan.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan berdasar Tabel 147 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada Sasaran Kegiatan pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang" sebesar Rp1.053.303.790,- atau 1,72% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. 1 dari 5 indikator pada sasaran ini telah tercapai. Anggaran ini digunakan untuk pembelian sampel dan upaya yang telah dilakukan agar sasaran ini tercapai yaitu melakukan intervensi ke sarana produksi pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan pertama adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
2. Pada Sasaran Kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp111.600.000,- atau 0,18% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan dan Kegiatan KIE kepada masyarakat. Ada beberapa yang mempengaruhi Sasaran Kegiatan ini belum tercapai, yaitu:
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, twitter, tiktok, website) BBPOM di Semarang, media cetak, media elektronik yaitu radio-TV, sms blast dan media online lainnya dalam mempromosikan dan menyebarkan informasi tentang Obat dan makanan yang aman.

- b. Belum beragamnya alat peraga atau promosi yang dibuat agar materi promosi atau penyebaran informasi makin mudah dipahami,
- c. Belum memadainya frekwensi pameran maupun KIE langsung pada masyarakat di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Harapannya tahun 2024 dapat diperbaiki kegiatan yang belum optimal agar berdampak terhadap peningkatan hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu sehingga target tahun 2024 dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kedua adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan kurang dari anggaran yang dikeluarkan.

3. Pada Sasaran Kegiatan ketiga yaitu "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp594.544.647,- atau 0,97% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian layanan publik berupa desk CAPA sertifikasi CDOB, pemeriksaan sarana produksi dalam rangka registrasi/sertifikasi, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga semua hasil survey dapat mencapai target tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
4. Pada Sasaran Kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.879.832.680,- atau 4,71% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, peningkatan kompetensi inspektur, pendampingan UMKM. peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana

prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Kegiatan keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

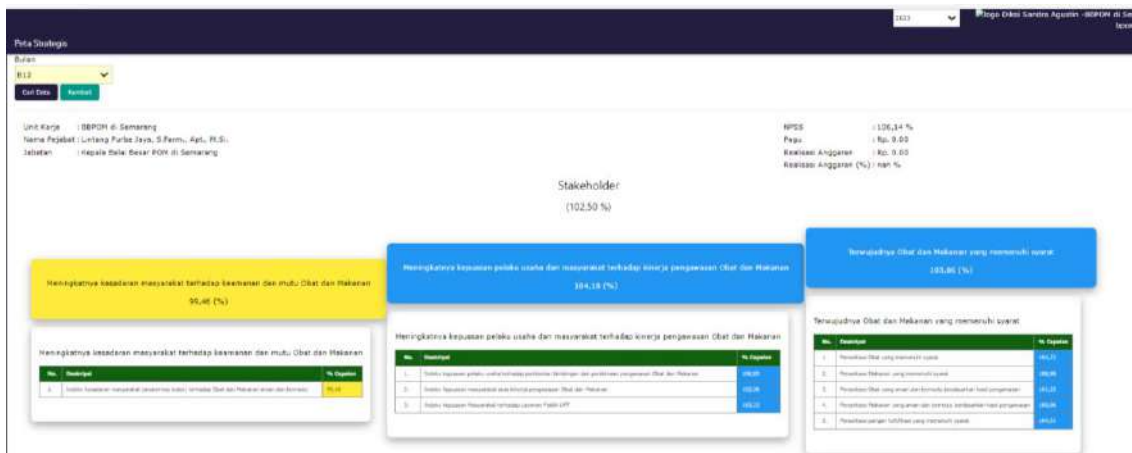
5. Pada Sasaran Kegiatan kelima yaitu "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 21.844.018.475,- atau 35,72% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Penyebaran informasi obat dan makanan dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan- kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kelima adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
6. Pada Sasaran Kegiatan keenam yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.053.875.790 atau 1,72% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan beserta sarana prasarana penunjang. Kegiatan- kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya semua target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan keenam adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
7. Pada Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.136.375.464,- atau 1,86% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan

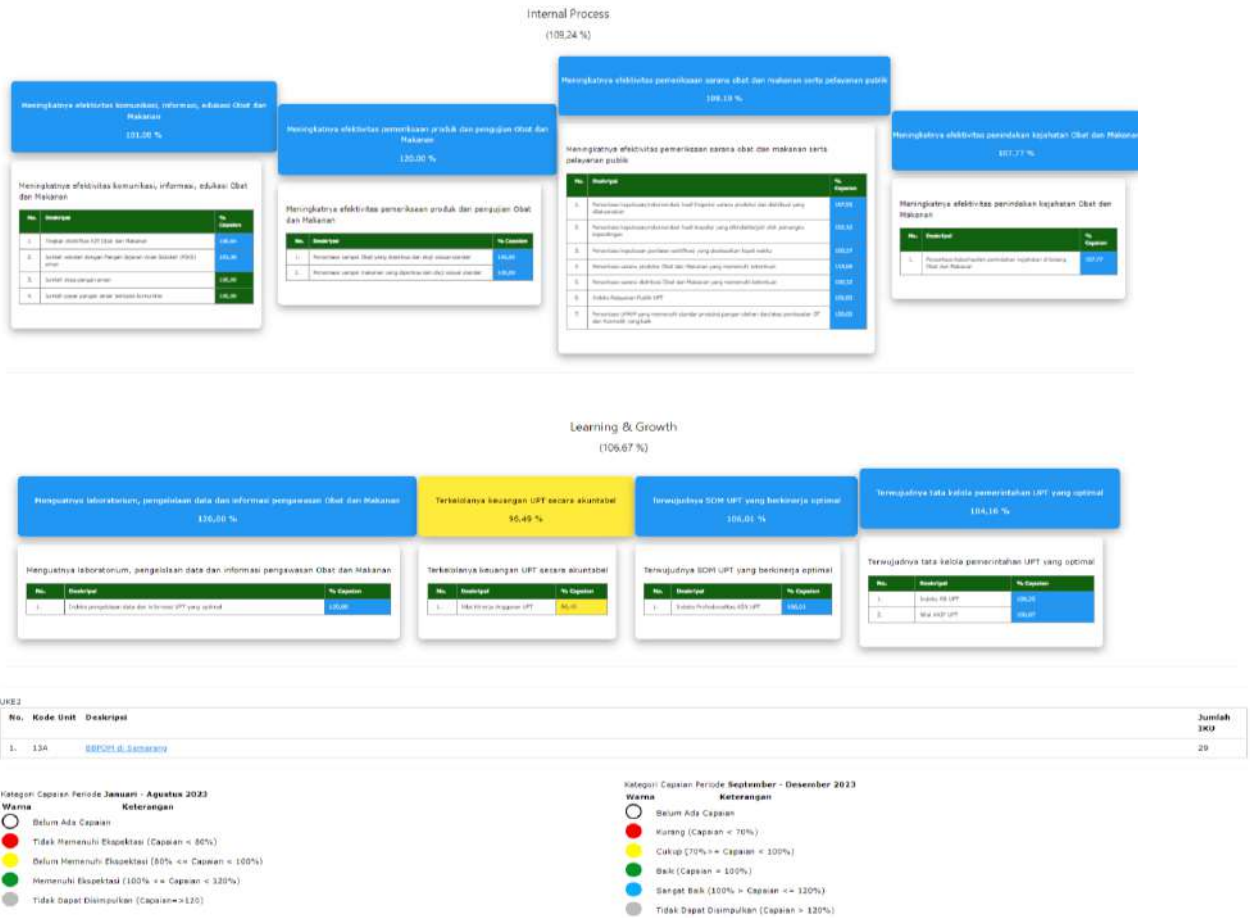
investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

8. Pada Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp81.946.720,- atau 0,13% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran Laporan Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2021. Anggaran ini dipergunakan untuk pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dan mencapai target indeks RB dan nilai SAKIP tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
9. Pada Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu "Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp278.868.224,- atau 0,46% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini meski mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak langsung pada pencapaian target sasaran. Tetapi berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kesembilan adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan kurang dari anggaran yang dikeluarkan, ini dikarenakan adanya penurunan nilai kompetensi pegawai di tahun 2022.
10. Pada Sasaran Kegiatan kesepuluh yaitu "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp4.390.664.006,- atau 7,18% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi

laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan kesepuluh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

11. Pada Sasaran Kegiatan kesebelas yaitu "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp27.729.570.996,- atau 45,34% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan gaji dan tunjangan pegawai, kegiatan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan serta operasional kantor. kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja anggaran yang belum optimal karena adanya Kebijakan Blokir Automatic Adjustment mempengaruhi penurunan penyerapan anggaran, Capaian Rincian Output, dan Efisiensi anggaran.





Gambar 70 Nilai capaian kinerja pada aplikasi simetris E-Performance Tahun 2023

Langkah-langkah yang sudah dilakukan BBPOM di Semarang dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran antara lain:

1. Menjaga komitmen yang tinggi dari level pimpinan hingga staf BBPOM di Semarang, Penyusunan PoA yang selalu dimonitoring. Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun program/kegiatan (PIPK) dan Tim Money sehingga tersedia informasi data dapat diandalkan.
2. Tahun 2023 dengan realisasi anggaran 99,85% BBPOM di Semarang dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian kinerja baik 106,14% sesuai dengan monitoring dan evaluasi di e-performance B POM.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2023. Semua Program dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Semarang Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur kedalam 29 indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan 11 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 148 Ringkasan NPSS per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		NPS BBPOM di Semarang
Stakeholder Perspective		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	103,86
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	99,46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	104,18
Internal Proses Perspektif		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	108,19
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	101
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	120
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	107,76
Learning and organization perspektive		
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	104,16
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	106,01
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	96,5
NPSS		106,14

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut dari 11 Sasaran Kegiatan yang ditetapkan yaitu :

- a 9 (sembilan) memperoleh predikat Sangat Baik
- b (dua) memperoleh predikat Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total tahun 2023 adalah sebesar 106.14% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Penyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di Semarang dengan memperoleh NPS 103,86% dengan kriteria **Sangat Baik**.
2. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 99,46% dengan kriteria **Cukup**. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan media sosial, belum beragamnya alat peraga atau promosi yang dibuat agar materi promosi atau penyebaran informasi makin mudah dipahami dan belum memadainya frekwensi pameran maupun KIE langsung pada masyarakat di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 104,18% dengan kriteria Sangat Baik.
4. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 108,19% dengan kriteria Sangat Baik.
5. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 101% dengan kriteria Sangat Baik.
6. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik.
7. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 107,76 dengan kriteria Sangat Baik.
8. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 104,16% dengan kriteria Sangat Baik;
9. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 106,01% dengan kriteria Sangat Baik.

10. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 120% dengan kriteria Sangat Baik.
11. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang berhasil mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel dengan NPS sebesar 96,50% dengan kriteria Cukup hal ini dikarenakan belum konsistennya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran dan adanya kebijakan blokir Automatic Adjustment mempengaruhi penurunan penyerapan anggaran, Capaian Rincian Output, dan Efisiensi anggaran.

Dengan demikian dapat dikatakan seluruh capaian sasaran kegiatan tercapai.

Hal tersebut tidak terlepas dari capaian 29 Indikator Kinerja Utama yang sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran kegiatan.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Semarang pada tahun 2023 antara 96,50% sampai dengan 126,58%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "**Nilai Kinerja Anggaran UPT**" sebesar 96,50%, disebabkan belum konsistennya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran dan adanya kebijakan blokir Automatic Adjustment mempengaruhi penurunan penyerapan anggaran, Capaian Rincian Output, dan Efisiensi anggaran. Sedangkan capaian indeks "**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**" sebesar 126,58% hal ini dikarenakan melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan, dan melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap

4.2 **Saran**

Dari 29 indikator kinerja yang di evaluasi, terdapat 3 indikator yang belum tercapai atau berkriteria "cukup", maka akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut, adala sebagai berikut:

1. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023, dengan capaian 99,46 dalam kategori capaian cukup. Upaya BBPOM di Semarang untuk memberdayakan masyarakat meliputi berbagai kelompok seperti

PKK, pramuka dan masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

2. Tahun 2023 ini Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tidak diperhitungkan karena Adanya perubahan penugasan BBPOM di Semarang sebagai Laboratorium Regional pada Triwulan III tahun 2023 berdasar Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 193 tahun 2023 menyebabkan perubahan Standar Ruang Lingkup dan Standar Peralatan yang harus dipenuhi. Adanya SK Kepala Badan POM Nomor 470 tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dan Balai Pengawas Obat Dan Makanan pada Triwulan III tahun 2023 maka terjadi perubahan tools penilaian SKL. Dengan adanya perubahan tools tersebut menyebabkan beberapa Balai Regional dimana salah satunya BBPOM di Semarang kesulitan untuk mencapai target yang telah ditentukan di awal tahun.
3. Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target meskipun nilai IKPA yang diperoleh sudah tinggi, namun bobot yang tertinggi adalah pada nilai EKA. Nilai EKA sangat dipengaruhi dengan nilai efisiensi, dimana efisiensi BBPOM di Semarang sangat rendah karena penyerapan anggaran sangat tinggi yaitu 99,85%. Dengan alasan tersebut, maka akan diusulkan ke Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penurunan target NKA ditahun 2024.

Dan masih terdapat 1 indikator yang melebihi 120% atau berkriteria "tidak dapat disimpulkan" yaitu Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Maka di tahun 2024 akan melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik offline maupun online.

Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

LAMPIRAN



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyuwani Semarang 50264
Telp. 024 - 7812324/Fax. 024-7813633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A, Banyumank Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324/Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A, Banyumartik Semarang 50264
Telp. 024 -7612324 / Fax. 024-7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 3 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324/Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 4 -

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor HK.02.02.13A.12.21.4660 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2023.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 / Fax. 024-7613633
Email : lkpomsem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- 5 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG

SANDRA MARIA PHILOMENA LINTHIN

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR: HK.02.02.13A.07.22.166 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SEMARANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

- 9 -

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
		Nilai AKIP UPT	80,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

SANDRA MARIA PHILOMENA LINTHIN

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.58
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.7
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
61,686,206,000.00

Semarang, 21 Desember 2022

Pihak Kedua
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 3 Revisi Perjanjian Kinerja 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Semarang, 12 Mei 2023

Pihak Pertama

Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.58
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	119
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.7
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	21

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
61,686,206,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Semarang, 12 Mei 2023

Pihak Pertama



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

Lampiran 4 Rencana Aksi 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	496.684.852, 40
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.155.118, 80
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	184.825.647, 60
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112.084.381, 20
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	111.600.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.3	574.380.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.58	134.910.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92	78.165.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	450.821.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	450.821.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	382.250.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	471.252.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	78.165.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	25	33.33	44.17	55.83	69.17	78.33	83.33	88.33	90.83	96.67	79	127.727.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4	10	14	19	30	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	33	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.7	12	23	30.3	39.6	49.7	60.7	71.6	82	91	98.8	100	681.510.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.6	11	21.8	32.3	41.8	50.8	60.8	70.6	80.7	89.6	97.8	100	372.364.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000,00
23.	Indeks RB UPT												88	43.310.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80.5	22.050.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86	474.518.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP													89	3.779.412.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	78.702.000,00	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94.7		28.506.356.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15.5	29	48.5	58	70	71.5	77.5	86.5	90	21	307.621.000,00	
Total													61.686.206.000,00		

Semarang, 21 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra Maria Philomena Linthin, Apt, M.Kes

Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Semarang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	496.684.852, 40
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	232.155.118, 80
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	184.825.647, 60
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112.084.381, 20
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	28.125.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	111.600.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.3	574.380.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.58	134.910.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92	78.165.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	450.821.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	450.821.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	382.250.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	471.252.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	830.580.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	78.165.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	25	33.33	44.17	55.83	69.17	78.33	83.33	88.33	90.83	96.67	79	127.727.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	19.488.300.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4	10	14	19	30	45	55	60	75	85	90	119	961.026.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	4	10	14	24	33	42	50	64	69	80	92	37	1.089.691.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.7	12	23	30.3	39.6	49.7	60.7	71.6	82	91	98.8	100	681.510.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.6	11	21.8	32.3	41.8	50.8	60.8	70.6	80.7	89.6	97.8	100	372.364.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	15	25	30	35	40	50	55	60	70	75	78	1.136.798.000,00
23.	Indeks RB UPT												88	43.310.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80.5	22.050.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86	474.518.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												89	3.779.412.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	78.702.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45	55	57	60	65	70	75	80	84	88	94.7	94.7	28.506.356.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	10	15.5	29	48.5	58	70	71.5	77.5	86.5	90	21	307.621.000,00
Total													61.686.206.000,00	

Semarang, 12 Mei 2023
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

Lampiran 6 Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan di uji Memenuhi Syarat

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember												
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Semarang	690	709	0	0	0	78	709	709	649	60	60	0	709	
			Kabupaten Banyumas	42	42	0	0	0	6	42	42	39	3	3	0	42	
			Kota Surakarta	43	43	0	0	0		43	43	41	2	2	0	43	
			TOTAL	775	794	0	0	0	84	794	794	729	65	65	0	794	
		Targeted	Semarang	190	190				0	190	190	154	36	36	0	190	
			Kabupaten Banyumas	20	45				0	45	45	31	14	14	0	45	
			Kota Surakarta	19	19					19	19	16	3	3	0	19	
			TOTAL	229	254	0	0	0	0	254	254	201	53	53	0	254	
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			1004	1048	0	0	0	84	1048	1048	930	118	118	0	1048
		2	Fortifikasi	Targeted	Semarang	100	101				0	101	101	95	6	6	0
Kabupaten Banyumas	15				15				0	15	15	15	0	0	0	15	
Kota Surakarta	15				15					15	15	12	3	3	0	15	
TOTAL	130				131	0	0	0	0	131	131	122	9	9	0	131	
TOTAL PANGAN																	
Random			775	794	0	0	0	84	794	794	729	65	65	0	794		
Targeted			359	385	0	0	0	0	385	385	323	62	62	0	385		
TOTAL			1134	1179	0	0	0	84	1179	1179	1052	127	127	0	1179		

Lampiran 7 Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan di uji Memenuhi Syarat

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember											
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
TOTAL		Random	Semarang	1527	1529	4	0	0	33	1525	1525	1458	67	71	0	1529
			Kabupaten Banyumas	118	116	0	0	0	7	116	116	107	9	9	0	116
			Kota Surakarta	114	114	0	0	0	2	114	114	111	3	3	0	114
			TOTAL	1759	1759	4	0	0	42	1755	1755	1676	79	83	0	1759
		Targeted	Semarang	572	588	0	0	0	34	588	588	535	53	53	0	588
			Kabupaten Banyumas	44	45	0	0	0	7	45	45	36	9	9	0	45
			Kota Surakarta	44	68	0	0	0	4	68	68	60	8	8	0	68
			TOTAL	660	701	0	0	0	45	701	701	631	70	70	0	701
		TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Semarang	2099	2117	4	0	0	67	2113	2113	1993	120	124	0	2117
			Kabupaten Banyumas	162	161	0	0	0	14	161	161	143	18	18	0	161
Kota Surakarta	158		182	0	0	0	6	182	182	171	11	11	0	182		
TOTAL	2419		2460	4	0	0	87	2456	2456	2307	149	153	0	2460		

Lampiran 8 Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

UPT	s.d Desember						
	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Semarang	2.430	2.430	Benar	3.000	3.000	Benar	100

Lampiran 9 Sampel Makanan yang diperiksa dan di uji sesuai standar

UPT	s.d Desember						
	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Semarang	1.000	1.000	Benar	1.366	1.366	Benar	100

Lampiran 10 Indeks Kesehatan Masyarakat

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
12	Jawa Barat	539	77.00	86.68	112.58%
13	Jawa Tengah	540	81.00	80.56	99.45%
14	DI Yogyakarta	500	84.00	87.86	104.60%
15	Jawa Timur	520	81.00	84.50	104.32%
16	Banten	450	93.00	91.07	97.93%
17	Bali	560	77.00	84.31	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	590	82.00	79.81	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	530	77.00	76.89	99.86%
20	Kalimantan Barat	530	85.00	86.07	101.26%
21	Kalimantan Tengah	500	77.00	87.17	113.21%
22	Kalimantan Selatan	527	86.00	84.48	98.23%
23	Kalimantan Timur	500	89.00	88.76	99.73%
24	Kalimantan Utara	610	87.00	89.46	102.82%
25	Sulawesi Utara	500	86.00	91.79	106.73%
26	Sulawesi Tengah	570	83.00	80.87	97.44%
27	Sulawesi Selatan	550	83.00	83.85	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	540	81.00	81.73	100.90%
29	Gorontalo	480	87.00	85.89	98.72%
30	Sulawesi Barat	600	75.00	76.91	102.55%
31	Maluku	580	82.00	71.02	86.61%
32	Maluku Utara	610	81.00	74.91	92.48%
33	Papua Barat	590	87.00	78.21	89.90%
34	Papua	637	71.00	66.56	93.75%
Indeks Nasional		18201	83.00	84.67	102.01%

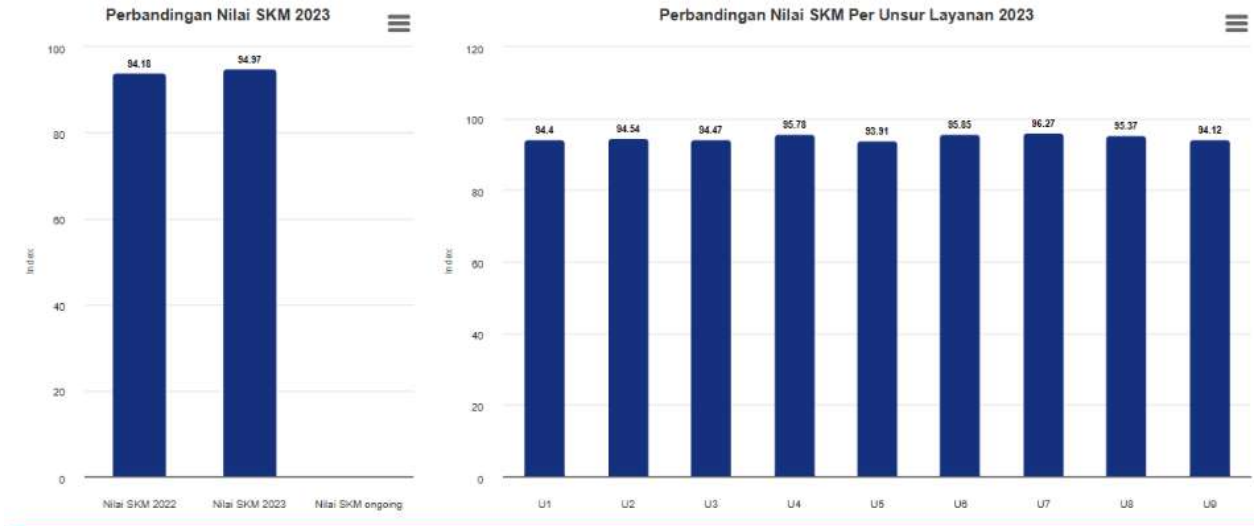
Lampiran 11 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93.4	96.1	102.9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93.4	96.0	102.8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93.4	97.3	104.1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93.4	98.6	105.6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93.0	95.6	102.8%	47	1061
6	Balai Besar POM di Jakarta	88.8	97.4	109.7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93.4	94.4	101.1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85.6	97.6	114.0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92.2	99.2	107.6%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataram	89.8	97.8	108.9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93.4	98.5	105.4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84.8	98.6	116.3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90.9	95.3	104.8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91.0	98.3	108.1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90.4	99.1	109.6%	13	297
16	Balai Besar POM di Pontianak	93.4	97.1	104.0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86.8	92.3	106.4%	22	249
18	Balai Besar POM di Semarang	89.3	94.7	106.0%	34	639
19	Balai Besar POM di Serang	86.9	96.2	110.7%	24	194
20	Balai Besar POM di Surabaya	85.7	96.4	112.5%	17	596
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	88.8	98.7	111.2%	11	191
22	Balai POM di Ambon	90.7	95.1	104.8%	21	184
23	Balai POM di Batam	90.2	96.1	106.6%	7	112
24	Balai POM di Bengkulu	93.4	96.8	103.6%	27	122
25	Balai POM di Gorontalo	87.7	96.3	109.8%	15	301
26	Balai POM di Jambi	90.0	96.3	107.0%	19	86
27	Balai POM di Kendari	82.4	96.3	116.8%	18	294
28	Balai POM di Kupang	92.5	94.6	102.3%	9	107
29	Balai POM di Mamuju	93.4	98.2	105.1%	7	42
30	Balai POM di Manokwari	89.4	92.2	103.1%	9	134
31	Balai POM di Palu	92.3	97.4	105.6%	7	44
32	Balai POM di Pangkalpinang	93.4	96.4	103.2%	22	150
33	Balai POM di Sofifi	93.4	99.0	106.0%	6	42
34	Balai POM di Tarakan	90.5	96.7	106.9%	10	120

Lampiran 12 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja BPOM

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Aceh	540	73.62	76.56	104.00%
2	Sumatera Utara	480	73.00	82.72	113.32%
3	Sumatera Barat	510	77.96	79.44	101.90%
4	Riau	570	68.10	77.77	114.20%
5	Jambi	540	73.47	79.75	108.55%
6	Sumatera Selatan	507	78.57	79.74	101.49%
7	Bengkulu	550	82.80	83.27	100.56%
8	Lampung	548	83.19	87.51	105.20%
9	Bangka Belitung	470	73.68	81.25	110.27%
10	Kepulauan Riau	493	73.43	76.25	103.84%
11	DKI Jakarta	440	78.33	80.10	102.26%
12	Jawa Barat	539	82.62	83.72	101.33%
13	Jawa Tengah	540	73.58	75.99	103.28%
14	DI Yogyakarta	500	82.73	82.36	99.55%
15	Jawa Timur	520	78.55	80.14	102.03%
16	Banten	450	83.70	90.76	108.43%
17	Bali	560	73.53	79.97	108.76%
18	Nusa Tenggara Barat	590	78.75	79.61	101.09%
19	Nusa Tenggara Timur	530	72.71	76.53	105.25%
20	Kalimantan Barat	530	72.70	77.79	107.00%
21	Kalimantan Tengah	500	67.76	86.02	126.95%
22	Kalimantan Selatan	527	82.78	75.91	91.70%
23	Kalimantan Timur	500	77.56	80.73	104.08%
24	Kalimantan Utara	610	82.82	83.08	100.31%

Lampiran 13 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayana Publik



Lampiran 14 Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK 2023			Total		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	Rekomendasi*	TL**	% Rek yang dilaksanakan
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2	100	2	2	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	2	2	100	2	2	100
		Pangan	2	2	100	2	2	100
		Total	7	7	100	7	7	100
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	3	3	100	3	3	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	10	10	100	10	10	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0
		Total	14	14	100,00	14	14	100
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional / Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	19	19	100	19	19	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3	100	3	3	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	1	1	100	1	1	100
		Pangan	4	4	100	4	4	100
		Total	27	27	100,00	27	27	100
TOTAL			48	48	100,00	48	48	100

Lampiran 15 Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	TOTAL		2023		
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	% Rek yang dilaksanakan
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang	78	73	78	73	93,59
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang	46	27	46	27	58,70
		Suplemen Kesehatan	Semarang	1	1	1	1	100,00
		Kosmetik	Semarang	33	25	33	25	75,76
		Pangan	Semarang	163	97	163	97	59,51
		Total	Semarang	321	223	321	223	69,47
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Semarang	0	0	0	0	0,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang	0	0	0	0	0,00
		Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0	0	0	0,00
		Kosmetik	Semarang	0	0	0	0	0,00
		Pangan	Semarang	11	11	11	11	100,00
		Total	Semarang	11	11	11	11	100,00
TOTAL			TOTAL	332	234	332	234	84,74

Lampiran 16 Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindalkanjuti

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK 2023			2023		
			TL (pembilan g)	Rekomenda si (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	Rekomendas i*	TL**	% Rek yang dilaksanak an
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindakkanjuti oleh pelaku usaha	Obat	73	78	93,59	78	73	93,59
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	27	46	58,70	46	27	58,70
		Suplemen Kesehatan	1	1	100,00	1	1	100,00
		Kosmetik	25	33	75,76	33	25	75,76
		Pangan	97	150	0	163	97	59,51
		TOTAL	223	321	69,47	321	223	69,47
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindakkanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0
		Pangan	11	11	100,00	11	11	100,00
		TOTAL	11	11	100,00	11	11	100,00
		TOTAL	234,00	332,00	84,74	332,00	234,00	84,74

Lampiran 18 Layanan Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW I (Jan - Mar)			RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV Des		
			Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	3099	3087	732	732		1421	1427		2248	2249		10849
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	1211	1211	252	252		505	505		819	875		2262
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	484	484	129	129		198	198		343	347		873
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	428	428	72	72		200	200		383	383		828

Lampiran 17 Layanan Produksi yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	2023		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang	22	13	8	5
2	Industri Bahan Baku Obat	Semarang	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang	0	1	0	1
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang	11	8	8	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang	2	3	3	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang	48	26	21	5
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semarang	14	4	4	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang	17	6	6	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Semarang	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Semarang	58	19	11	8
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Semarang	546	210	123	87
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Semarang	7805	51	28	23
TOTAL			8523	341	212	129

Lampiran 19 Layanan distribusi yang memenuhi syarat

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang	2023		
				Jumlah sarana yang		
					MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang	158	14	11	3
2	Apotek	Semarang	3353	81	47	34
3	Toko Obat	Semarang	220	40	29	11
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi	Semarang	27	27	24	3
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang	215	97	92	5
6	Puskemas	Semarang	935	82	80	2
7	Klinik	Semarang	1172	90	62	28
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang	0	4	2	2
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Semarang	0	1	1	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang	673	116	64	52
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang	425	55	55	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang	1049	130	96	34
13	Klinik Kecantikan	Semarang	80	44	37	7
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Semarang	2211	257	217	40
TOTAL			10518	1038	817	221

Lampiran 20 Indeks Pelayanan Publik

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
18	Balai POM di Jambi	4.17	4.25	4.67	Pelayanan Prima
19	Balai POM di Mamuju	4.54	4.40	4.64	Pelayanan Prima
20	Balai POM di Sofifi	4.12	4.25	4.64	Pelayanan Prima
21	Balai Besar POM di Pontianak	4.27	4.25	4.64	Pelayanan Prima
22	Balai Besar POM di Manado	4.10	4.25	4.62	Pelayanan Prima
23	Balai Besar POM di Semarang	4.65	4.40	4.62	Pelayanan Prima
24	Balai Besar POM di Makassar	4.56	4.40	4.61	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Palangka Raya	4.58	4.40	4.59	Pelayanan Prima
26	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.49	4.25	4.54	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Samarinda	4.33	4.25	4.54	Pelayanan Prima
28	Balai POM di Kendari	4.69	4.40	4.52	Pelayanan Prima
29	Balai POM di Palu	4.39	4.25	4.50	Sangat Baik
30	Balai POM di Ambon	4.38	4.25	4.42	Sangat Baik
31	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.11	4.25	4.41	Sangat Baik
32	Balai Besar POM di Banda Aceh	4.56	4.40	4.37	Sangat Baik
33	Balai POM di Tarakan	3.94	3.75	4.24	Sangat Baik
34	Balai Besar POM di Bandung	4.67	4.40	4.14	Sangat Baik

Lampiran 21 Tingkat Efektifitas KIE

Indeks Total			Indeks Registrasi		
Average Values of	Skala 100	Skala 4	Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	93.87	3.75	Televisi	91.5	3.66
Pemahaman	95.88	3.84	Radio	89.53	3.58
Muatan	96.54	3.86	Brosur, majalah, koran	90	3.6
Waktu	87.86	3.51	Video/tra / Billboard	89.22	3.57
Indeks	94.6	3.78	Transportasi Umum	90.15	3.61
Target	94	3.75	Bioskop	90.63	3.63
Capaian	100.64 %		Media Online	89.29	3.57
			Talkshow Televisi	89.52	3.58
			Talkshow Radio	87.5	3.5
			CPD	90.38	3.62
			Pameran	91.29	3.65
			Penyuluhan	93.77	3.75
			Media Sosial	92.62	3.7
			Virtual	92.86	3.71

Lampiran 22 Tahapan Pangan Jajanan Aman Sekolah

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)											
					s.d Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April			6,00	10,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April						4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni						6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov						4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept								5,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah																
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah																
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov										6,33	16,66	20,00	20,00	
7 Pengawalan	10,00	Okt - Des													10,00	
Total skor (Tahun N)	100,00		0	0	6,00	10,00	18,00	20,00	34,00	55,00	55,00	60,25	76,33	86,66	90,00	100,00

Lampiran 23 Tahapan Desa Pangan Aman

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)											
					Januari	s.d	sd	s.d	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d	s.d	s.d	s.d	
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April			6,00	10,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2					2,5	2,5	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3 Pelatihan Kader Keamanan	15,00	April-Juli						6	15	15	15	15	15,00	15,00		
4 Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober								5	11,67	15	15,00	15,00		
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November								3,33	5,55	6,7	9,00	10,00		
6 Intensifikasi Pengawasan	10,00	Mei-Oktober- Post Nove									4,44	5	6,11	10,00		
7 Monitoring dan Evaluasi	15,00	November-Desember											2,22	10,00		
8 Pengawalan	10,00	Juni-Desember						2,50	5	5,00	5,00	5,00	8,00	10,00		
Total	100,00		0,00	0,00	6,00	10,00	20,50	25,00	33,50	42,50	50,83	66,66	71,70	80,33	95,00	100,00

Lampiran 24 Tahapan Pasar Berbasis Komunitas

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												
		Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Advokasi	20	6	10	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2 Survei Pasar	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3 Bimtek Pengelola Pasar	15				9	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15				9	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5 Penyuluhan	10						2	10	10	10	10	10	10	10
6 Kampanye	10						2	10	10	10	10	10	10	10
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15								0	11,08	13,04	15	15	15
8 Pengawalan	10		0,77	8,46	8,46	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total	100	7	15,77	31,46	51,46	65	69	85	85	96,08	98,04	100	100	100

Lampiran 25 KIE non DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total s.d. TW IV	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Sebagai Narasumber, talkshow k)	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	Total	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

Lampiran 26 KIE

No	Kegiatan	BBPOM SEMARANG												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	74	77	73	46	39	63	70	0	50	47	45	49	633
2	Layanan pengaduan b)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
3	Jumlah pengaduan yang	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	Komunikasi, Informasi, dan	0	1	3	0	14	7	10	6	0	0	0	0	41
5	KIE di Area Car Free Day (CFD),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	Ig : 24 Twitter : 19 FB : 12 Youtube : 0 Subsite : 3 tik tok : 6	Ig : 34 Twitter : 8 FB : 25 Youtube : 0 Subsite : 14 tik tok : 5	Ig : 27 Twitter : 10 FB : 20 Youtube : 0 Subsite : 12 tik tok : 13	Ig : 17 Twitter : 13 FB : 11 Youtube : 2 Subsite : 8 tik tok : 1	Ig : 32 Twitter : 14 FB : 21 Youtube : 0 Subsite : 11 tik tok : 12	Ig : Twitter : FB : Youtube : Subsite : tik tok :	Ig : 42 Twitter : 16 FB : 44 Youtube : 0 Subsite : 9 tik tok : 16	Ig : 17 Twitter : 9 FB : 12 Youtube : 0 Subsite : 5 tik tok : 6	Ig : 26 Twitter : FB : Youtube : Subsite : tik tok :	Ig : Twitter : FB : Youtube : Subsite : tik tok :	Ig : Twitter : FB : Youtube : Subsite : tik tok :	Ig : Twitter : FB : Youtube : Subsite : tik tok :	0
7	Komunikasi, Informasi, dan	massa : 2 Elek : 2	massa : 3 Elek : 1	massa : 4 Elek : 2	massa : 4 Elek : 2	massa : 3 Elek : 0	massa : Elek :	massa : Elek :	massa : Elek :	massa : Elek :	massa : Elek :	massa : Elek :	massa : Elek :	0
8	Sebagai Narasumber h)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	KIE Pramuka/SAKA POM dan KIE lainnya	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
10	KIE media luar ruang/billboard/baliho/spanduk	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total													

Lampiran 27 Pengawasan Iklan

NO.	PRODUK	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
			Jumlah	MK	TMK	
1	2	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	- Media Cetak	151	131	20	
		- Media Elektronik	68	52	16	
		- Media Luar Ruang	53	44	9	
		- Media Teknologi Informasi	3	1	2	
2	Obat Tradisional	- Media Cetak	62	38	24	
		- Media Elektronik	14	9	5	
		- Media Luar Ruang	38	25	13	
		- Media Teknologi Informasi	90	42	48	
3	Suplemen Kesehatan	- Media Cetak	38	38	0	
		- Media Elektronik	4	4	0	
		- Media Luar Ruang	25	24	1	
		- Media Teknologi Informasi	14	13	1	
4	Kuasi	- Media Cetak	2	2	0	
		- Media Elektronik	1	1	0	
		- Media Luar Ruang	2	0	2	
		- Media Teknologi Informasi	0	0	0	
5	Kosmetik	- Media Cetak	36	35	1	
		- Media Elektronik	103	100	3	
		- Media Luar Ruang	36	33	3	
		- Media Teknologi Informasi	171	142	29	
6	Pangan	- Media Cetak	22	8	14	
		- Media Elektronik	196	177	19	
		- Media Luar Ruang	264	239	25	
		- Media Teknologi Informasi	148	116	32	
7	Rokok	- Media Cetak	11	6	5	
		- Media Penyiaran	6	6	0	
		- Media Luar Ruang	562	98	464	
		- Media Teknologi Informasi	11	6	5	
TOTAL			2131	1390	741	

Lampiran 28 Tingkat Keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan

Tahapan	S.D. NOVEMBER		2023										
	Target		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	10	4	10	4	1		1,00		0,15	15,00%	84,06%	100,00%	84,06
Tahap I					2		0,90	0,29	0,4	36,89%			
P21					2		0,70	0,29	0,3	23,00%			
Tahap II					5	4	0,50	0,29	0,15	9,17%			
Total	10	4	10	4	10	4							

Lampiran 29 Tingkat Penanganan Perkara Obat dan Makanan

Target	Total										Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
	Tahap penanganan perkara										
	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	SP3		
Tahun n	10	53	10	8	1	7	5	1	0	2.975.000.000	
Carry over *		0	0	0	0	0	4	5	0	1	
Total Balai	10	53	10	8	1	7	9	6	0	2.975.000.001	

Lampiran 30 Indeks RB

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,48	3,79	7,27	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	3,00	6,00	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,52	5,00	9,52	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,74	4,45	9,19	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,50	7,50	15,00	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,92	5,00	9,92	MS
TOTAL PENGUNGKIT					56,90	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			21,90	
I.	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,90	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	MS
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,46	

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,46	MS
TOTAL HASIL					38,26	
NILAI PMPZI					95,26	

Lampiran 31 Nilai SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	19.44	20.64
2.	Pengukuran Kinerja	24	18.48	18.96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9.48
4.	Evaluasi Internal	20	16.80	15.80
5.	Capaian Kinerja	20	16.62	15.67
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,82	80.55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Lampiran 32 Indeks IP ASN

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2023	TARGET 2023
Balai Besar POM di Banda Aceh	90,13	83,00
Balai Besar POM di Bandar Lampung	88,03	79,00
Balai Besar POM di Bandung	89,91	81,00
Balai Besar POM di Banjarmasin	89,33	83,00
Balai Besar POM di Denpasar	90,13	85,40
Balai Besar POM di Jakarta	90,92	84,75
Balai Besar POM di Jayapura	90,70	84,80
Balai Besar POM di Makassar	89,98	77,00
Balai Besar POM di Manado	90,35	85,25
Balai Besar POM di Mataram	90,11	84,00
Balai Besar POM di Medan	89,09	84,00
Balai Besar POM di Padang	89,90	84,30
Balai Besar POM di Palangkaraya	89,86	83,00
Balai Besar POM di Palembang	90,42	85,00
Balai Besar POM di Pekanbaru	89,71	80,00
Balai Besar POM di Pontianak	90,44	83,50
Balai Besar POM di Samarinda	90,94	85,00
Balai Besar POM di Semarang	91,17	86,00
Balai Besar POM di Serang	90,81	84,00
Balai Besar POM di Surabaya	90,35	85,50
Balai Besar POM di Yogyakarta	90,46	85,90
Balai POM di Ambon	90,81	83,00
Balai POM di Batam	89,58	85,75
Balai POM di Bengkulu	89,50	84,50
Balai POM di Bogor	89,71	85,60
Balai POM di Gorontalo	90,08	84,50
Balai POM di Jambi	90,56	85,30
Balai POM di Jember	90,50	86,90

Lampiran 33 Capaian Realisasi BBPOM di Semarang

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	MANADO	46.655.020.000	46.641.753.106	99,9716%
2	PEKAN BARU	33.825.581.000	33.814.912.308	99,9685%
3	BENGKULU	27.403.405.000	27.390.198.929	99,9518%
4	MAMUJU	20.639.655.000	20.623.223.244	99,9204%
5	YOGYAKARTA	44.147.345.000	44.106.982.624	99,9086%
6	MATARAM	23.849.625.000	23.825.109.279	99,8972%
7	PANGKAL PINANG	16.451.796.000	16.429.576.896	99,8649%
8	SEMARANG	61.244.229.000	61.154.028.792	99,8527%
9	PALU	24.232.741.000	24.196.256.384	99,8494%
10	SAMARINDA	27.719.880.000	27.677.593.775	99,8475%
11	SURABAYA	60.668.106.000	60.565.942.725	99,8316%
12	BANJARMASIN	31.985.025.000	31.931.003.338	99,8311%
13	KUPANG	30.257.886.000	30.205.863.268	99,8281%
14	MEDAN	47.096.753.000	47.015.305.992	99,8271%
15	BANDAR LAMPUNG	31.276.287.000	31.222.049.372	99,8266%
16	PALEMBANG	30.186.657.000	30.121.069.761	99,7827%
17	JAMBI	34.248.272.000	34.173.596.323	99,7820%
18	SOFIFI	20.985.888.000	20.931.083.580	99,7389%
19	PALANGKARAYA	21.100.557.000	21.044.037.921	99,7321%
20	BATAM	22.702.216.000	22.632.100.418	99,6912%

Lampiran 34 NKA BBPOM di Semarang

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	MANOKWARI	88,86	99,70	93,20
2	MAMUJU	88,83	99,68	93,17
3	JAKARTA	89,11	97,58	92,50
4	PEKAN BARU	86,61	99,69	91,84
5	KUPANG	88,08	97,09	91,68
6	MATARAM	87,44	97,97	91,65
7	BATAM	87,01	98,29	91,52
8	PANGKAL PINANG	87,02	98,04	91,43
9	SEMARANG	88,23	96,11	91,38
10	PALANGKARAYA	86,83	97,79	91,21
11	SERANG	87,58	96,66	91,21
12	BENGKULU	87,50	96,51	91,10
13	KENDARI	86,97	96,25	90,68
14	JAMBI	87,19	95,81	90,64
15	DENPASAR	86,34	96,59	90,44
16	AMBON	86,06	96,90	90,40
17	SURABAYA	86,46	95,91	90,24

Lampiran 35 Capaian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2023 BBPOM di Semarang

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
3165.AEA	Koordinasi	14	Kegiatan	14	100,00	186.838.000	186.822.719	99,99
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.199	Dokumen	5.222	124,36	1.010.350.000	1.009.758.461	99,94
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	1	100,00	1.048.280.000	1.047.099.520	99,89
3165.BMB	Komunikasi Publik	54	Layanan	57	105,56	111.600.000	111.600.000	100,00
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1	100,00	211.111.000	210.441.950	99,68
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Paket	10	100,00	78.702.000	78.311.200	99,50
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	1	100,00	160.000.000	159.938.870	99,96
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	1	100,00	3.849.182.000	3.845.862.446	99,91
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	10	perkara	10	100,00	949.960.000	949.552.745	99,96
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan	177	Lembaga	181	102,26	2.358.338.000	2.357.334.933	99,96
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.388	Orang	73.331	112,15	19.488.300.000	19.486.683.542	99,99
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	34	UMKM	34	100,00	127.727.000	127.679.000	99,96
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3.075	Produk	3.117	101,37	2.107.750.000	2.106.607.580	99,95
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.288	Lembaga	1.379	107,07	2.338.384.000	2.336.939.866	99,94
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1	100,00	421.522.000	421.490.360	99,99
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	1	100,00	26.796.185.000	26.717.905.600	99,71
TOTAL		74.265		83.361,00	106,12%	61.244.229.000	61.154.028.792	99,85

Lampiran 36 Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator

Kode	KRO	Output	Input	IE	TE	Capaian	Kriteria
3165.AEA	Koordinasi	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	124,36	99,94	1,24	0,24	95%	Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	100,00	99,89	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	105,56	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	99,68	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	100,00	99,50	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	100,00	99,91	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	102,26	99,96	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	112,15	99,99	1,12	0,12	100%	Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	101,37	99,95	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	107,07	99,94	1,07	0,07	100%	Efisien
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	99,71	1,00	0,00	100%	Efisien
	Rata-Rata	106,12	99,85	1,06	0,06	100%	Efisien

Lampiran 37 Capaian Kinerja BBPOM di Semarang 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,36	104,21	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,54	108,97	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	90,99	101,55	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,05	100,06	Sangat Baik
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	94,06	104,51	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di BBPOM di Semarang	81,00	80,56	99,46	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	89,30	94,70	106,05	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	73,58	75,99	103,28	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	92,00	94,97	103,23	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	84,74	102,09	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,40	99,77	100,37	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	62,17	113,04	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,71	109,32	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	4,40	4,62	105,00	Sangat Baik
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,60
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	119,00			123,00	103,36	Sangat Baik
Jumlah desa pangan aman	37,00			37,00	100,00	Baik
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	21,00			21,00	100,00	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00	Sangat Baik
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	84,06	107,76	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	88,00	95,26	108,25	Sangat Baik
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	80,50	80,558	100,07	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	86,00	91,36	106,23	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	88,39	99,31	Cukup
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2,50	3,00	120,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94,70	91,32	96,43	Cukup

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi		Realisasi s.d bulan					
				Pembilang	Penyebut	DESEMBER					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Tenujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	1458	1529	95,36	104,21	104,21
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	649	709	91,54	108,97	108,97
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	535	588	90,99	101,55	101,55
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	154	190	81,05	100,06	100,06
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	95	101	94,06	104,51	104,51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	80,56	99,46	99,46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,30	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	94,70	106,05	106,05
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,58	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	75,99	103,28	103,28
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	94,97	103,23	103,23
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		61	61	100	107,53	107,53

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi		Realisasi s.d bulan				
				Pembilang	Penyebut	DESEMBER				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Tenujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	91,50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	1458	1529	95,36	104,21	104,21
		2	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	649	709	91,54	108,97	108,97
		3	89,60	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	535	588	90,99	101,55	101,55
		4	81,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	154	190	81,05	100,06	100,06
		5	90,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Total Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	95	101	94,06	104,51	104,51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	81,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	80,56	99,46	99,46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	89,30	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	94,70	106,05	106,05
		8	73,58	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	75,99	103,28	103,28
		9	92,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	94,97	103,23	103,23
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	93,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		61	61	100	107,53	107,53

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Definisi		Realisasi s.d bulan				
				Pembilang	Penyebut	DESEMBER				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24 Indeks RB UPT	88,00	Hasil indeks RB dari ltama		-	-	95,26	108,25	108,25
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25 Nilai AKIP UPT	80,50	Hasil nilai AKIP dari ltama		-	-	80,558	100,07	100,07
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	91,36	106,23	106,23
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	88,39	99,31	99,31
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	3	120,00	120,00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,70	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	91,38	96,50	96,50

Lampiran 38 Capaian Rincian Output BBPOM di Semarang 2023

Rincian Output		Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
3165.AEA	Koordinasi	186.838.000	186.822.719	99,99%	14	14	100,00%	Efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.010.350.000	1.009.758.461	99,94%	4.199	5.222	124,36%	Efisien
3165.BKB	Pemantauan produk	1.048.280.000	1.047.099.520	99,89%	1	1	100,00%	Efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik	111.600.000	111.600.000	100,00%	54	57	105,56%	Efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	211.111.000	210.441.950	99,68%	1	1	100,00%	Efisien
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	78.702.000	78.311.200	99,50%	10	10	100,00%	Efisien
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	160.000.000	159.938.870	99,96%	1	1	100,00%	Efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	3.849.182.000	3.845.862.446	99,91%	1	1	100,00%	Efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	949.960.000	949.552.745	99,96%	10	10	100,00%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.358.338.000	2.357.334.933	99,96%	177	181	102,26%	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	961.026.000	960.657.421	99,96%	119	123	103,36%	Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1.089.691.000	1.089.175.580	99,95%	37	37	100,00%	Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	307.621.000	307.501.932	99,96%	21	21	100,00%	Efisien
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19.488.300.000	19.486.683.542	99,99%	65.388	73.331	112,15%	Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	127.727.000	127.679.000	99,96%	34	34	100,00%	Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.107.750.000	2.106.607.580	99,95%	3.075	3.117	101,37%	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	678.763.000	678.582.146	99,97%	880	899	102,16%	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.372.737.000	1.372.107.934	99,95%	2.095	2.117	101,05%	Efisien
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	56.250.000	55.917.500	99,41%	100	101	101,00%	Efisien

Rincian Output		Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.338.384.000	2.336.939.866	99,94%	1.288	1.379	107,07%	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	471.252.000	471.213.400	99,99%	337	341	101,19%	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1.867.132.000	1.865.726.466	99,92%	951	1.038	109,15%	Efisien
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	421.522.000	421.490.360	99,99%	1	1	100,00%	Efisien
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	26.796.185.000	26.717.905.600	99,71%				Efisien
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	26.796.185.000	26.717.905.600	99,71%	1	1	100,00%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.796.185.000	26.717.905.600	99,71%	1	1	100,00%	Efisien

Lampiran 39 Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kluster I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Surabaya					Semarang					Bandung				
			Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perspektif	Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perspektif	Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perspektif
PERPEKTIF STAKEHOLDER																	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	92,54	100,59	104,49	104,67	91,50	95,36	104,21	103,86	102,50	98,00	97,36	99,35	106,03	106,48
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	90,62	107,88			84,00	91,54	108,97			84,00	88,17	104,96		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	94,81	105,34			89,60	90,99	101,55			96,00	95,68	99,66		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00	85,00	116,44			81,00	81,05	100,06			78,00	82,81	106,17		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	83,00	92,22			90,00	94,06	104,51			78,00	97,6	120		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,00	84,50	104,32	104,32		81,00	80,56	99,46	99,46		78,00	86,68	111,13	111,13	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,70	96,40	112,49	105,20		89,30	94,70	106,06	104,18		93,40	97,3	104,18	102,30	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,55	80,14	102,02			73,58	75,99	103,28			82,62	83,72	101,33		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91,00	91,98	101,08			92,00	94,97	103,23			91,00	92,26	101,38		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Surabaya					Semarang					Bandung				
			Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Target	Realisasi	Per IK	Per SS	Per Perpektif
PERPEKTIF INTERNAL PROCESS																	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	97,30	104,62	106,97	106,52	93,00	100,00	107,53	108,19	109,24	98,00	100	102,04	103,82	105,37
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00	89,42	116,13			83,00	84,74	102,10			78,00	89,96	115,33		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	95,54	96,51			99,40	99,77	100,37			94,00	99,57	105,92		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	67,73	104,20			55,00	62,17	113,04			66,00	65,94	99,9		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64,00	70,86	110,71			72,00	78,71	109,32			78,00	81,1	103,98		
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,60	4,98	108,26			4,40	4,62	105,00			4,40	4,14	94,09		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65,00	70,43	108,36			79,00	100,00	120,00			79,00	83,33	105,49		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,38	94,39	101,08	100,27		94,00	94,60	100,64	101,00		95,70	95,7	100,05	100,01	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112,00	112,00	100,00			119,00	123,00	103,36			112,00	112	100		
		Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00			37,00	37,00	100,00			37,00	37	100		
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24,00	24,00	100,00			21,00	21,00	100,00			100,00	18	100		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	120,00		100,00	100,00	120,00	120,00		100,00	99,07	99,07	99,37	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00			100,00	100,00	120,00			100,00	99,66	99,66		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,00	71,17	98,84	98,84		78,00	84,06	107,76	107,76		70,00	82,81	118,3	118,30	



Balai Besar POM di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024-7612324/Fax. 024-7613633



likpomsm@yahoo.com



www.pom.go.id



@bpom.semarang



@bpom.semarang



@bpomsemarang



@bpom.semarang